

345.001

NAS

f e1



**FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENGEMBALIAN  
KEPADA ORANG TUA, WALI ATAU ORANG TUA ASUH  
DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA ANAK**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NASHRIANA  
NIM. B. 002.95.0134**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

**FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENGEMBALIAN  
KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH  
DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA ANAK**

Disusun oleh :

**NASHRIANA**  
**NIM. B. 002.95.0134**

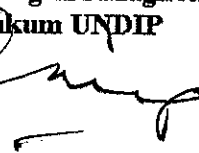
Tesis ini telah disetujui  
sebagai persyaratan untuk menempuh ujian  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

**Pembimbing,**



**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Magister**  
**Ilmu Hukum UNDIP**



**Prof. Dr.H. BARDA NAWAWI ARIEF,S.H.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, serta segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dengan segala Ridla, Perkenan, dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Fungsionalisasi Lembaga Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk menyelesaikan tesis ini bukanlah pekerjaan yang ringan, namun sekali lagi berkat karunia-Nya serta didorong oleh semangat dan keyakinan pada diri sendiri dan didukung oleh berbagai pihak yang memiliki atensi yang besar dalam proses sehingga terselesaikanlah penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada Bapak/Ibu/Saudara :

1. **Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.** selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, sekaligus Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan sehingga karya ilmiah ini dapat terwujud.
2. **Prof.H, Purwahid Patrik, S.H.,** selaku mantan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberi kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan.
3. **Prof.Dr.H. Mustafa Abdullah, S.H.** selaku Pembantu Rektor I, yang telah memberi kesempatan, dorongan moril dan materil kepada penulis untuk mengikuti pendidikan.
4. **H. Azis Numal, S.H.,** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan, nasehat, dan dorongan semangat kepada penulis.

5. **Kapoltabes Palembang dan Staff**, yang telah membantu penulis dengan penuh perhatian dan keikhlasan.
  6. **Ketua Kejaksaan Negeri Palembang dan Staff**, yang telah membantu penulis memberikan data yang diperlukan.
  7. **Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Staff**, yang telah membantu penulis dengan penuh perhatian dan keikhlasan.
  8. **Ketua BAPAS dan Staff**, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian penuh memberi kesempatan kepada penulis mendapatkan data yang diperlukan
  9. **Keluarga Besar H. Nanguning, Bapak Taufik Sekeluarga, Rekan-Rekan Fakultas Hukum UNSRI, dan Teman-Teman Angkatan XIV UNDIP**, atas dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis,
- semoga Allah SWT, memberikan imbalan dan limpahan rahmat kepada beliau atas amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa meskipun penelitian dan penyusunan tesis ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan InsyaAllah dengan penuh kecermatan, namun karena kesadaran akan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman, tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran amat penulis harapkan, demi perbaikan tesis ini dan demi perbaikan penulisan di masa mendatang.

Akhirul kalam, penulis berharap mudah-mudahan apa yang penulis hasilkan dapat bermanfaat, terutama bagi pihak yang mempunyai perhatian pada karya ilmiah ini.

Wassalammu'alaikum Wr wb.

Semarang. Oktober 1999

**NASHRIANA**  
**NIM.B.002.95.0134**



**Muliakanlah anak-anakmu dan bagus kanlah  
pendidikan mereka  
(HR. Ibnu Majah)**

**Terobosan yang potensial bagi orang tua.....  
memahami anak dengan tulus  
Terobosan yang potensial bagi anak.....  
Citra diri yang kokoh  
(John C Maxwell)**

**Kupersembahkan kepada :**

**Almarhum Ayahanda,  
dengan segala kenangan akan  
cinta dan kasih sayangnya.....  
Ibundaku,  
dengan segala doa dan  
perhatiannya.....  
Saudara-saudaraku,  
dengan segala dukungan moril  
dan materilnya.....**

## ABSTRAKSI

Anak adalah potensi dan penerus suatu bangsa, yang perlindungannya harus dimulai sejak dini. Anak adalah makhluk yang memiliki ciri dan sifat khusus, yang berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara sehat dan wajar. Karena itu, segala kebijakan dan perlakuan/tindakan yang berkaitan dengan anak, harus selalu didasarkan semata-mata demi kesejahteraan anak, yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Anak yang mempunyai masalah kelakuan, sebaiknya diperlakukan tidak sama dengan pelaku-pelaku dewasa yang notabene mempunyai kemandirian, pola pikir, dan pola laku yang amat berbeda. Karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal/pelaku tindak pidana, orang tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Ironisnya, apa yang telah diatur secara baik dalam suatu peraturan (hukum pidana) - yang menunjukkan adanya itikad baik pemerintah sebagai pembentuk kebijakan - kadangkala hanya merupakan slogan belaka.

Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 - yang sebelumnya juga diatur pada Pasal 45 KUHP - tindakan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh - sebagai tindakan non-kelembagaan - adalah salah satu bentuk reaksi terhadap kenakalan anak. Namun patut disayangkan, dalam praktek peradilan di Palembang, putusan demikian sama sekali tidak pernah dikenal, sementara hukum positif Indonesia telah mengatur bahwa pemberian realisasi terhadap kenakalan anak sebaiknya berupa tindakan yang tidak memisahkan si anak dari orang tuanya, kecuali bila orang tuanya tersebut mempunyai masalah kelakuan/ketidakmampuan, mengingat ciri dan sifat yang khas dari anak (Penjelasan UU No. 3 tahun 1997). Dalam dokumen internasional dinyatakan bahwa tindakan kelembagaan hanya diberikan sebagai upaya terakhir dengan waktu seminimal mungkin dan dalam kasus-kasus yang berat, yang saat ini juga telah dipertegas dalam UU No. 39 tahun 1999 (UU tentang HAM).

Sebab utama tidak dikenalnya putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, dikarenakan hakim sebagai subjek hukum terpaksa memberikan putusan kelembagaan/penjara karena tindakan hakim terikat pada perilaku/tindakan aparat penegak hukum pada proses sebelumnya (penyidikan dan penuntutan). Keterpaksaan tindakan hakim tersebut ditunjukkan oleh temuan data dimana lebih dari 50% dari seluruh putusan adalah semata-mata discimbangkan dengan lamanya anak dalam proses pemeriksaan/peradilan. Secara rasionalitas tindakan hakim memang dimungkinkan, karena lembaga kehakiman adalah sub sistem SPP yang integratif, yang notabene merupakan satu kesatuan tindak dalam lingkup SPP Anak menuju ke suatu titik yang telah disepakati, yaitu tujuan SPP Anak itu sendiri. Dalam kajian/perspektif lain, SPP Anak merupakan suatu organisasi birokrasi. Sebagai organisasi birokrasi, sub-sub sistem SPP anak dihadapkan pada suatu pilihan yang dilematis antara pencapaian tujuan organisasi itu sendiri dengan fungsinya sebagai pelindung hak-hak anak. Seringkali dijumpai adanya perbenturan tujuan dari lembaga birokrasi yang terkait dalam SPP -

sebagai sub sistem SPP Anak - tidak sama dengan tujuan SPP yang sebenarnya. Maksudnya, apa yang menjadi tujuan SPP akan diterjemahkan sendiri dan diarahkan sesuai dengan tujuan dari organisasi birokrasi itu sendiri.

Keinginan hakim untuk memberikan putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, terhambat pada kondisi-kondisi yang teridentifikasi mempengaruhi pola kerjanya. Kondisi-kondisi tersebut menyangkut : *Pertama*, adanya perbedaan perspektif struktur peradilan anak yaitu penyidik dan penuntut umum dengan aparat pemutus (hakim), tentang tujuan peradilan anak. Hakim dianggap lebih memahami tujuan peradilan anak, sementara pihak penyidik dan penuntut umum dalam kewenangannya cenderung tidak mengindahkan hak-hak anak. Terlebih pada tingkat penyidikan - sebagai aparat yang mempunyai kontak awal dengan anak - seharusnya tidak dengan mudah melakukan penahanan terhadap anak yang dikhawatirkan amat riskan dan beresiko terhadap perkembangan kejiwaan (psyche) si anak. *Kedua*, kurang difungsikannya bantuan hukum dalam proses peradilan anak, sementara diketahui bahwa anak adalah makhluk yang bercirikan kekurangmandirian dan kebergantungan (dependensi) dengan orang lain. Bantuan hukum yang diberikan akan sangat membantu anak untuk memahami - walau sebatas alam pikirannya - tentang hak-hak hukumnya, selain juga membantu proses peradilan yang mendukung nilai keadilan dan humanistik. *Ketiga*, kurang difungsikannya secara optimal manfaat pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan - terutama di tingkat penyidikan - yang selama ini difungsikan sebatas formalitas belaka. Litmas seharusnya dapat digunakan aparat penyidik untuk memilih dari beberapa tindakan yang bersifat penghindaran perilaku yang refresif dan birokratik. *Keempat*, kurang difungsikannya psikologi dalam penanganan kenakalan/tindak pidana anak. Psikologi amat membantu aparat hukum dalam memahami latar belakang perilaku anak dan tindakan-tindakan apa yang akan diberikan yang tidak menghambat pertumbuhan/perkembangan kejiwaan (psyche) anak nakal.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN .....	11
D. KONTRIBUSI PENELITIAN .....	11
E. KERANGKA TEORITIS .....	12
F. METODE PENELITIAN.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Jenis dan Sumber Data .....	25

5. Metode Pengumpulan Data .....	26
6. Sampel dan Teknik Sampel.....	26
7. Analisis Data.....	27
8. Sistematika Penulisan .....	27

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

A. PENGERTIAN ANAK.....	29
B. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG KENAKALAN ANAK/ TINDAK PIDANA ANAK .....	35
1. Pengertian Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak.....	35
2. Latar Belakang Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak .....	39
C. STRATEGI PENCEGAHAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI PENCEGAHAN KEJAHATAN .....	51
1. Alasan Perhatian Pada Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain .....	54
2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Pencegahan Kejahatan/ Penyimpangan Lain.....	55
3. Peserta Dalam Usaha Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain .	69
4. Pelaksanaan Usaha Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain ....	70
D. PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK MELALUI HUKUM PIDANA .....	73
1. Politik Kriminal Dalam Konteks Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak.....	73
2. Perlindungan Hukum Bagi anak (Pelaku) Dalam Konteks Hukum Pidana Material.....	87
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) Dalam Konteks Hukum Pidana Formal.....	98

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) Dalam Konteks Hukum Pelaksanaan Pidana.....	103
<b>E. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF DOKUMEN INTERNASIONAL.....</b>	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Secara Umum.....	105
2. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Bermasalah Kelakuan.....	108
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. GAMBARAN UMUM TENTANG KENAKALAN/KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTAMADIA PALEMBANG.....</b>	
1. Data Kriminalitas : Suatu Kajian Statistik Kriminal .....	119
2. Deskripsi Kenakalan/Kejahatan di Kotamadia Palembang .....	128
3. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak di Kotamadia Palembang.....	138
 <b>B. FAKTOR PENYEBAB TIDAK BERFUNGSIONYA PUTUSAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH .....</b>	
1. Lembaga Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh Sebagai Pengembangan Ide Subjektivitas Pelaku.....	141
2. Sebab Musabab Tidak Berfungsinya Putusan Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh Dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak .....	162
 <b>C. KONDISI-KONDISI DISFUNGSI LEMBAGA PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH .....</b>	
1. Adanya Perbedaan Perspektif Struktur Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan Anak .....	181
2. Kurang Difungsikannya Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak.....	191

3. Kurang Difungsikannya Secara Optimal Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Kasus Kenakalan Anak/ Tindak Pidana Anak.....	196
4. Kurang Diakutinya Eksistensi Psikologi Dalam Penanganan Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak .....	204

#### **D. UPAYA FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENGEMBALIAN**

<b>KEPADA ORANG TUA, WALL, ATAU ORANG TUA ASUH</b>	
<b>DALAM KASUS KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK.</b>	<b>212</b>

1. Eliminasi Perbedaan Perspektif Struktur Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan Anak.....	212
2. Pemumbuhan Sikap Urgensi Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak.....	229
3. Optimalisasi Manfaat Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak .....	230
4. Urgensi Pengakuan Eksistensi Psikologi Dalam Penanganan Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak .....	231

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN .....	237
B. SARAN-SARAN.....	240

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
. TABEL 1 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1992 .....	122
. TABEL 2 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1993 .....	123
. TABEL 3 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1994 .....	124
. TABEL 4 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1992 ...	126
. TABEL 5 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1993 ...	127
. TABEL 6 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1994 ...	128
. TABEL 7 : Keadaan Kriminalitas di Kotamadia Palembang Menurut Daerah Sektor Kepolisian Tahun 1994-1998 .....	129
. TABEL 8 : Keadaan Kriminalitas di Kotamadia Palembang Menurut Jenis Kejahatan Tahun 1994-1998 .....	130
. TABEL 9 : Banyaknya anak tertuduh/terdakwa (laki-laki dan perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan berdasarkan jenis kenakalan di kotamadia Palembang tahun 1994-1998 . ....	131
. TABEL 10: Banyaknya anak tertuduh/terdakwa (laki-laki dan perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan berdasarkan jenis hukuman di kotamadia Palembang tahun 1994-1998 .....	139



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
RAGAAAN 1 : HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DAN POLITIK SOSIAL .....	76
RAGAAAN 2 : LINGKUP KEBIJAKAN KRIMINAL .....	77
RAGAAAN 3 : HUBUNGAN POLITIK KRIMINAL DENGAN POLITIK SOSIAL DAN POLITIK KESEJAHTERAAN ANAK .....	84
RAGAAAN 4 : LINGKUP KAJIAN TENTANG PERILAKU DELINKUENSI ANAK ...	86

## DAFTAR LAMPIRAN

- **TABEL 1** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur 1992
- **TABEL 2** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur 1993
- **TABEL 3** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur 1994
- **TABEL 4** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dalam kelompok umur 1992
- **TABEL 5** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dalam kelompok umur 1993
- **TABEL 6** : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dalam kelompok umur 1994
- **POLA PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuh mungkin, sesuai dengan hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk

mencapai kesejahteraan anak.<sup>1</sup> Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>3</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

<sup>2</sup> Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Abdul Hakim G. nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 23.

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222.

<sup>4</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak : Prospek dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana III, dalam buku *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 53.

Berkaitan dengan aspek pertama, dapat kita lihat baik dalam UUD 1945, GBHN, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak. Masalahnya kemudian, apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak yang ada, telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik pelanggaran dan pengabaian hak anak sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundangan tersebut, dapat diakhiri. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hak anak dan bagaimana pengimplementasian kebijakan dan ketentuan yang telah ada, pembahasan inilah merupakan aspek kedua dari masalah perlindungan anak.

Penghapusan praktik pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak yang dimaksud, berkaitan erat dengan upaya pelayanan khusus yang diberikan terhadap anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonominya.<sup>5</sup> Terhadap anak-anak yang mengalami masalah kelakuan (yaitu kenakalan pada anak)<sup>6</sup>, pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah dimulai sekitar tahun 1958, yaitu dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha pemerintah ini didasarkan

---

<sup>5</sup> Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan "Disamping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu :

1. Anak-anak tidak mampu
2. Anak-anak terlantar
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani."

<sup>6</sup> Loebby Loqman menyatakan bahwa "pengaturan perlindungan terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan, dikarenakan anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri, maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang memilikinya."

Loebby Loqman, *Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 1-2.

pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>7</sup>, tujuan dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Sewaktu membahas RUU Peradilan Anak - yang konsepnya telah siap tahun 1967 - almarhum Sudarto juga berpendapat bahwa walaupun di dalam RUU disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, keinginan untuk mewujudkan perundang-undangan khusus bagi anak, yang mengatur secara integratif mengenai hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan bagi anak yang melakukan kenakalan. Dalam UU ini, yang dimaksud anak nakal (Pasal 1 ayat 2) adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 111.

<sup>8</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *ibid*.

Terhadap anak nakal tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan (Pasal 23) berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok dimaksud adalah : Penjara, Kurungan, Denda, atau Pidana Pengawasan ; sedangkan Pidana Tambahan berupa : Perampasan Barang-Barang Tertentu, Pembayaran Ganti Rugi. Mengenai penjatuhan putusan yang berupa Tindakan (Pasal 24), ditentukan :

- “(1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2). Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.”

Sebelum menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak, seorang hakim hendaknya bersikap sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, yaitu dengan tidak mengabaikan faktor penyebab, pengaruh, dan akibat bagi diri si anak juga masyarakat. Dalam kaitan ini, Bismar Siregar menyatakan bahwa peran hakim bersifat spiritual bukan lahiriah. Hal ini terbukti dari kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”, dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Walaupun ada penyimpangan, menurut beliau semata-mata karena masih banyak hakim yang menjabarkan hukum secara harfiah dan mengabaikan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan hukum yang

---

<sup>9</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 34.

sebenarnya tidak harus dirumuskan dalam kata-kata, tetapi dapat dipahami dan dihayati karena bersumber pada hati nurani manusia.<sup>10</sup>

Hakim memegang peranan yang sangat sentral, karena ditangannyalah ditentukan status dan nasib terdakwa anak, serta dampaknya terhadap mental, fisik, dan sosial anak. Apabila putusan hakim tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional positif, bertanggung jawab, dan atas asas kemanfaatan bagi anak, dikhawatirkan bahwa putusan itu justru menimbulkan korban struktur (Viktimisasi Struktural)<sup>11</sup>, yang sebenarnya telah terjadi pada saat sebelum putusan dijatuhkan (sebelum dan saat proses peradilan) - seperti yang penulis temui dalam penelitian mandiri tahun 1992 - maupun setelah ada putusan pengadilan. Ini berarti bahwa usaha penegakan hukum dapat juga merupakan suatu faktor viktimogen atau kriminogen. Untuk itu, Agung Wahyono dan Siti Rahayu menyatakan bahwa efektivitas Peradilan Anak tidak akan tercapai jika tidak disertai pengetahuan mengenai anak dan permasalahannya, karena anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.<sup>12</sup> Dalam Konsideran UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak-pun diakui bahwa anak mempunyai 'ciri dan sifat khusus' yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Berkaitan dengan putusan berupa perampasan kemerdekaan (institusional/ custodial), banyak kritik yang dilontarkan berkenaan dengan efektivitas dan segi-segi negatifnya, sehingga

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>11</sup> Menurut Arif Gosita, viktimisasi struktural adalah penimbunan korban dan akibat-akibat yang tidak diinginkan dalam usaha penegakan hukum yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan pada yang bersangkutan oleh karena struktur tertentu serta sistemnya dalam masyarakat tertentu. Arif Gosita, *op.cit.*, hal. 101.

<sup>12</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 12.



pidana penjara ini termasuk salah satu jenis sanksi pidana yang diragukan kemanfaatannya dan 'kurang disukai'.<sup>13</sup> Mengenai efektivitasnya, R.M. Jackson mengemukakan bahwa penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif, karena hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*Reconviction Rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.<sup>14</sup>

Selain masalah efektivitas, segi-segi negatif pidana inipun selalu menjadi sorotan, seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa<sup>15</sup> : "... selanjutnya bilamana ditinjau dari hakikat fungsi penjara, maka penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelaku tindak pidana berupa ketidak- mampuan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat."

Dari ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan para ahli tentang efektivitas dan segi-segi negatif pidana penjara, mengalihkan pandangan kita akan eksistensi hukum yang bukan kelembagaan, sebagai alternatif pemecahan. Terlebih apabila si terpidana adalah anak-anak yang memerlukan pertolongan, yang seharusnya dilihat kemanfaatan pemidanaan kelembagaan terhadap perkembangan jiwanya. Dikhawatirkan, dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap anak, akankah mampu menginsyafkan si anak atas perbuatannya, ataukah bahkan sebaliknya menjadikan ia seorang penjahat kecil. Pendekatan yang penuh kasih sayang, dengan usaha sedapat mungkin dihindarkannya putusan kelembagaan, bahkan dihindarkannya campur tangan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 9.

<sup>14</sup> Ibid, hal. 47.

<sup>15</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 141.

Sistem Peradilan Pidana, akan terasa lebih bijaksana. Terkecuali bagi terdakwa anak yang memang harus dijatuhi pidana demikian – dengan tidak meninggalkan filosofi untuk kepentingan dan kesejahteraan anak – yaitu terhadap kasus-kasus yang berat. Solusinya yaitu dengan mendayagunakan hukuman khusus bagi anak yang telah ada, berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban, bentuk ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa :<sup>16</sup>

“... anak yang telah melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah ‘korban struktural’ atau ‘korban lingkungan’. Oleh karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran/gagasan/strategi ‘pertanggungjawaban struktural/fungsional’. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan ‘*treatment*’) si anak sebagai pelaku kejahatan tetapi juga berfungsi untuk memper-tanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Misalnya, dalam hukum adat, pemidanaan/pertanggungjawaban dapat juga dikenakan kepada pihak orang tua dan ‘ketua adat’ (pejabat).”

Dalam Dokumen Internasionalpun, penghindaran sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat custodial, dapat terlihat dalam Pasal 17.1 dan Pasal 19.1 Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*) dan point 1.1 dan 1.2 Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty.<sup>17</sup>

Namun kenyataannya, kebanyakan hakim Indonesia memilih menjatuhkan pidana penjara, karena dianggap sebagai tindakan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.169

<sup>17</sup> Ibid, hal. 12-13.

si anak, dan selain putusannya lebih mudah dilaksanakan.<sup>18</sup> Data empiris dapat dilihat dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Djeje Wachyudin, didapatkan distribusi jenis putusan untuk tindak pidana anak periode tahun 1986-1990, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Dikembalikan pada orang tua, wali, orang tua asuh sejumlah 51 orang :  
15 (tahun 1986) ; 10 (tahun 1987) ; 8 (tahun 1988) ; 6 (tahun 1989) ; 12 (tahun 1990)
2. Dipelihara sebagai anak negara, sejumlah 42 orang :  
6 (tahun 1986) ; 7 (tahun 1987) ; 15 (tahun 1988) ; 9 (tahun 1989) ; 6 (tahun 1990)
3. Pidana Penjara, sejumlah 311 orang :  
62 (tahun 1986) ; 69 (tahun 1987) ; 54 (tahun 1988) ; 60 (tahun 1989) ; 66 (tahun 1990).

Dari data tersebut, hanya 12,59% (51 dari 505 orang), yang dikenakan putusan yang bukan kelembagaan, sementara putusan yang bersifat kelembagaan<sup>20</sup> sebanyak 87,41%. Fenomena ini memberi keprihatinan dan menimbulkan pertanyaan kepada kita : mengapa lembaga non-kelembagaan (Tindakan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh) jarang sekali digunakan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan kata lain faktor apa yang menyebabkan aparat penegak hukum kurang memfungsikan secara lebih optimal lembaga tersebut; alternatif pemecahan bagaimana yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan fungsi lembaga tersebut; dan kondisi-kondisi bagaimanakah dapat menumbuhkan/mengembangkan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang

<sup>18</sup> Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal.147.

<sup>19</sup> Data diambil dari Tabel XIII hasil penelitian Djeje Wachyudin, *Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Masa Datang (Penelitian di Kotamadya Dati II Bandung)*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1991.

<sup>20</sup> Secara yuridis, anak negara termasuk sebagai anak didik kemasyarakatan (Pasal 8.b UU No. 12 tahun 1995, tentang *Pemasyarakatan*), yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

tua, wali, atau orang tua asuh.. Pertanyaan-pertanyaan demikianlah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan karya ilmiah ini.

## B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini berkisar pada masalah kebijakan aplikatif (yudikatif), yaitu pemilihan dari sekian alternatif pidana dan tindakan bagi anak nakal. Kebijakan aplikatif merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan pemidanaan yang diambil (Politik Kriminal), sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal.

Bagi anak, penjatuhannya suatu sanksi oleh hakim merupakan persoalan yang sangat penting, dikarenakan putusan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik, dan sosial anak.. Untuk itu, segala tindakan yang diberikan pada anak haruslah didasari pada konsep dan filosofi yang telah disepakati, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Atas dasar kepentingan dan kesejahteraan anak pula yang mendasari pemikiran kita bahwa seorang anak harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, kasih sayang, dan bukan reaksi yang bersifat pembalasan (*punitive*).

Oleh karena itu, fungsionalisasi lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh terhadap kasus-kasus anak nakal, merupakan alternatif pemilihan yang ada. Fungsionalisasi dimaksud adalah usaha pendayagunaan yang lebih optimal fungsi lembaga tersebut dalam memberikan reaksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kenakalan, yang tidak saja diberikan pada tahap pengambilan putusan, tetapi juga dimungkinkan pada

tahap-tahap sebelumnya (penyidikan dan penuntutan), yang salah satunya untuk menghindari stigmatisasi bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh jarang difungsikan aparat penegak hukum (hakim)?
2. Kondisi-kondisi bagaimana yang mempengaruhi disfungsi lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memfungsionalisasikan lembaga tersebut?

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok-pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk meng-identifikasikan faktor penyebab terhambatnya kebijakan aplikatif, dan mencari sarana kondisional yang dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan lembaga pengembalian kepada orangtua, wali, atau orang tua asuhnya dalam menghadapi kasus kenakalan anak.

#### D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :

1. Menambah informasi yang faktual dan konkrit bagi usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Memberikan informasi bagi struktur hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masalah pemidanaan dengan segala aspeknya, baik yang menyangkut filosofi pemidanaan, pemilihan alternatif hukuman, ataupun tujuan peradilan anak itu sendiri.

#### E. KERANGKA TEORITIS

Istilah *Juvenile Delinquency* atau anak-anak delinkuen yang kita kenal, adalah pengkondisian tingkah laku kriminal sebagai akibat pengaruh sosial dan kultural yang mengelilinginya, yang menunjukkan kurangnya atau tidak adanya konformitas anak terhadap norma-norma yang ada, yaitu norma hukum ataupun terhadap norma yang hidup dalam masyarakat.

Berbicara mengenai hak-hak anak delinkuen, sering dikaitkan dengan masalah perilaku anak dalam kadar tertentu berbentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku kriminal, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan terhadap perilaku tersebut di masyarakat.

Banyak teori-teori yang mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak berperilaku menyimpang. Sebagai contoh adalah perumusan yang diberikan DR. Kartini Kartono yang menyatakan bahwa kejahatan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologi sosial dapat dikelompokkan dalam satu kelas defektif secara sosial, dan mempunyai sebab musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi kausal. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori : (1) Teori Biologis, yang memberi pemahaman bahwa tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena

faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir; (2) Teori Psikogenis, yang menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya, antara lain : faktor intelegensia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan sebagainya; (3) Teori Sosiogenis, yang menyatakan bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak dan remaja, murni sosiologi atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi simbolis yang keliru; dan (4) Teori Subkultural Delinkuensi, yang menyatakan sumber perilaku delinkuen anak adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuensi tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain : populasi yang padat, status sosial ekonomi yang rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>21</sup>

Dalam menghadapi anak yang mengalami masalah kelakuan tersebut, pemahaman-pemahaman dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan lebih berorientasi pada pembinaan dan pendidikan yang didasari atas asas kemanfaatan, rasa tanggung jawab, dan penuh kasih sayang, karena anak mempunyai sifat dan ciri khusus yang amat berbeda dengan orang dewasa. Dengan kata lain, pemahaman dan pendekatan secara kemanusiaan/humaniter akan sangat dibutuhkan oleh anak, atas beberapa pertimbangan :

- (1). Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan/humaniter terhadap pribadi anak-anak dan remaja;

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal.25.

- (2). Kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal, bermasalah, dan menjadi masalah sosial, disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka;
- (3). Untuk menggolongkan anak dan remaja delinkuen tersebut ke dalam satu katagori yang berbeda dengan katagori kriminalitas orang dewasa;
- (4). Untuk menerapkan prosedur-prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan, dan rehabilitasi khusus, terutama sekali untuk menghindarkan anak-anak dari pengalaman traumatis yang tidak perlu, serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan manipulatif oleh orang-orang dewasa;
- (5). Adanya tugas '*parens patriae*' sebagai orang tua dan bapak oleh orang dewasa dan masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut bertanggung jawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak dan remaja yang terhalang proses perkembangan mental, dan cacat secara sosial.<sup>22</sup>

Penanggulangan perilaku menyimpang oleh anak, tidak terlepas dari pembicaraan penanggulangan kejahatan pada umumnya, yang disebut dengan Politik Kriminal sebagai suatu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan<sup>23</sup>, yaitu dapat dilakukan melalui pendekatan penal maupun non-penal. Bagi anak delinkuen, pendekatan saran penal (Peradilan Anak) adalah bagian integral dari keadilan sosial anak, sebagai upaya perwujudan kesejahteraan anak yang berpegang pada asas proporsionalitas.<sup>24</sup> Yang perlu diperhatikan dalam Peradilan Anak bahwa Peradilan Anak adalah suatu sistem (SPP Anak) yang terdiri dari subsistem yang saling ketergantungan (*interrelated*) satu dengan yang lainnya. Peradilan Anak juga adalah

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 11-12.

<sup>23</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 38.

<sup>24</sup> Lihat General Principles UN SMR-JJ (*The Beijing Rules*), Rule 5.



suatu organisasi birokrasi yang masing-masing lembaga yang terkait dalam SPP Anak tersebut mempunyai ideologi, struktur, personel, maupun peraturan sendiri, yang seringkali tidak berjalan seiring dengan ideologi, struktur, personel, dan peraturan dari sub sistem yang lebih besar, dalam hal ini adalah Peradilan Pidana.<sup>25</sup>

Dalam hal pemberian sanksi (hukuman) terhadap anak delinkuen, harus didasarkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>26</sup> Untuk itu, menurut Bismar Siregar hakim dituntut selalu arif dan bijaksana, yang bersumber pada hati nuraninya. Hakim tidak hanya merujuk pada bunyi peraturan atau undang-undang, tetapi wajib menjiwai apa yang terdapat di balik peraturan atau undang-undang tersebut.<sup>27</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, hakim anak wajib mendengarkan Laporan Sosial (*Case Study*) yang dibuat oleh BISPA<sup>28</sup>, yang dapat membantu hakim untuk memilih putusan apa yang tepat diberikan pada anak nakal.

Lebih jauh, pemberian sanksi (hukuman) terhadap anak yang melakukan kenakalan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Walaupun belum diatur secara substantif dalam hukum positif Indonesia, namun secara teoritis/konseptual tujuan pemidanaan seringkali dibicarakan. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal

---

<sup>25</sup> Blumberg, *Criminal Justice System*, Quagdrate Books, Chicago, 1970, hal. 5.

<sup>26</sup> Lihat dalam Artikel 3 Konvensi Hak-Hak Anak : "*In all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration*".

<sup>27</sup> Bismar Siregar, *op.cit.*, hal. 80.

<sup>28</sup> Tugas wajib untuk mendengarkan laporan BISPA pada hakim, didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM-01.03 Tahun 1991, yang kemudian dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 diubah menjadi Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.

ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.<sup>29</sup>

Dalam Konsep KUHP Nasional (Disempurnakan oleh Tim Kecil Sampai dengan 13 Maret 1993) pada Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (Pasal 51), tujuan pemidanaan untuk :

- Ke-1 : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke-2 : memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- Ke-3 : menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- Ke-4 : membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Namun terhadap kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan penderita sakit mental, Johannes Andenaes menyatakan bahwa terhadap mereka tidak dapat dijadikan objek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*).<sup>30</sup>

Dalam kaitan dengan putusan yang bersifat kelembagaan, dapat diperhatikan prinsip-prinsip Internasional, seperti :<sup>31</sup>

1. Dalam Resolusi PBB 40/33 tentang The Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*), antara lain tertuang dalam :

Pasal 17.1 :

Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang (termasuk hakim) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan tidak hanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusan tindak pidana (*The circumstances and gravity of the offences*), tetapi juga dengan keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) dan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);

<sup>29</sup> Muladi, op.cit., hal. 61.

<sup>30</sup> Muladi, op.cit., hal. 83.

<sup>31</sup> Barda Nawawi arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, op.cit., hal. 164-166

- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak (*restrictions on the personal liberty of the juvenile*) hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi (*deprivation of personal liberty*) jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

**Rule 17.4 :**

"Pejabat yang berwenang (maksudnya hakim) mempunyai kekuasaan untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan".

2. Di dalam Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, antara lain dinyatakan :
  - 1.1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*Imprisonment should be used as last resort*);
  - 1.2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional (*Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases*).

Dari prinsip-prinsip internasional di atas, secara umum dikatakan bahwa penggunaan sarana custodial bagi anak hanya dapat diberikan atas pertimbangan yang sangat hati-hati, terhadap tindak pidana yang luar biasa/eksepsional, dalam jangka seminimal mungkin, dan harus sebagai upaya terakhir setelah dirasakan tidak ada sanksi lain yang lebih tepat. Jelaslah bahwa penggunaan pidana kelembagaan harus bersifat selektif dan alternatif.

Memang penggunaan pidana penjara sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang ada (termasuk terhadap anak delinkuen), selalu menjadi sorotan ahli penologi, karena disadari bahwa banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penerapan pidana tersebut terlebih bagi seorang anak yang belum matang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Yang paling utama dipersoalkan adalah mengenai efektivitas dan sisi negatif yang

ditimbulkan akibat penjatuan pidana tersebut.<sup>32</sup> Dalam segi efektivitas, R.M. Jackson mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Jackson mengungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan atau penghukuman kembali (*Reconviction Rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan lebih lanjut bahwa pelaku pemula (*First Offender*), *reconviction rate* untuk anak-anak sekitar 50%, untuk para remaja sekitar 40%, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30%, dan untuk kelompok di atas 40% sekitar 9- 15%. Data *reconviction rate* tersebut menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya si pelaku pernah dipidana. Untuk anak-anak yang telah dua kali dijatuhi pidana penjara, *reconviction rate*-nya adalah 100%.<sup>33</sup>

Angka perbandingan residivisme dengan usia si pelaku dikemukakan oleh Leslie T Wilkins, yang disusunnya kembali dengan bersumber pada *The Sentence of the Court*, yaitu suatu laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The Home Office Research Unit* di Inggris, bahwa angka perbandingan residivisme untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8-16 tahun sekitar 65%, antara 17-29 tahun sekitar 55%, dan untuk kelompok 30 tahun ke atas sekitar 28%.<sup>34</sup>

Dari sudut sisi negatif, bahwa pidana penjara dapat menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat, prisonisasi sebagai pengaruh subkultur narapidana dalam penjara, tempat

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal. 9.

<sup>33</sup> Ibid, hal. 189.

<sup>34</sup> Ibid.

pencemaran dimana penjahat kebetulan atau pendatang baru dirusak melalui pergaulan, dan menimbulkan stigma atau cap jahat.<sup>35</sup> L.H.C. Hulsman-pun mengatakan bahwa:<sup>36</sup>

“... peraturan dalam penjara membuat hubungan-hubungan menjadi pasif-agresif dan dikuasai-menguasai; hampir tidak ada tempat untuk inisiatif dan pertimbangan; ditumbuhkan pandangan rendah terhadap manusia, menjadikannya dungu ... kebutuhan seks tidak dapat disalurkan lain daripada dengan fantasi dan alat buatan, masturbasi, atau homoseksual, menambah isolasi batin. Iklim paksaan menyeluruh mematikan rasa percaya diri, menghapuskan relasi yang sungguh antar orang, melumpuhkan pertumbuhan sikap dan kelakuan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk hari pembebasan kelak. Di dalam penjara, manusia di-depersonalisasi-kan dan di-desosialisasi-kan”.  
Dari apa yang telah diuraikan di atas, wajarlah apabila kebijakan-kebijakan pembatasan

penggunaan penjara selalu menjadi perhatian. Bahkan ada kemungkinan untuk menghapuskan pidana tersebut, seperti yang diungkapkan oleh J.E. Hall Williams:<sup>37</sup>

“as we have seen, the idea that the best way to reform prison would be to abolish it altogether is not entirely new. Bernard Shaw's view was that it passes the wit of man to contrive a prison which shall not be gravely injurious to the mind of the vast majority of prisoner, if not also their bodies. He wants to say: so far as can be seen at present, the most and hopeful of prison reform is to keep people out of prison altogether.”

Jadi menurut Bernard Shaw, sebagaimana yang dikutip oleh J.E. Hall Williams, adalah lebih praktis tidak memenjarakan orang. Secara kelembagaupun, gerakan penghapusan pidana penjara dipelopori oleh ICOPA (*International Conference On Prison Abolition*), yang melihat pidana sebagai hal yang jahat. Menurut mereka, pidana adalah jahat, oleh karena itu untuk menanggulangi kejahatan tidaklah layak dengan menggunakan suatu pidana, karena pidana sendiri adalah jahat. Alasan lain yang dikemukakan kaum Abolisionist mengenai penolakan

<sup>35</sup> Muladi, op.cit., hal. 141-143.

<sup>36</sup> L.H.C. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, Jilid 1, Terjemahan Wonosusanto, Forum Studi Hukum Pidana Surakarta, 1983, hal. 42.

<sup>37</sup> J.E. Hall Williams, *Changing Prison*, Peter Owen, London, 1975, p. 70.

pidana penjara itu dihubungkan dengan suatu paham yang ada dalam suatu ilmu pengetahuan yaitu Determinisme.<sup>38</sup> Menurut paham ini, manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kebebasan kehendak (*free will*) untuk bertindak, karena setiap individu selalu dipengaruhi baik faktor yang ada dalam dirinya maupun oleh faktor yang ada di lingkungannya. Dengan kata lain, semua tindakan manusia ditentukan oleh hubungan kausal. Oleh karena itu setiap individu tidak mempunyai kebebasan bertindak, maka tidak layak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang tersebut apabila ia melakukan tindak pidana.

Dalam pemahaman Sosiologi Hukum, Emile Durkheim peletak dasar Sosiologi Hukum di Eropa – dengan teorinya yang membedakan berbagai jenis hukuman dalam klasifikasi ‘kesetiakawanan mekanis’ yang diiringi dengan sanksi yang bersifat mengekang (represif) dengan ‘kesetiakawanan organis’ yang diiringi dengan sanksi yang bersifat pemulihan (restitutif) – berpendapat bahwa makin kuno suatu masyarakat, makin represif atau mengekang, makin keras dan dasyat sanksinya; semakin tinggi tingkat perkembangan suatu masyarakat, semakin ringan hukumannya sehingga pengekangan hampir sama sekali diganti dengan pemulihan. Sanksi yang sifatnya memulihkan semata-mata terdiri dari pemulihan benda-benda seperti sediakala, hubungan yang terganggu dipulihkan ke dalam keadaan yang normal, baik dengan jalan menarik kembali perbuatan pelanggaran serta mengembalikannya kepada tipe yang darinya perbuatan itu menyimpang ataupun dengan membatalkannya, yakni menghapuskan segala nilai sosialnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1992, hal. 49.

<sup>39</sup> Emile Durkheim dalam George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1988, hal. 95-96.

Dalam hukum positif Indonesia, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis pidana atau tindakan (*strafsoort*) bagi anak nakal, yaitu Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hal tersebut juga diatur (Pasal 22, 23 dan 24), yang menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menganut "*Double Track System*".

Putusan yang diberikan terhadap anak nakal haruslah rasional. Namun diakui oleh Gregorius Aryadi<sup>40</sup>, bahwa tidak mudah memberikan dasar pertimbangan dan putusan hakim yang dianggap rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum/hakim yang lebih tinggi, serta masyarakat.<sup>41</sup> Namun disayangkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini tidak diatur "Pedoman" mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, khususnya pidana penjara. Padahal menurut Barda Nawawi Arief, prinsip-prinsip penjatuhan pidana inilah yang paling penting dikemukakan dalam ketentuan tentang peradilan, karena masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional.<sup>42</sup> Sementara dalam Rancangan KUHP Nasional, pedoman pemidanaan ini telah diisyaratkan.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995, hal. 69.

<sup>41</sup> Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim tidak saja bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab pada Tuhan YME.  
Bismar Siregar, *op.cit.*, hal. 35.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, *op.cit.*, hal. 12.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 52 RKUHP Nasional 1991/1992 yang Disempurnakan tanggal 13 Maret, bahwa hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain : motif, sikap batin, dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya, serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.

Atas dasar kebebasan pemilihan sanksi pula didapatkan kenyataan bahwa yang dominan diberikan pada anak nakal, adalah pidana perampasan kemerdekaan. Sementara diketahui banyaknya sisi negatif yang ditimbulkan oleh penjatuhan pidana tersebut, dan bagi anak justru akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, sudah harus lebih dipikirkan pendayagunaan jenis hukuman lain yang bukan kelembagaan (institusional), termasuk tindakan untuk dikembalikan kepada negara (Anak Negara). Pendayagunaan tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh sebagai alternatif dirasakan cukup mengena, seperti yang diungkapkan oleh B. Simandjuntak bahwa *kinderstrafrecht* didasarkan atas suatu tujuan tertentu yang pantas, wajar, dan humanistik. Apabila dirasakan tidak perlu ada hukuman dan orangtua masih sanggup mengasuhnya, si anak dikembalikan pada orang tua (wali atau orang tua asuh, pen), juga dalam perkara penting sekalipun.<sup>44</sup> Ungkapan tersebut dapat dipermaklumi dan ditindaklanjuti, karena menurut Zakiah Daradjat bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama.<sup>45</sup> Dalam keluargalah seorang anak dididik terhadap penumbuhan dan pengembangan iman dan takwa (rasa keagamaan), pembinaan akhlak, pembentukan kepribadian dan sikap, serta pengembangan bakat anak. Hanya saja, lebih lanjut diungkapkan Zakiah, jika menginginkan pembentukan anak yang diridhai Allah SWT, yang bertakwa, berilmu, terampil, berakhlak mulia, sehat tubuh dan mental, maka diperlukan orang tua yang mampu melaksanakan fungsi pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua harus kuat imannya, taat beragama, baik akhlaknya, dan sehat mentalnya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 176.

<sup>45</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental Dalam Keluarga*, Pustaka Antara, Jakarta, 1993, hal. 56.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 55.



Apabila dilihat dari sudut politik kriminal, menurut Barda<sup>47</sup> bahwa masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (termasuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak, pen). Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Oleh karena itu, wajarlah apabila kongres PBB ke-6 Tahun 1980 tentang Prevention of Crime and Treatment of Offenders sangat memperhatikan masalah ini.<sup>48</sup> Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberi kesempatan untuk timbulnya kejahatan, juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 Tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen Kongres mengenai "Crime Prevention on the Context of Development" (Dokumen A/CONF.121/L.9) bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "Strategi pencegahan yang mendasar" (*The basic crime prevention strategies*).<sup>49</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis. Pendekatan yuridis karena ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : asas, konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah hukum; sementara pendekatan sosiologis karena penelitian

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 10.

<sup>48</sup> Lihat Sixth UN Congress, Report, 1981, hal. 5.

<sup>49</sup> Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 12.

ini ditujukan pada penerapan ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek., yaitu terhadap bekerjanya aparat-aparat hukum yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, karena bermaksud mengungkap pemahaman terhadap realitas sosial dan tingkah laku aparat yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana yang diberlakukan bagi anak, dan diutamakan terhadap aparat pemberi putusan (hakim). Untuk mengungkap realitas sosial dan tingkah laku dari aparat yang dimaksud, menurut Sanapiah Faisal dapat melalui proses penghayatan terhadap sistem makna yang terstruktur dalam "dunia psikis, sosial, dan budaya" aparat yang bersangkutan, dalam hal penghayatan makna itulah yang mewarnai pilihan sikap dan tingkah laku.<sup>50</sup> Pemilihan metode ini karena beberapa pertimbangan-pertimbangan : *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>51</sup>

Penelitian ini dilengkapi dengan metode yuridis-komparatif, yaitu berkaitan dengan pidana kelembagaan/institusional yang diperbandingkan dengan tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; disamping juga berusaha untuk

---

<sup>50</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh Malang (Y A 3 Malang), Malang, 1990, hal. 2.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal. 5.

diperbandingkan dengan hukum pidana (dalam kaitan dengan SPP) tentang anak yang berlaku di negara lain.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, sebab ingin menggambarkan identifikasi terhadap faktor penyebab terhambatnya fungsionalisasi Lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, terutama ditujukan pada hakim anak sebagai pemberi putusan. Caranya yaitu dengan mengadakan eksplorasi/penggalian dari objek penelitian, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari permasalahan yang ada. Kemudian, dilakukan analisis untuk memberikan alternatif pemecahan, dan mencari sarana kondisional yang dapat menumbuhkan potensi lembaga tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kotamadia Palembang, dengan asumsi bahwa diduga tingkat kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku, cukup tinggi; sementara lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh sebagai reaksi kenakalan anak jarang digunakan.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada data primer dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sementara data sekunder bersifat pelengkap.
- b. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan langsung dari aparat yang berhubungan dengan Peradilan Anak, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum yang pernah menangani kasus anak. Sementara

UPT-PUSTAKA-UNDIP

sumber sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer : himpunan perundang-undangan dan dokumen internasional yang berhubungan dengan perlindungan anak bermasalah; dan bahan sekunder yaitu : hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan data arsip dari instansi yang terkait.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Metode wawancara dilakukan secara "*Open-ended interviewing*" dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah, yang diharapkan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Namun disamping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan (*library research*).

## 6. Sampel dan Teknik Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu terhadap aparat yang pernah menangani kasus anak, dengan asumsi bahwa responden dianggap memahami permasalahan yang ada, yaitu :

- 2 orang Penyidik Anak
- 2 orang Jaksa Anak
- 2 orang Hakim Anak
- 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan
- 2 orang Penasihat Hukum.

sumber sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer : himpunan perundang-undangan dan dokumen internasional yang berhubungan dengan perlindungan anak bermasalah; dan bahan sekunder yaitu : hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan data arsip dari instansi yang terkait.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Metode wawancara dilakukan secara "*Open-ended interviewing*" dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah, yang diharapkan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Namun disamping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan (*library research*).

## 6. Sampel dan Teknik Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu terhadap aparat yang pernah menangani kasus anak, yang dianggap memahami permasalahan yang ada, yaitu :
  - 2 orang Penyidik Anak
  - 2 orang Jaksa Anak
  - 3 orang Hakim Anak
  - 2 orang Pembimbing Kemasyarakatan
  - 2 orang Penasihat Hukum.

## **7. Analisis Data**

Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian deskriptif, diagnostik, dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan realitas apa dibalik kebijakan aplikatif terhadap perlindungan anak nakal.

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis-empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif.

Penyajian analisis data empiris, digunakan untuk mengkaji realitas perilaku aparat sebagai instrumen perlindungan terhadap anak yang mengalami hambatan kenakalan. Dengan analisis yang dilakukan, dapat menunjukkan seberapa jauh peran SPP dapat menunjang upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami hambatan kelakuan, atas dasar filosofis demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Sementara penyajian analisis yuridis-normatif, bertolak dari peraturan perundangan hukum positif dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perlindungan anak, khususnya anak yang dihadapkan pada sarana penal.

## **8. Sistematika Penulisan**

Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang perlunya fungsionalisasi Lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, karena bagi anak yang terpaksa dihadapkan pada sistem yang menggunakan sarana penal sebagai reaksi perbuatan menyimpang yang dilakukannya, akan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh besar bagi perkembangan jiwa, fisik, dan sosialnya. Mengingat pembahasan terhadap permasalahan anak sedemikian kompleks, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang

berkenaan dengan faktor penyebab terhambatnya fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan bagaimana alternatif pemecahannya. Selain itu akan dicari sarana-sarana kondisional yang dapat menumbuhkan potensi fungsionalisasi lembaga tersebut.

Pada Bab II akan dibahas tinjauan pustaka mengenai anak dan permasalahannya , yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum sebagai kerangka menghantarkan pada pemahaman yang lebih konkrit dalam Bab III.

Bab III sebagai bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, terurai dalam 4 sub bab, yang pada pokoknya membahas tentang : (1) data-data frekuensi tindak pidana dalam wilayah hukum Palembang, statistik tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan statistik putusan-putusan yang diberikan; (2) identifikasi faktor penyebab terhambatnya fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (3) kondisi-kondisi disfungsi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; dan (4) upaya penumbuhan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Akhirnya, Bab IV sebagai Bab Penutup, berusaha untuk menyimpulkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan, dan memberikan beberapa masukan/saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN ANAK

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra atau pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut anak. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.<sup>2</sup>

Kalau kita kaji hal tersebut di atas, jelas bahwa bagi mereka yang mempunyai citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang juga meliputi kegiatan perlindungan anak. Karena, pengertian manusia yang tidak tepat akan menimbulkan suatu hambatan dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Shanti Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal.15 berpendapat bahwa " ... alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut : yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat."



mengembangkan keadilan dan kesejahteraan pada umumnya, dan kegiatan perlindungan anak pada khususnya.

Pengertian anak menurut Paulus Hadisuprpto, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Disamping itu, ada pula yang menggunakan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan batasan terhadap anak ini.<sup>3</sup>

Dalam kaitan dengan batasan atau tingkatan usia, pengaturan tentang anak dapat dilihat pada :

**1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :**

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak (sebagai subjek), tetapi pembatasan usia anak (sebagai objek) dapat dijumpai antara lain pada:

■ **Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :**

**Pasal 45 :**

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu”

**Pasal 72**

“(1). Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang di bawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka

<sup>3</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7.

selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

(2). Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga”

■ **Pasal 283** yang memberi batasan usia 17 tahun, yaitu :

“(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

(2). Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.

(3). Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), gambar, atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan di hadapan seseorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan”

2). **UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ,**

Pasal 1.1. menyatakan bahwa : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3). KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981),

yang tidak secara eksplisit diatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4). Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( BW),

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis* Pasal 419).

Pasal ini senada dengan Pasal 1.2 UU No. 4 Tahun 1979 (UU Kesejahteraan Anak).

5). SEMA Jaksa Agung No. SE-002/JA/4/1989,

meminta agar terhadap anak yang belum berusia 18 tahun diperlakukan tata tertib sidang anak.

6). PP No. 2 Tahun 1988,

tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

7). UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

yaitu pada Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

8). Batasan Anak yang berlaku di negara-negara lain ;

1. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan antara 8- 16 tahun.

2. Inggris, ditentukan batasan antara 12-16 tahun.
3. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
4. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun.
5. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
6. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 tahun.
7. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.
8. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 tahun.
9. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.
10. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.
11. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.
12. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>4</sup>

**8). Dalam Dokumen Internasional :**

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun, dan batasan atas antara 16-18 tahun.
2. Resolusi PBB, Resolusi 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*Beijing Rules*) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (Commentary Rule 2.2) ; dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (Rule 119 (a)).

Dalam kaitan penentuan batasan anak dari aspek psikososial, seperti diungkapkan oleh Singgih Gunarso (1989) dalam makalahnya yang berjudul "Perubahan Sosial Dalam

---

<sup>4</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.10-11.

Masyarakat", yang disampaikan dalam Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan" di Jakarta, mengemukakan klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, terbagi menjadi 5, yaitu: (a) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun ; (b) remaja dini, seseorang yang berusia 12-15 tahun ; (c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun ; (d) dewasa muda, seseorang yang berusia 17-21 tahun ; dan (e) dewasa, seseorang yang berusia diatas 21 tahun. Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Menurut J. Pikunas dan R.J. Havighurts seperti yang dikutip Singgih Gunarso, bahwa remaja dini (usia 12-15 tahun) memiliki kecenderungan kejiwaan antara lain : (a) sibuk menguasai tubuhnya, karena ketidakseimbangan postur tubuhnya, kekurangnyamanan tubuhnya ; (b) mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum sepenuhnya discerahi tanggung jawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya ; (c) kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk untuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lawan jenis ; (d) minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan untuk *'trial and error'* tinggi dan kemauan untuk belajar dari pengalamanpun tinggi ; (e) mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, dan klub-klub olahraga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya. Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri yang melekat padanya ialah : (a) sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya ; (b) mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya ; (c) mulai lebih mampu bergaul ; (d) sudah menemukan identitas dirinya ; (e) mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan

kemasyarakatan ; dan (f) mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap kekanak-kanakkan.<sup>5</sup>

## B. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK

### 1. Pengertian Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Dikalangan para ahli di Indonesia, tidak ada pendapat yang seragam mengenai istilah "**Juvenile Delinquency**".<sup>6</sup> Ada yang menyebutnya sebagai Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, Kenakalan Pemuda, Delinkuensi Anak, atau Tuna Sosial.

Istilah "*Juvenile*" sendiri berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*" artinya : anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada usia muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sementara istilah "*Delinquent*" berasal dari kata latin "*Delinquere*" yang berarti : terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Singgih Gunarso, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam Seminar "Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan", Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 9.

<sup>6</sup> Ruth Strong, *Fakta-fakta Tentang Kejahatan Anak-Anak Nakal*, Yayasan Jakarta, Jakarta, 1972, hal.3 menyatakan :

" - Di kalangan kepolisian, khususnya pihak Biro Anak-anak telah menggunakan istilah 'Anak Tuna Laras' ; sedangkan pihak Departemen Sosial menggunakan istilah 'Anak Tuna Sosial', yang pada hakikatnya mempunyai arti yang sama.  
- Pada masyarakat Indonesia pada umumnya, nampaknya telah sepakat untuk menerjemahkan istilah '*Juvenile Delinquency*' dengan 'Kenakalan Anak', dan menghindarkan penggunaan istilah 'Kejahatan Anak'. Dalam hal ini, Lembaga Penyelidikan Pendidikan FKIP UNPAD, atas dasar pertimbangan yang sama telah menggunakan istilah 'Anak Nakal', bukan 'Anak Jahat' (Buletin Research Th. 1 No. 2)."

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *op.cit.*, hal.7.

Dalam istilah bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat tentang istilah "*Juvenile Delinquency*" ataupun belum ada suatu ketetapan Pemerintah mengenai hal ini, para ahli lebih cenderung menggunakan istilah "Kenakalan Anak" daripada istilah "Kejahatan Anak".

Apa yang dimaksud tentang Kenakalan Anak-anak, dapat dilihat pada perumusan yang berikut :

- a. Paul W. Tappan, yang memberikan pengertian "*Juvenile Delinquency*" sebagai berikut :<sup>8</sup>

"The Juvenile Delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct or situation which might be brought before a court and adjudicated".

(Terjemahan bebas : Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang anak yang diputuskan demikian oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Perilaku yang menyimpang adalah setiap perbuatan, situasi yang mungkin dibawa ke pengadilan untuk diperiksa.)

- b. Maud A. Merrill, dalam bukunya "*Problem of Child Delinquency*" (Hoston, 1947), seperti yang dikutip oleh Dr. Gerungan, merumuskan :<sup>9</sup>

"A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action"

(Terjemahan bebas : seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).

<sup>8</sup> Paul W. Tappan, *Juvenile Delinquency*, Mc Graw Hill Book Coy Inc, New York - Toronto - London, 1949, hal.23.

<sup>9</sup> Maud A. Merrill dalam Dr. Gerungan, *Psychologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1966, hal.199.

- c. Fuad Hasan, yang mengartikan delinkuensi sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak kejahatan.<sup>10</sup>
- d. B. Simandjuntak yang memberi batasan :
  - 1. *Juvenile Delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak (para *juvenile delinquents*).
  - 2. *Juvenile Delinquent* itu adalah offenders yang terdiri dari "anak" (berumur di bawah 21 tahun - pubertas) yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*Juvenile Court*).<sup>11</sup>
- e. Dari Beberapa Seminar Internasional, yang melahirkan beberapa perumusan sebagai berikut :<sup>12</sup>
  - 1. Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953, merumuskan : "Semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan "*delinquency*" ; jadi semua tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana seperti : mencuri, menganiaya, dan sebagainya" ;
  - 2. Seminar "European Social Welfare" di Paris 1949, merumuskan : "Semua perbuatan yang merupakan penyelewengan dari norma kelompok atau masyarakat tertentu yang

---

<sup>10</sup> Fuad Hasan, dalam B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hal.46.

<sup>11</sup> Ibid, hal.47.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.21.



menimbulkan keonaran dalam masyarakat itu, misalnya : memakai celana jengki, berdansa rock'n-roll, bolos dari sekolah dalam daerah-daerah tertentu” ;

3. “Middle East Seminar”, di Cairo tahun 1953 merumuskan : “Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi si anak termasuk bergelandangan, mengemis karena terlantar, dan sebagainya” ;

- f. Team Proyek “*Juvenile Delinquency*” FH Universitas Padjadjaran merumuskan:

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.

Jadi yang menjadi unsur-unsur delinquency itu adalah :

1. adanya suatu tindakan/perbuatan ;
2. tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum ;
3. dan dirasakan serta ditafsirkan masyarakat dengan perbuatan yang tercela.<sup>13</sup>

- g. UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) dalam Pasal 1 ayat 2 merumuskan sebagai berikut :

“Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan”.

Dari perumusan pasal di atas, yang menjadi lingkup dalam penelitian ini adalah anak nakal yang melakukan tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 sub a di atas.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.22-23.

## 2. Latar Belakang Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang pengertian kenakalan anak/tindak pidana seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, perlu kiranya dikemukakan tentang sebab-sebab mengapa seseorang anak itu melakukan kenakalan. Dengan perkataan lain, perlu diketahui faktor-faktor yang mendorong, atau dapat juga dikatakan latar belakang dari perbuatan yang dilakukan si anak. Secara teknis, seperti yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita bahwa latar belakang kenakalan anak terkait pada faktor kriminogen dari seorang anak, atau secara tegas mengenai motivasinya. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah "motivasi", dapat kita lihat pengertian yang diberikan Oxford Dictionary. Bahwa motivasi berasal dari kata "motiv" yang berarti : kecenderungan adanya inisiatif untuk bergerak. Motivasi sering diartikan dengan hal-hal yang menyebabkan atau mendorong individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu. Dalam arti yuridis, motivasi diartikan : "... latar belakang seseorang untuk berbuat sesuatu".<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia-pun pembatasan motivasi adalah : (1) dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ; (2) usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>15</sup>

Dari perumusan motivasi tersebut diatas, dapat dipetik adanya suatu kesamaan pendapat atau pengertian, bahwa suatu perbuatan tidaklah dapat dipisahkan dari sebab-

---

<sup>14</sup> Ibid, hal.44.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

sebabnya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perbuatan itu sendiri.

Pembahasan mengenai masalah motivasi tersebut, secara teoritis mengandung manfaat, tujuan, dan fungsi seperti yang diungkapkan dalam laporan hasil Team Proyek "*Juvenile Delinquency*" Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat UNPAD pada medio Desember 1967, sebagai berikut :

- motivasi itu mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dimana motivasi mempunyai peranan sebagai tenaga penggerak atau motor yang memberikan daya energi dalam mewujudkan suatu perbuatan ;
- motivasi menentukan arah tujuan perhubungan yaitu untuk merealisasikan tujuan atau cita-citanya. Motivasi ini merupakan perbuatan yang meniadakan penyelewengan dan meluruskan perbuatan yang keliru. Dalam hal ini motivasi yang dimaksud adalah motivasi yang positif , penjelasan tujuan yang ditempuh berarti makin memperjelas jalan itu sendiri ;
- motivasi itu sebenarnya mengadakan koreksi terhadap perbuatan yang akan kita lakukan sendiri, artinya memilih mana perbuatan yang dibenarkan dan manakah perbuatan yang harus dihindarkan.

Dengan demikian, didalam pengertian motivasi terkandung suatu niat, hasrat, tekad, dorongan kebutuhan, cita-cita, yang kemudian dimanifestasikan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan.

Motivasi, mempunyai 2 bentuk yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi yang pertama adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif perbuatan yang dilakukan. Motivasi ini terbagi menjadi faktor intellegentia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sementara motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar anak itu sendiri, artinya dalam mengejar nilai-nilai tersebut terdorong oleh faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor

yang termasuk dari motivasi ini adalah : faktor rumah tangga (keluarga) , pendidikan dari sekolah, pengawasan anak, dan faktor mass media. Yang paling banyak ditunjukkan dengan lahirnya suatu perbuatan ialah motivasi ekstrinsik itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari motif perbuatan, kita harus lebih banyak mengarahkan perhatian kepada pengaruh dari luar, dengan catatan motivasi intrinsik tidak terlepas dari motivasi ekstrinsik, sehingga satu sama lainnya saling isi mengisi.<sup>16</sup>

Dalam mengungkapkan motivasi seseorang anak yang melakukan kenakalan anak-anak, haruslah diusahakan untuk terlebih dahulu mengenal pribadi si anak atau lebih luas lagi harus berusaha mengenal dunia anak itu sendiri. Dengan mengenal dunia anak akan lebih mempermudah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Dan usaha lebih jauh lagi berarti akan mengenal perbuatan si anak sehingga kita mengerti perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu sendiri.

Untuk menetapkan sebab-musabab kenakalan anak-anak (etiologi) adalah tidak mudah, karena banyak faktor yang harus diperhitungkan, misalnya : faktor pribadi, pengaruh sosial, atau pengaruh lainnya seperti riwayat hidup si anak sejak kecil. Faktor keluarga sangatlah penting, karena merupakan lingkungan yang pertama (lingkungan primer) bagi si anak. Dalam mencari sebab kenakalan anak tersebut, bukanlah sebab-sebab yang tunggal atau unilateral. Sebab-sebabnya beraneka warna serta satu sama lainnya saling berkaitan, ada yang berpengaruh secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Sering pula sukar membedakan sebab-sebab dan akibat dari perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, B. Simandjuntak mengatakan bahwa dewasa ini penelitian etiologi *delinquency* telah ditinggalkan ; karena tidaklah mungkin menentukan

---

<sup>16</sup> Romli atmasasmita, op.cit., hal.45

sejumlah faktor-faktor yang dapat menerangkan semua kasus kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Yang dicari sekarang adalah mengapa dalam kelompok-kelompok orang yang berbeda atau dalam lingkungan yang berbeda-beda dengan kondisi-kondisi yang berbeda terdapat lebih banyak atau kurangnya anak yang menjadi nakal. Jadi yang dicari bukanlah mengapa si anak melakukan kenakalan. Hanya ada kemungkinan suatu faktor tertentu membawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil menyebabkan orang tertentu menjadi *Juvenile Delinquency*. Pendapat yang demikian meninggalkan pendapat "*the sufficient and necessary cause*" dan diganti dengan pendapat "*necessary but not sufficient*" sebagai sebab dari kenakalan anak. *The sufficient and necessary cause* senada dengan pendapat John Stuart Mill yang menyatakan bahwa ada satu-satunya faktor yang selalu merupakan faktor sebab kenakalan anak, tanpa memerlukan faktor-faktor lain. Pendapat Stuart Mill ini ditolak oleh Manheim yang menyatakan bahwa yang ada hanyalah faktor-faktor yang selalu merupakan sebab kenakalan anak bersama-sama dengan faktor lain. Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencari sebab-sebab kenakalan anak hendaknya digunakan pendekatan "*multiple factor*", dan bukan dengan pendekatan "*General Theory*". Pendekatan multiple factor ini dipakai Sheldon Glueck bersama istrinya Elianor Glueck dalam penelitian *Juvenile Delinquency*, sedangkan pendekatan *General Theory* digunakan Shutherland dengan teori *Differential Association*-nya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> B. Simandjuntak, op.cit., hal.56.

Dalam kaitan dengan pendekatan yang berbentuk multiple factor ini - yang sebenarnya menurut ilmu kriminologi adalah pendekatan yang digunakan dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan (etiologi kriminal)- Simandjuntak lebih lanjut menyatakan bahwa <sup>18</sup>

“... tak ada sesuatu yang pasti selalu menghasilkan crime, baik abnormalitas fisik maupun penyakit jiwa, mental retardation, kurangnya kesehatan dan sebagainya. Kejahatan akan terjadi jika ada kombinasi antara faktor-faktor kepribadian dan faktor-faktor sosial serta struktur fisik tertentu. Dan pula faktor-faktor itu sendiri dalam satu hal menimbulkan crime tetapi dalam hal lainnya tidak, karena situasi-situasi itu tidak pernah sama betul. Crime adalah buah dari semua elemen didalam sesuatu situasi tertentu. Soalnya situasi-situasi sosial tidak ada yang sama dan terjadi berulang kali”.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito membahas sebab-sebab *Juvenile Delinquency* menjadi 3 kelompok, yaitu : (1) Faktor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan sekelilingnya ; (2) Faktor-faktor struktural ; (3) Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan tindakan kenakalan anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan *Juvenile Delinquency* yang berhubungan dengan pribadi atau keadaan sekeliling anak adalah : (a) Rumah tangga/keluarga yang retak (*broken homes*) ; (b) Ditelantarkan oleh orang tua (material, kasih sayang, acuh tak acuh) ; (c) Kekurangan-kekurangan psikologis ; (d) Pergaulan/teman yang tidak baik.

Sebab-sebab (causa) struktural terdapat pada : (a) Sistem ekonomi dan pendidikan serta struktur untuk memperolehnya di suatu negara ; (b) Dalam proses perubahan sosial sebagai akibat kemajuan industri, urbanisasi, dan teknik. Untuk mengurangi sebab-sebab ini lebih sukar karena berhubungan dengan *vested interest* struktur yang ada, contohnya : perubahan sistem keluarga sesudah perang ; fenomena ibu yang bekerja atau yang tidak bekerja tetapi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ; keadaan perumahan ; kesempatan

---

<sup>18</sup> Ibid, hal.57.

pendidikan ; perlombaan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ; kepadatan penduduk di kota-kota besar ; media komunikasi massa ; perkembangan ekonomi dan kenaikan harga-harga dan sebagainya. Sebab-sebab tersebut hanya dapat dikurangi atau ditanggulangi pada level perencanaan sosial dan kebijaksanaan sosial.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan perlakuan/tindakan terhadap anak nakal adalah : (1) Pilihan undang-undang/peraturan. Benar bahwa peraturan harus dibuat sebelum kejahatan/pelanggaran timbul, akan tetapi adakalanya lebih bijaksana apabila suatu perbuatan tidak diatur. Adalah tidak selalu bijaksana untuk mengadakan larangan terhadap dipekerjakannya tenaga anak yang berumur kurang dari 16 tahun dalam industri apabila penduduk negara tersebut demikian miskin sehingga anak-anak harus ikut membantu mencari nafkah ; (2) *Over acting* petugas kepolisian ; (3) Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau *institutional treatment*.<sup>19</sup>

Secara teoritik, banyak teori yang lazimnya dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah latar belakang timbulnya kenakalan anak, yang menurut Paulus Hadisuprpto - dengan menggunakan istilah delinkuensi anak terhadap kenakalan anak - lebih menekankan pada kelompok teori *Undercontrol (Consensus Theories)*.<sup>20</sup> Dalam mengkaji masalah perilaku delinkuen anak, teori ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa kita semua menyepakati isi serta berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan, oleh karena itu merupakan kewajaran apabila semua warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah kemasyarakatan itu.

---

<sup>19</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, op.cit., hal. 11-12.

<sup>20</sup> John Hagan dalam bukunya *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and Its Control*, mengklasifikasikan tiga kelompok besar, yakni : (a) Teori *Undercontrol* ; (b) Teori Kultur, Status, dan Kesempatan ; dan (c) Teori *Overcontrol*.  
John Hagan dalam Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal. 18.

Teori Undercontrol terbagi dalam : (a) Teori Disorganisasi Sosial ; (b) Teori Netralisasi; dan (c) Teori Kontrol, yang dibahas pada bagian berikut.

#### a. Teori Disorganisasi Sosial

Yang termasuk dalam teori ini adalah Teori Differential Association dari E. Sutherland dan berkembang setelah itu Teori Anomie dari Robert Merton.

##### Teori Differential Association

Teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang melandasi teori ini ialah : *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present* (Rose Giallombardo, 1972 : 89).

Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan – termasuk delinkuensi anak – mengajukan 9 proposisi, yaitu :

- (1). Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi ;
- (2). Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat ;
- (3). Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan itu terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan ;
- (4). Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi : (a) Teknik melakukan kejahatan ; (b) Motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap ;
- (5). Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan ;
- (6). Seseorang menjadi delinkuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan



daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi ;

- (7). *Differential Association* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensitasnya ;
- (8). Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya;
- (9). Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

### Teori Anomie

Istilah Anomie sebetulnya berasal dari seorang pakar Sosiolog Prancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep Anomie ini kemudian oleh Robert Merton direformasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan peng-adaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.

Teori Anomie dari Robert Merton ini mencoba melihat antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen. Tahapan-tahapan tersebut akan menimbulkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi "normal". Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial – yang melahirkan "means" – dan kultural – yang melahirkan "goals".

*Goals*, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup.

Sedangkan *Means* adalah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Selanjutnya, Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan peng-adaptasian yang dapat terjadi didalam setiap kelompok masyarakat berkaitan dengan *goals* dan *means*.. Berbagai kemungkinan tersebut dapat dilihat dalam inatriks berikut ini (Rose Giallombardo, 1972 : 97).

Bentuk Penyesuaian Diri	Tujuan Kebudayaan	Cara-cara Melembaga
Konformitas ( <i>Conformity</i> )	+	+
Inovasi ( <i>Innovation</i> )	+	-
Ritualisme ( <i>Ritualism</i> )	-	+
Penarikan Diri ( <i>Retreatism</i> )	-	-
Pemberontakan ( <i>Rebellion</i> )	±	±

Keterangan : (+) berarti menerima  
 (-) berarti menolak  
 (±) berarti menghendaki perombakan menyeluruh

Bentuk 2, 3, 4, dan 5 adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri yang “menyeleweng” dari norma-norma yang berlaku. Pada bentuk *conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan. *Innovation*, terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Menurut Merton, kecenderungan pengadaptasian itu banyak terjadi pada kejahatan-kejahatan bermotif ekonomi dan kejahatan

terhadap harta benda, contoh : pencurian. Bentuk adaptasi ini cenderung terjadi pada kelompok "lower - class". Sedangkan *Ritualism*, pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada kelompok "lower - middle class". *Retreatism*, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk alkoholik, dan penyalahgunaan narkozat. *Rebellion*, merupakan perjuangan yang terorganisasikan ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan menyeluruh.

#### b. Teori Netralisasi

Teori ini beranggapan bahwa aktivitas manusia dikendalikan oleh pikiran. Dengan demikian, pertanyaan dan yang dilontarkan teori ini adalah : "Pola pikiran yang bagaimanakah yang terdapat di dalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat?" Pertanyaan ini sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat suatu selalu dikendalikan oleh pikiran yang baik. Teori netralisasi juga beranggapan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang "hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat" dan "jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut".

Hal yang menarik dari teori ini ialah terletak pada cara menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga seseorang yang pada umumnya berpikiran baik sampai melakukan kejahatan atau berperilaku menyimpang. Menurut teori ini orang-orang tersebut berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai - yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat - menurut persepsi dan kepentingan mereka.

Sykes & Matza dalam artikel yang berjudul "*The Technique of Neutralization : Theory of Delinquency*" mengemukakan bahwa meskipun kebanyakan teori kejahatan beranggapan bahwa pelaku kejahatan atau delinkuensi, khususnya pelaku kejahatan dari kelas

bawah, mempunyai ciri-ciri berbeda dengan orang pada umumnya. Sykes dan Matza berpikir sebaliknya, yaitu bahwa justru kesamaan-kesamaan ciri antara pelaku kejahatan dan orang kebanyakan lebih banyak kecenderungannya daripada perbedaannya. Pendapat demikian didasarkan atas pengamatan mereka bahwa ternyata dikalangan pelaku kejahatan terdapat adanya rasa malu dan rasa bersalah manakala mereka baru saja melakukan perbuatan jahatnya. Menurut Sykes dan Matza, pelaku kejahatan itu merupakan : "orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya (*apologetic failure*) dan mengikuti arus gaya hidup para pelaku kejahatan lainnya, melalui suatu proses yang disebut "pembenaran kelakuan"". Pembeneran kelakuan ini oleh Sykes dan Matza disebut : "Teknik Netralisasi".

### c. Teori Kontrol

Teori kontrol atau sering juga disebut Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi "baik" atau "jahat". Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat juga membuatnya demikian.

Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkai timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, terutama para anak dan remaja, yaitu : Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat?, atau : Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?. Pertanyaan demikian mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah "Ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan". Dengan demikian menurut paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh atau taat pada

norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan perilaku penyimpangan tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku "tidak patuh norma". Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*Social Bound*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, manakala dimasyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal disini ialah sarana-sarana kontrol sosial non hukum positif, atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat.

Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi 4, yaitu : (a). *Attachment* ; (b) *Commitment* ; (c) *Involvement* ; (d) *Beliefs*. *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, berarti ia tak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang pada perbuatan penyimpangan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya meng-inventarisasikan segala hal termasuk waktu, tenaga, dirinya sendiri dalam suatu kegiatan masyarakat dengan maksud memperoleh reputasi di masyarakat. *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. *Beliefs*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota

DPT-POSTAL-UNDU

masyarakat. Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan (validitas) moral yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu. Pelaku penyimpangan umumnya mengetahui bahwa perbuatannya "salah" namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral) sehingga kendor ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.<sup>21</sup>

#### C. STRATEGI PENCEGAHAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI PENCEGAHAN KEJAHATAN

Strategi pencegahan kenakalan anak/tindak pidana anak tidak terlepas dari usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Maksudnya, dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak saja dilakukan dengan penggunaan sanksi pidana (penal), tetapi juga harus dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.

Usaha-usaha non-penal tersebut dapat meliputi bidang yang sangat luas disekur sektor kebijakan sosial atau pembangunan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ia memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Disarikan dari Paulus Hadisuprpto, *ibid*, hal. 17-34.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *op.cit.*, hal. 36.

Kedudukan yang sangat strategis tindakan-tindakan non-penal ini, dikarenakan ia menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB ke-enam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah "*Crime trends and crime prevention strategies*". Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi ini antara lain :<sup>23</sup>

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;  
(*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;  
(*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;  
(*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan, juga sangat mendapatkan perhatian pada Kongres PBB ke-tujuh tahun 1985. Ditegaskan di dalam Dokumen Kongres mengenai "*Crime prevention on the context to development*" (Dokumen A/CONF. 121/L. 9)

---

<sup>23</sup> Ibid.

bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan yang mendasar" (*the basic crime prevention strategies*).<sup>24</sup>

Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam Dokumen Kongres No. A/CONF. 144/L/17 tentang *Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development* antara lain dinyatakan :

- bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 ini diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah "*Urban Crime*"), antara lain :

- a. kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
- d. keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, op.cit., hal. 12.



- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media massa) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

#### 1. Alasan Perhatian Pada Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain

Menurut Arief Gosita, kita perlu mencurahkan perhatian yang lebih besar terhadap pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain (termasuk kenakalan anak - pen)<sup>25</sup> didasarkan pada alasan-alasan, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan refresif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha refresif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi;
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif, seperti : stigmatisasi (pemberian cap pada orang yang dihukum, dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban oleh suatu sistem struktur) tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu, sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial;
- c. Usaha pencegahan dapat juga mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan untuk bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang

<sup>25</sup> Kaiser memberi batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi : segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan-pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Kaiser dalam John Graham, *Crime Prevention Strategies in Europe and North America*, Helsinki, Finland, 1990, seperti yang dikutip Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 12.

<sup>26</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, op.cit., hal. 110-111.

diperlukan demi pelaksanaan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang.

## 2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain

Permasalahan dalam kejahatan sangatlah multi-kausal dan membutuhkan pengkajian dari tingkat dan sudut pandang yang berbeda-beda. Masalah yang berlipat ganda membutuhkan solusi yang berlipat ganda pula, oleh sebab itu program pencegahan itu sendiri seringkali terkait dalam berbagai sistem pemberian pelayanan yang berlipat ganda. Jadi, walaupun pencegahan kejahatan telah lama ditetapkan sebagai obyek utama dari Politik Kriminal, konseptualisasinya tetap masih dalam masa pertumbuhan (belum sempurna).

Dengan mempertimbangkan pemikiran di atas, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan, yaitu : (a) pendekatan sosial (*Social Crime Prevention*); (b) pendekatan situasional (*Situational Crime Prevention*); dan (c) pendekatan kemasyarakatan (*Community Based Crime Prevention*).<sup>27</sup>

### ad (a). Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Sosial

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, bekerja dengan melalui penetapan tentang bagaimana wujud dan perubahan yang ada dari struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi yang dapat mempromosikan kecenderungan ke arah pelanggaran (haluan).

<sup>27</sup> Mohamrnad Kernal Darmawan, op.cit., hal. 17.

dan dimana memungkinkan untuk merubah kecenderungan tersebut dengan membuat seminim mungkin atau bahkan mengurangi akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dampak negatif perubahan-perubahan dalam struktur sosio-ekonomi dan lembaga-lembaga sosialisasi seringkali mengena secara tidak sepadan pada bidang-bidang khusus dalam masyarakat. Pada umumnya hal tersebut paling sedikit dapat melindungi dan menyekat diri mereka sendiri dari perubahan-perubahan seperti para remaja, orang yang lemah, kaum imigran, orang miskin, pengangguran, tunawisma. Kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial cenderung untuk memusatkan perhatian pada kelompok-kelompok tersebut, karena kecenderungan mereka sebagai kelompok-kelompok yang memiliki risiko besar untuk melakukan pelanggaran (hukum).

Ada enam lingkup kebijaksanaan sosial yang menjadi perhatian kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, yaitu :<sup>28</sup>

- (1). Kebijakan dalam perencanaan daerah perkotaan dan pedesaan serta dalam kebijakan khusus dalam penataan daerah kumuh, pengaturan perumahan, masalah tunawisma, disain dan penempatan fasilitas umum, penempatan daerah pertokoan, antar hubungan antara pihak penyedia perumahan dengan pihak penyedia pelayanan lain, secara khusus pula masalah transportasi dan penempatan tenaga kerja.
- (2). Kebijakan tenaga kerja dan kebijakan khusus dalam kaitannya dengan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja.
- (3). Kebijakan dalam bidang pendidikan termasuk pula kebijakan yang berkaitan dengan masa pra sekolah.
- (4). Kebijakan dalam bidang keluarga.
- (5). Kebijakan bagi hal-hal yang menyangkut remaja, termasuk pula kebijakan dalam bidang rekreasi, penggunaan waktu luang dan kebudayaan.
- (6). Kebijakan dalam bidang kesehatan dan kebijakan khusus dalam bidang penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras.

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 33.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial adalah berbeda dengan kedua bentuk pencegahan kejahatan lainnya (situasional dan kemasyarakatan). Menurut Mohammad Kemal Darmawan, pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial memusatkan perhatiannya pada anak-anak/remaja, yang secara prinsip dianggap sebagai kelompok utama penerima sosialisasi. Sebagian besar pelanggar (hukum) dewasa mulai melakukan pelanggaran pada waktu usia muda. Dengan demikian pencegahan yang baik haruslah dimulai sejak dini untuk memperoleh hasil yang baik pula (pada waktu calon pelanggar masih anak-anak/remaja).<sup>29</sup>

Pemusatan perhatian terhadap anak-anak/remaja sebagai obyek dari pencegahan kejahatan yang dimaksud, menurut penulis mencakup 3 faktor pembahasan, yaitu menyangkut rumah tangga/keluarga, pendidikan formal/sekolah, dan faktor pergaulan anak. Ketiga faktor tersebut akan dibahas secara berurutan pada bagian berikut ini.

#### Faktor Rumah Tangga/Keluarga

Sejak seseorang dilahirkan, ia telah dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya (lingkungan keluarga). Baik atau tidaknya pengaruh tersebut akan menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku anak kelak dikemudian hari. Dengan kata lain, sikap dan tingkah laku seorang anak dalam pergaulannya dimasyarakat mencerminkan bagaimana kehidupan keluarga anak yang bersangkutan. Bahwa masalah pembentukan kepribadian anak erat kaitannya dengan konsep/pengertian yang dimiliki oleh kedua orang tuanya tentang makna hidup berkeluarga, terutama dalam hal pendidikan bagi si anak. Keluarga yang baik merupakan tempat pendidikan yang baik pula bagi si anak.

Mengingat betapa pentingnya peranan rumah tangga/keluarga dalam pembentukan kepribadian si anak, maka tingkah laku dan pergaulan serta harmonisasi atau kerukunan orang

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 34.

tua selalu menjadi perhatian dan teladan bagi si anak. Dalam kondisi demikian, si anak akan merasakan nilai-nilai "*parental love and affection*" dan "*parental advice and supervision*". Ikatan yang kuat antara orang tua dan anak pada kenyataannya membantu mengurangi kecenderungan/potensi anak untuk melakukan pelanggaran hukum/ penyimpangan/kenakalan.<sup>30</sup>

Yang patut dicermati dalam usaha pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial dimana fokus perhatiannya adalah anak-anak/remaja, yaitu kondisi "*broken homes*" yang dianggap sebagai salah satu faktor yang menimbulkan kenakalan anak. Sebab-sebab perpecahan keluarga (*broken homes*) tersebut adalah :

- dasar perkawinan yang tidak kuat.
- kematian (meninggalnya salah satu dari orang tua).
- adanya kelemahan-kelemahan orang tua, misal : dalam menghadapi rayuan mulut manis, lemah dalam menghadapi tekanan ekonomi, kurang berpendidikan atau salah satunya mempunyai derajat pendidikan yang terlalu jauh atau tidak seimbang.
- Faktor-faktor intern yang terdapat pada diri salah seorang atau kedua orang tua, misal : pemaarah, berpenyakit jiwa, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Penyelidikan mengenai relevansi *broken homes* terhadap pertumbuhan kenakalan anak ditunjukkan dalam penelitian Shideler (tahun 1910) dimana 23% dari seluruh anak-anak delinkuen di Amerika Serikat hidup dan berasal dari keadaan keluarga yang "*broken*". Juga

---

<sup>30</sup> Penelitian tentang hubungan antara penyimpangan dengan keterikatan pada orang tua (N = 1500, dengan distribusi frekuensi pada kategorisasi lemah sebanyak 880, dan kuat sebanyak 620), menunjukkan bahwa semakin terikat seorang anak dengan orang tuanya, semakin rendah kecenderungan anak terlibat perilaku penyimpangan.  
Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, op.cit., hal. 56.

<sup>31</sup> Ny. Pramono dalam Romli Aimasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, op.cit., hal. 56-57.

dalam studi Breckinridge dan Abbot terhadap 13.000 perkara anak delinkuen didapatkan data bahwa 34% diantaranya berasal dari "*broken homes*". Sedangkan *California Youth Authority* dalam penelitian selama 4 tahun ditemukan bahwa 62% dari anak-anak delinkuen berasal dari "*broken homes*".<sup>32</sup>

Di Indonesia, dalam hal hubungan antara perpecahan keluarga dengan timbulnya gejala kenakalan anak, ditunjukkan oleh penyelidikan yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (Sekarang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/IKIP) terhadap 920 anak delinkuen dan 670 anak non-delinkuen. Kurang lebih 51% dari anak delinkuen berasal dari keluarga *boken homes*, sementara yang non-delinkuen hanya 20% saja. Dilain pihak, hasil riset Biro Anak-Anak KOMDAK VII Jakarta Raya pada pertengahan tahun 1966, didapatkan data bahwa dari 151 perkara anak-anak delinkuen, 108 anak diantaranya berasal dari keluarga *broken homes* (71,52%, pen) dan 43 anak (28,48%, pen) diantaranya berasal dari keluarga yang disharmonis.<sup>33</sup>

Dari data-data di atas dapat dikatakan bahwa bentuk yang paling banyak dari *broken homes* di Indonesia adalah "*Psychologycally Broken Homes*".<sup>34</sup> Jadi sedikit banyak gejala ini sesuai dengan hasil-hasil penyelidikan yang telah dilakukan mengenai hal yang sama di negara-negara Barat, walaupun mungkin yang menjadi latar belakangnya berlainan.

<sup>32</sup> Romli Atrnasasmita, *ibid*, hal. 60.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 62.

<sup>34</sup> Barnes dan Teeters membedakan *broken homes* menjadi 2 type, yaitu : (1) *psychologycally broken homes* (disebut juga *dis-organized home*), dimana masih ditunjukkan adanya keluarga utuh, hanya saja dalam pembinaan rumah tangga sama sekali tidak ada kerukunan, selalu terjadi pertengkaran, dan sedikit sekali penghargaan yang diberikan pada pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut; (2) *physically broken homes*, adalah keluarga yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia, bercerai, atau meninggalkan keluarganya bertubung dengan suatu hal. H.E. Barnes dan N.K. Teeters, *New Horizon in Criminology*, 3-rd ed., tanpa penerbit dan tempat, 1960, dalam Romli Atrnasasmita, *ibid*, hal. 59.

### Faktor Pendidikan Formal/Sekolah

Beccaria, kriminolog abad 18, mengatakan bahwa : “metode yang paling efektif bagi pencegahan kejahatan adalah sistem yang sempurna dari pendidikan”. Clarence Darrow-pun mengatakan : “Jika ada suatu kemajuan yang permanen pada manusia dan ketertiban sosial yang lebih baik, hal tersebut harus berasal terutama dari pendidikan dan sifat kemanusiaan”. Tentang kualitas pendidikan yang menyumbang ke arah pencegahan kejahatan, Clifford menyatakan ;

“pendidikan bisa membuktikan dirinya sebagai kunci untuk pencegahan terhadap peningkatan kejahatan, jika pendidikan itu ditujukan untuk kehidupan bukan semata-mata sebagai alat pengakuan sosial melalui perolehan diploma/ijazah. Kedua aspek tersebut memang berkaitan erat tetapi tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.”<sup>35</sup>

Mengapa sekolah dapat berperan dalam pencegahan kenakalan anak/delinkuensi, karena sekolah adalah satu-satunya lembaga sosial yang mewajibkan kehadiran anak-anak. Anak-anak akan menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk hadir di sekolah, disamping waktu yang dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja bakti di sekolah atau kegiatan ekstra kurikuler. Oleh sebab itu, sekolah berada pada posisi yang unik dan potensial baik sebagai lembaga identifikasi anak dengan masalah tingkah laku dan sosialisasi, maupun sebagai lembaga atau perangkat latihan (dengan aneka disiplin) bagi tingkah laku yang mematuhi hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Proyek Lembaga Penyelidikan Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung yang menyorot tentang bagaimana peranan pendidikan formal/sekolah terhadap kenakalan anak didapatkan data :

---

<sup>35</sup> Mohammad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 46-47.

- 18% of the delinquents never went to school;
- from the delinquents who went to school, more than half (54%) entered school at the age of 9 years or older.<sup>36</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari anak-anak didik yang melakukan kenakalan, 54% dilakukan oleh anak yang masuk sekolah pada usia 9 tahun atau lebih, merupakan usia yang lebih bila dibandingkan dengan usia anak-anak yang diwajibkan pemerintah untuk masuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya lebih pro-aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi warga negara, dan harus melengkapi tenaga material, fasilitas pendidikan, dan personal pendidikan yang handal, serta dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kapasitas/kemampuan sekolah untuk memperkecil peristiwa kenakalan anak – yang menurut penelitian di atas dilakukan oleh 72% anak didik sekolah – yang membentuk pusat perhatian dari *school based social crime prevention*.

Strategi pencegahan kejahatan/kenakalan melalui sekolah yang hanya menitikberatkan pada pembinaan individu dari anak didik, tidaklah akan berhasil dalam mengurangi dan mencegah delinkuensi. Pencegahan atau pengurangan delinkuensi melalui sekolah tersangkut banyak aspek, yang di dalam *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)* di Bangkok tahun 1987, dinyatakan sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Mengembangkan sistem pendidikan yang luas/ yang meliputi banyak hal yang memberikan maksud tertentu dan instruksi serta bimbingan yang relevan, secara realitas berorientasi pada situasi kehidupan dan kesempatan kerja.
- b. Membantu penyesuaian diri melalui sistem pendidikan dari pendekatan fleksibel, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi dari sosio-ekonomi dan kultural, secara

<sup>36</sup> Bulletin Research "Kalawarta" LPP IKIP Bandung, dalam Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, op.cit., hal. 70.

<sup>37</sup> Mohammad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 50-52.



khusus dalam kasus ketidakberuntungan dari masalah-masalah yang dihadapi remaja seperti konflik sosio-kultural.

- c. Mendorong administrator pendidikan untuk mengingat masalah dan kebutuhan orang muda dan meningkatkan hubungan saling pengertian dan keharmonisan diantara para pelajar, guru, administrator, dan orang tua murid, dengan pandangan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menghasilkan pengembangan belajar dan kemanusiaan. Dengan demikian sekolah berkewajiban menyusun cara untuk mengurangi tingkat drop out (kegagalan sekolah).
- d. Meningkatkan peran sekolah sebagai agen sosialisasi sebaik peranannya sebagai fasilitator dari proses belajar.
- e. Mendorong pengerahan dari staf pengajar/pendidik yang berkualitas dan mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan orang muda.
- f. Membantu pendidik dalam merencanakan strategi untuk menghadapi ketidakmampuan anak untuk menyesuaikan diri yang seringkali tercetus sebagai tingkah laku anti sosial, seperti suka menggertak, vandalisme, dan tindak agresif atau melawan terhadap guru dan teman sekolahnya.
- g. Memobilisasikan kegiatan kooperatif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang efektif dari pencegahan ketergantungan obat di antara orang muda, dengan memberikan materi pelajaran tentang akibat negatif dari berbagai jenis obat-obatan dan bahaya penyalahgunaan obat.
- h. Meningkatkan pendidikan khusus dalam segala aspek penyalahgunaan seksual dan eksploitasi anak yang lebih muda oleh orang yang lebih tua.
- i. Mendorong administrator pendidikan untuk mengurangi tekanan yang berlebihan terhadap orang muda untuk menerima pendidikan.
- j. Mendorong partisipasi orang muda dalam meningkatkan tingkah laku yang mematuhi hukum di sekolah.
- k. Mendorong sekolah untuk mengembangkan kursus yang menjamin bahwa orang muda mempunyai pengertian yang jelas tentang bagaimana mereka dapat terjerumus ke dalam tingkah laku kriminal dan dieksploitasi oleh pemimpin gang, mucikari, penjual obat, dan penjahat lain.
- l. Meningkatkan usaha untuk mendidik orang muda agar memperhatikan hak-hak hukum mereka, tanggung jawab, dan pemahaman tentang tata kerja sistem peradilan pidana dengan penekanan pada pembinaan pelanggar hukum.

### Faktor Pergaulan si Anak

Betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak ditunjukkan sendiri oleh pengungkapan latar belakang/masa lampau kehidupan sosial si anak dalam Penelitian Masyarakat (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang telah dimulai pada saat penyidikan anak. Benjamine Fine menyatakan "*the enviromental factors must be interpreted as the needs, values, goals, and behavior of individual children*".<sup>36</sup> Dengan demikian pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu dapat membentuk atau menghasilkan norma-norma tertentu pula. Dan pengaruh pergaulan di dalam dan di luar rumah adalah bersifat timbal balik. Tidak selamanya pengaruh dari luar rumah tangga dapat membuat tenteram kehidupan keluarga dan kedudukan norma dalam keluarga itu sendiri. Dalam pertemuan antara norma lama yang membekas/melekat dengan norma baru yang dibawa si anak dari luar, tentu ada perubahan norma dan menimbulkan norma baru, baik norma itu bersifat mendidik untuk berbuat baik maupun untuk berbuat tidak baik.

Apabila pertumbuhan norma baru tersebut yang berbeda bentuk dan tujuannya itu tidak diwaspadai oleh orang tua si anak, artinya : orang tua tidak bijaksana dalam menyelesaikan kebingungan yang dialami si anak dan membiarkan membentuk penafsiran/ persepsi sendiri, maka dikhawatirkan si anak akan berpegang pada norma yang lebih banyak membenarkan yang tidak baik/buruk.

Mengenai masalah lingkungan pergaulan yang berbeda yang dialami oleh anak, dan menimbulkan suatu pemahaman/penafsiran baru, secara teoritis/konseptual diuraikan oleh

---

<sup>36</sup> Benjamina Fine dalam Romli Almasasmita, *Problem Dan Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, op.cit., hal. 73.

Sutherland dalam teorinya "*Differential-Association*"<sup>39</sup>, yang pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar (*learning theory*). Teori ini berpangkal pada pemikiran bahwa pelanggaran norma itu dipelajari di dalam pergaulan yang intim dengan kelompoknya, dimana anggota-anggota itu mempelajari tidak saja cara melakukan perbuatan itu sendiri, tetapi juga motif, dorongan, pikiran, dan sikap orang yang pernah melakukan perbuatan itu.

Proses mempelajari itu menghasilkan suatu pendapat mengenai norma yang berlaku, yaitu apakah disetujuinya atau tidak disetujuinya. Jadi seseorang yang melakukan suatu pergaulan menghadapi dirinya pada norma-norma yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dimana satu pihak berpendapat bahwa norma tersebut adalah "*pavorable to violation of law*"; sedangkan dilain pihak menyatakan bahwa norma itu "*unpavorable to violation of law*" (pendapat minoritas). Dengan kata lain, apabila seorang individu (anak) sering bergaul dengan seseorang/kelompok dan merasakan kerukunan/keintiman diantara mereka, maka norma mereka (delinkuensi) adalah norma yang membekas pada diri si anak itu dan dipandanginya sebagai norma yang "*pavorable*"; sedangkan sebenarnya menurut masyarakat norma itu justru "*unpavorable to violation of law*", sehingga harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dan merugikan kehendak masyarakat.

Yang patut dicermati berkaitan dengan perilaku anak-anak yang cenderung delinkuen dalam hubungannya dengan proses belajar, adalah timbulnya kelompok-kelompok remaja yang disebut dengan "gang". Pengertian "gang" dimaksudkan sebagai salah satu jenis pergaulan yang saling erat hubungannya di dalam kelompok.<sup>40</sup> Timbulnya gang-gang tersebut menimbulkan masalah baru karena apabila dibiarkan berlarut-larut baik oleh orang tua ataupun alat negara

---

<sup>39</sup> Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Romli Atmasasmita, *ibid*.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 76.

tidak mustahil kelak akan memunculkan para penjahat dewasa. Ini disebabkan karena gang bagi si anak lebih merupakan tempat untuk melatih diri, baik dalam siasat maupun teknis pelaksanaan, sehingga dapat menjadi penjahat yang terlatih atau "*skilled criminal*".

Ad (b). Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Situasional

Pencegahan kejahatan ini perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran. Perbedaannya dengan pendekatan sosial yang merupakan usaha menanamkan pengaturan yang permanen untuk melawan pelanggaran-pelanggaran secara umum; pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus. Teori-teori situasional lebih berguna untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.<sup>41</sup>

Daya tarik dari langkah-langkah situasional secara luas terletak pada kapasitasnya untuk menyediakan solusi yang realitis, seringkali sederhana, dan tidak mahal. Ada dua katagori utama dari langkah-langkah situasional, yaitu : (1) langkah-langkah sekuriti yang akan membuat lebih sukar untuk dilakukannya kejahatan; dan (2) langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari dilakukannya kejahatan.<sup>42</sup>

Ad (1). Langkah-Langkah Sekuriti Yang Menghindari Pelanggaran

Ada tiga cara yang dilakukan, yaitu :

a. Memperkokoh sasaran kejahatan.

Model ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di

<sup>41</sup> Mohammad Kemal Darmawan, op.cit., hal. 67-68.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 69.

masyarakat. Dengan memperbaiki disain lingkungan fisik akan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan. Cara disain lingkungan ini mencakup pertimbangan tentang penempatan bangunan, kualitas material yang digunakan dalam bangunan-bangunan (misalnya keadaan pintu, jendela, sistem kunci, dan kayu atau tembok yang digunakan), disain arsitektur, peranan pepohonan, penerangan, serta pagar dalam mencegah kejahatan.

b. Memindahkan sasaran kejahatan.

Beberapa kejahatan secara sederhana dapat dicegah melalui pemindahan jalan masuk ke arah sasaran kejahatan atau dengan jalan merancang lingkungan yang dapat memperkecil kesempatan dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, sebagai contoh : pemindahan mesin-mesin dari tempat-tempat umum ke lokasi yang lebih memungkinkan pengawasan sehingga mencegah tingkah laku vandalis dan perusakan-perusakan; atau mengembangkan praktek-praktek pembayaran dengan cek sebagai alternatif pembayaran tunai, kartu kredit, menggunakan uang plastik, dan kartu telepon bagi pengguna telepon umum. Semua cara atau strategi ini dapat memperkecil dilakukannya pencurian dan perampokan.

c. Menghilangkan sarana/alat untuk melakukan kejahatan.

Strategi ini misalnya berupa penyaringan bagi penumpang pesawat terbang untuk tidak membawa senjata atau bahan peledak sebagai usaha mengurangi peristiwa pembajakan pesawat terbang; atau tingkah laku kekerasan yang potensial yang terjadi di dalam pub atau stadion sepak bola dengan mengganti gelas atau botol kaca dengan yang terbuat dari bahan plastik.<sup>43</sup>

*Ad (2). Langkah-Langkah Yang Mempengaruhi Biaya Dan Keuntungan Dari Dilakukannya Kejahatan*

Biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum dapat dipengaruhi baik oleh pengurangan dari perangsang untuk melakukan pelanggaran atau peningkatan dari ancaman penangkapan dan penghukuman yang sungguh-sungguh.

Kurangnya perangsang untuk melakukan pelanggaran meliputi penurunan keuntungan yang diharapkan dari pelanggaran yang dilakukan, sebagai contoh dalam kasus pencurian,

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 70-75.

terdapatnya tanda kepemilikan pada barang yang dicuri akan mengurangi nilai dari barang tersebut.

Peningkatan dari ancaman penangkapan atau penghukuman yang sungguh-sungguh dan dapat dirasakan oleh calon pelanggar akan dapat dicapai dengan meningkatkan bentuk-bentuk dari pengawasan/pengamatan. Hal ini efektif berlaku bagi sebagian besar bentuk kejahatan. Pengawasan/pengamatan yang demikian berbentuk pengawasan secara teknis, dan pengawasan formal/informal.

Pengawasan secara teknis dilakukan dengan memberikan peralatan-peralatan khusus pada bangunan pemukiman, bangunan toko, bangunan komersial (bank misalnya) dan sebagainya, pada pintu masuk dan sudut-sudut ruangan tertentu dengan CCTV (*Closed Circuit Television*).

Pengawasan formal menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan polisi dengan ancaman penangkapan. Pengawasan ini juga termasuk individu-individu yang terorganisasi secara khusus dengan tujuan eksplisit untuk melakukan tugas pengawasan, misalnya perusahaan pengamanan pribadi (*private security firm*) yang melakukan tugasnya di pusat perbelanjaan, lapangan terbang, lembaga keuangan, dan tempat hiburan. Sementara pengawasan yang informal seringkali dilakukan oleh petugas pelayanan sosial, pegawai perusahaan (pekerja pabrik), dan penduduk biasa sebagai bagian dari peran dan kewajiban yang lebih luas.

#### Ad (c). Pencegahan Kejahatan melalui Pendekatan Kemasyarakatan.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Terdapat suatu pandangan yang kuat yang menyebutkan bahwa tanpa adanya peran serta dan kerjasama dari masyarakat, polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Berkenaan dengan ini Goldstein mengungkapkan :

“Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung pada adanya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku, dan dalam membantu proses penuntutan”.<sup>44</sup>

Dalam kasus-kasus kenakalan anak yang ada di Amerika, peran serta masyarakat terlihat pada usaha mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan program kerja siap pakai sebagai pelengkap dari strategi intervensi yang menyediakan badan pemberi nasihat secara khusus, sekolah khusus, sukarelawan dalam peradilan anak-anak<sup>45</sup>, polisi khusus untuk pelayanan sosial, dan pelayanan-pelayanan lain yang khusus ditujukan bagi anak-anak nakal. Program ini menangani anak-anak nakal yang dikenakan tuduhan mangkir dari sekolah, lari dari rumah, dan kejahatan berskala kecil.<sup>46</sup>

Dalam lingkup yang lebih luas, bentuk strategi pencegahan kejahatan yang paling populer dikalangan masyarakat dan polisi, yaitu adanya Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Siskamling (Konsep di Indonesia disebut Keamanan Swakarsa) dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang terorganisasi akan dapat mendorong reaksi kolektif

<sup>44</sup> H. Goldstein, *Policing a free Society*, Ballinger Publishing Co, Cambridge, 1997, hal. 52.

<sup>45</sup> Di Indonesia, dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997, memberi tempat bagi Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan, untuk ikut berperan dalam bentuk bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

<sup>46</sup> Mohammad Kemal Darmawan, *op.cit.*, hal. 88.

terhadap kejahatan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, khususnya pencurian. Menurut Olsen, kegiatan siskamling dilaksanakan dengan tujuan :<sup>47</sup>

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kejahatan.
- Mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengamankan rumah dan kendaraannya
- Mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi apabila melihat kejadian-kejadian yang mencurigakan.
- Meningkatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat.

### 3. Peserta Dalam Usaha Pencegahan Kejahatan/Penyimpangan Lain

Peserta-peserta yang terlibat dalam usaha pencegahan kejahatan secara umum antara lain sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. 1. Penguasa yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi kejahatan.
2. Penguasa yang menentukan kebijaksanaan setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan kemampuan memenuhi harapan fisik, mental, dan sosial secara legal.
- b. 1. Calon pelaku kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan suatu kejahatan untuk kepentingan diri sendiri dan karena perilaku orang lain (keserakahan, kelalaian, ajakan/anjuran orang lain).
2. Pelaku kejahatan yang tidak diharapkan mengulang melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan lain demi kepentingan bersama. Diharapkan juga ikut kerjasama dalam usaha membina dirinya, bersedia dibina oleh instansi yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan (residivisme).
- c. 1. Calon korban kejahatan, yang diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melibatkan diri dalam suatu kejahatan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan sendiri ataupun orang lain. Diharapkan juga untuk tidak menjadi korban dengan bersikap waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan kejahatan pada dirinya.
2. Korban kejahatan, yang diharapkan berusaha untuk tidak menjadi korban lagi. Selain itu juga diharapkan supaya si korban sendiri tidak melakukan kejahatan dengan mengadakan pembalasan atau menyuruh atau membiarkan orang lain memberikan/melakukan pembalasan. Diharapkan juga supaya tidak memberikan kesaksian palsu yang dapat merugikan si pelaku, selain itu memberikan kesaksian palsu juga merupakan kejahatan.

<sup>47</sup> Ibid, hal. 108.

<sup>48</sup> Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, op.cit., hal. 114-116.



- d. Penyaksi terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan, anggota masyarakat yang diharapkan ikut serta dalam usaha pencegahan dengan membantu berdaya upaya mencegah terjadinya/berlangsungnya suatu kejahatan. Usaha ini dapat dilakukan dengan bertindak sendiri maupun dengan bantuan orang lain/petugas. (Untuk meningkatkan partisipasi mereka perlu diadakan bagi mereka penghargaan, imbalan, dan perlindungan). Sikap pasif para penyaksi/masyarakat dapat merupakan dorongan para pelaku/calon pelaku kejahatan untuk melaksanakan niat jahatnya, meneruskan/mengulang kejahatannya. Apalagi bila golongan masyarakat tertentu secara jelas atau tidak ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan golongan tersebut.
- e. Instansi/golongan swasta maupun pemerintah yang memang bertujuan membantu melakukan kegiatan-kegiatan pencegah sesuai dengan bidang pelayanan dengan usaha-usaha sebelum atau sesudah suatu kejahatan dilakukan. Instansi/organisasi ini mempunyai peranan penting dalam usaha pencegahan kejahatan berhubungan dengan kemampuan mempengaruhi secara positif atau negatif instansi-instansi lain dengan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam usaha pencegahan kejahatan (lembaga sosial) : sekolah, polisi, pengadilan, panti asuhan.
- f. Keluarga, dalam arti luas atau sempit, yang dapat dikatakan mempunyai hubungan yang paling kuat dengan yang bersangkutan. Perhatian pada keluarga dalam masalah pencegahan ini tidak boleh diabaikan, oleh karena pengaruh positif atau negatif dari ikatan keluarga yang dapat mempengaruhi keras atau lemah seseorang melakukan kejahatan. Pengembangan ikatan keluarga yang positif dapat banyak membantu usaha pencegahan kejahatan.

#### 4. Pelaksanaan Usaha Pencegahan Kejahatan/ Penyimpangan lain.

Cara pencegahan kejahatan dan penyimpangan lain memperhitungkan semua phenomena yang mempengaruhi cara-cara pencegahan yang terutama memperhatikan pencegahan sebelum terjadi kejahatan, selain juga perhatian pada masa kini dan masa mendatang sebagai obyek pencegahan. Pelaksanaan usaha pencegahan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Yang bersifat langsung, kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan :
  - (1). Pengamanan obyek kejahatan dengan sarana fisik/konkrit; ditambah dengan mencegah hubungan antara pelaku dan obyek kejahatan dengan berbagai sarana pengamanan.

<sup>49</sup> Ibid, hal. 117-120.

- (2). Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kejahatan.
  - (3). Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan/lampu; merubah bangunan, jalan, dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi
  - (4). Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.
  - (5). Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan.
  - (6). Penghapusan peraturan yang melarang suatu kejahatan berdasarkan beberapa pertimbangan.
- b. Yang bersifat tidak langsung; kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum dan atau sesudah dilakukan kejahatan yang antara lain meliputi :
- (1). Penyuluhan penyadaran mengenai : tanggung jawab bersama dalam terjadinya kejahatan; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kejahatan; akibat kejahatan.
  - (2). Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kejahatan yang mengandung ancaman hukuman.
  - (3). Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya.
  - (4). Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kejahatan yang akan dilakukan dan obyek sosialnya.
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- (1). Perbaikan sistem pengawasan.
  - (2). Perencanaan dan disain perkotaan.
  - (3). Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan jahat.
- d. Pencegahan melalui perbaikan pelaku (sebelum kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- (1). Pemberian imbalan yang menguntungkan dari perilaku yang sesuai dengan hukum.
  - (2). Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku jahat.
  - (3). Patroli polisi pencegahan.
  - (4). Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kejahatan.
  - (5). Pendidikan para calon korban.
  - (6). Peningkatan/pengadaan program asuransi.
  - (7). Penguatan ikatan sosial tetangga di kota.
- e. Hasil/akibatnya pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku sebelum kejahatan dilakukan adalah antara sebagai berikut :
- (1). Pengurangan angka kejahatan.
  - (2). Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan pembinaan.
  - (3). Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kemerdekaan penduduk.

- (4). Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan jahat.
  - (5). Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan, dan pemberian kerja.
- f. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut:
- (1) Pengurangan angka kejahatan.
  - (2) Kondisi lingkungan yang lebih baik.
  - (3) Pengeluaran untuk kejahatan yang lebih rendah.
  - (4) Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
  - (5) Pembangunan kembali lingkungan perkotaan.
  - (6) Pengurangan penyimpanan tingkah laku.
- g. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan lingkungan (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- (1). Pengembalian sistem respons yang cepat.
  - (2). Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman.
  - (3). Sistem data dengan komputer.
  - (4). Sistem komunikasi yang modern.
  - (5). Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
- h. Pencegahan kejahatan melalui perbaikan pelaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
- (1). Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku jahat untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini.
  - (2). Penggunaan kejahatan yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa) lebih lanjut.
- i. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kejahatan dilakukan) antara lain sebagai berikut :
- (1). Penyaluran para penjahat dalam satu kesatuan kerja di kota.
  - (2). Pengawasan atas perilaku jahat.
- j. Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat antara lain sebagai berikut:
- Penyaluran ulang kejahatan baru ke dalam sistem pencegahan dan tidak kepada pengadilan atau sistem pembinaan/pemasyarakatan.

#### D. PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA MELALUI HUKUM PIDANA

##### 1. Politik Kriminal Dalam Konteks Kenakalan Anak/Tindak Pidana

Pembahasan-pembahasan terdahulu lebih ditekankan pada pemahaman tentang apa dan bagaimana, serta latar belakang seorang anak itu melakukan kenakalan. Pemahaman yang demikian sangat penting dalam rangka melandasi pemikiran-pemikiran ke arah upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak. Tanpa dilandasi pemahaman yang demikian, penanggulangan terhadap kenakalan anak dirasakan tidak akan memenuhi sasaran, apalagi kalau kita ingat bahwa seorang anak harus diperlakukan berbeda dengan seorang dewasa yang melakukan kejahatan. Seorang anak mempunyai ciri khas tertentu, yang perlakuan terhadapnya haruslah mempunyai ke-khas-an tertentu pula.

Berbekal atas pemahaman yang demikianlah, pada bagian ini akan dibicarakan permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap kenakalan anak. Namun pembicaraan tidak terlepas dari pembahasan penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan akan lebih baik apabila kita awali dari apa yang disebut dengan politik kriminal.

##### Politik Kriminal

Sudarto dalam bukunya yang berjudul **Hukum dan Hukum Pidana** memberi batasan bahwa Politik Kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>50</sup> Sementara Marc Ancel merumuskannya sebagai *rational organization of the control of crime by society*. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal Policy is the rational organization of the*

---

<sup>50</sup> Martin R. Haskell & Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime, and Criminality*, Rand Mc Hally College Publishing Company, Chicago, 1974, hal. 223-224.

*social reaction to crime*". Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah :

- a. Criminal policy is the science of responses ;
- b. Criminal Policy is the science of crime prevention ;
- c. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime ;
- d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.<sup>51</sup>

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan antara lain menggunakan hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai *Socio-political system*.<sup>52</sup>

Apabila demikian halnya, maka pemahaman atau hubungan koresional antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur) merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 2.  
Lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7.

<sup>52</sup> Muladi, *ibid*.

penanggulangan kejahatan. Hal ini tampak dari salah satu kesimpulan dalam Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders ke-IV di Kyoto, Jepang yang menyatakan :

"The prevention of crime and the treatment of offenders cannot be effectively under taken unless it is closely and intimately related to social and economic trends".

Pernyataan ini kemudian diperkuat lagi dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan Kongres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke-VI tahun 1980 di Caracas, yang menyatakan :

"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political systems, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order".<sup>53</sup>

Sisi lain dari kebutuhan kebijakan penanggulangan kejahatan yang demikian itu berarti pula adalah kebutuhan untuk mengaitkan usaha-usaha penanggulangan kejahatan – yang nantinya terumuskan dalam suatu Kebijakan Kriminal – dengan Politik Sosial. Hal ini adalah wajar karena pada hakekatnya tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup> Secara skematis dapat dilihat dalam ragaan berikut.<sup>55</sup>

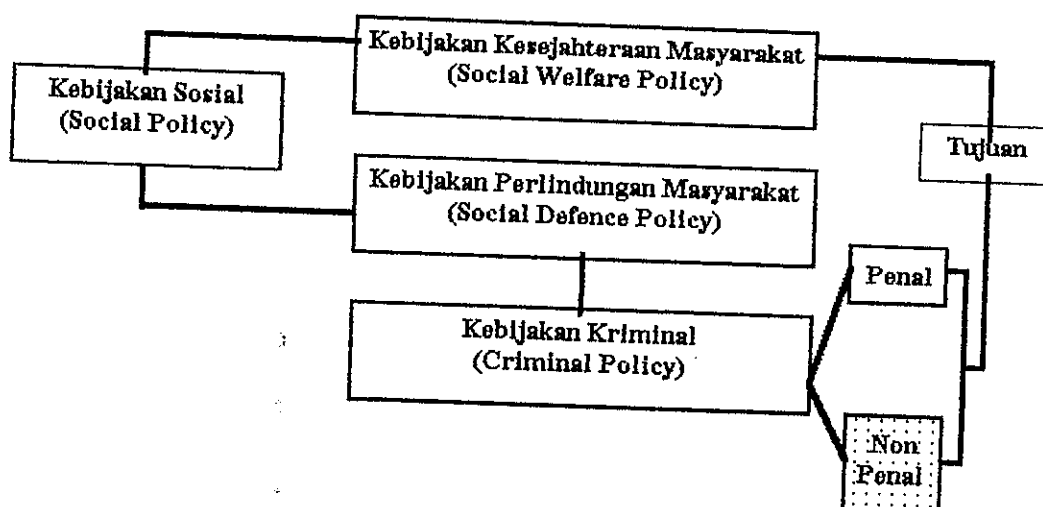
<sup>53</sup> Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal. 72-73.

<sup>54</sup> Tujuan utama ini disebut dengan berbagai istilah misalnya : "kebahagiaan warga masyarakat" (*happiness of the citizens*) ; "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*a wholesome and cultural living*) ; "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) ; atau untuk mencapai "keseimbangan" (*equality*).  
Summary Report dari 34-th International Training Course, yang diselenggarakan UNAFEI di Tokyo tahun 1973, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal. 34.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 3.

101-102117-10117

# **RAGAAAN 1** **Hubungan Politik Kriminal dan Politik Sosial**

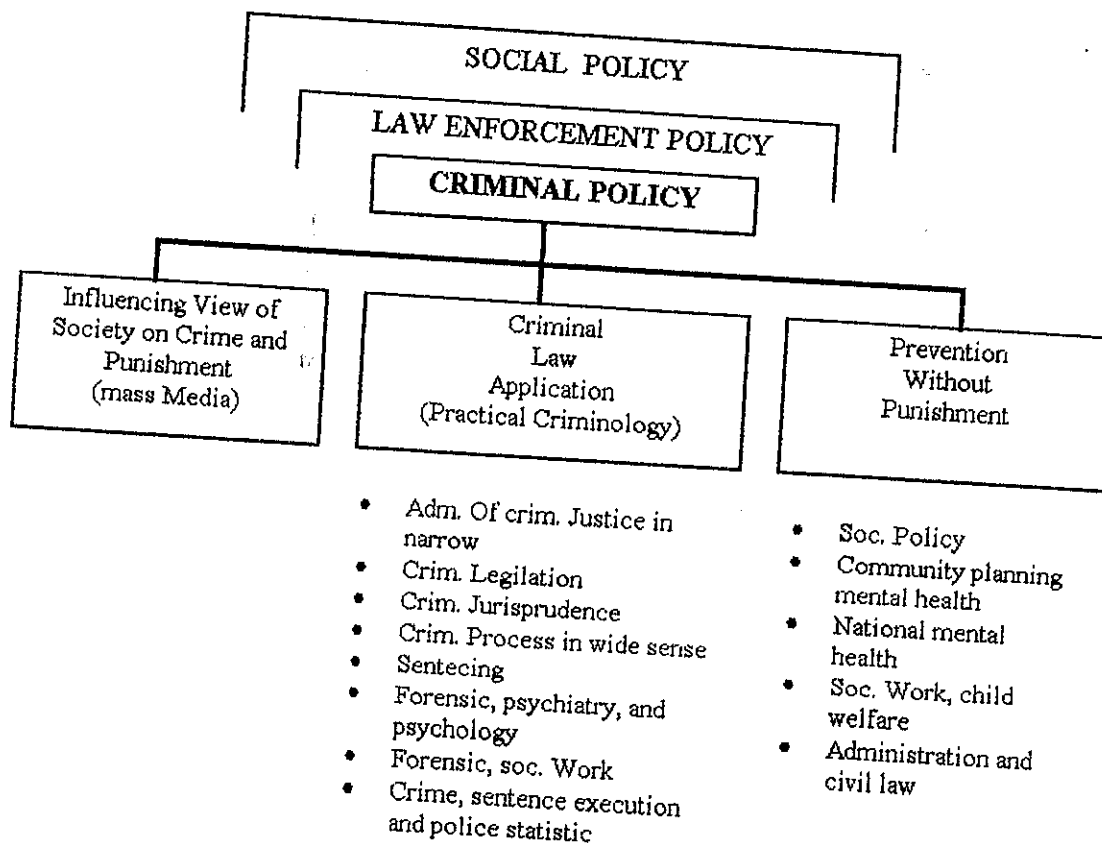


Selubungan dengan skema di atas, G.P. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa :  
*"Criminal policy as a science of policy is part of a longer policy : the law enforcement policy ... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy."*<sup>56</sup>  
 Berdasarkan uraian ini G.P. Hoefnagels memberikan skema lebih rinci dalam ragaan berikut ini.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> G.P. Hoefnagels : *The Other Side of Criminology*, dalam Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal. 74.

<sup>57</sup> Paulus Hadisuprpto, ibid, hal. 75.  
 Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 4.

## RAGAAAN 2 Lingkup Kebijakan Kriminal



Dari uraian dan skema di atas, terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- (a). Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial ; dan
- (b). Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Dalam kaitan dengan point (a), seluruh kebijakan penanggulangan kejahatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wajarlah apabila usaha penanggulangan kejahatan – termasuk usaha penegakan hukum pidana – adalah



bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada ungkapan, antara lain :<sup>58</sup>

- a. Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan inipun harus merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional.
- b. W. Clifford pernah mengemukakan pada "The 32-nd International Seminar Course on Reform in Criminal Justice" pada tahun 1973 di Jepang, sebagai berikut :

" ... On the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and a by-product of development. From this wider view-point criminal policy cannot be something a part from the more general social situation but must be developed from it and through it".

- c. Kongres PBB ke-IV tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah "Crime and Development" menegaskan :

"Any dichotomy between a country's policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions".

- d. Kongres PBB ke-V tahun 1975 di Geneva, menyatakan :

"The many aspect of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into a general social policy of each country".

- e. Dalam Deklarasi Caracas, yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-VI tahun 1980, antara lain ditegaskan :

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 5-8.

- Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order (Deklarasi No. 2).
  - It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on the social, cultural, political, and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human rights, and that Member states should develop and effective capacity policy, coordinated with strategies for social, economic, political, and cultural development (Deklarasi No. 3).
- f. Dalam salah satu pertimbangan "Milan Plan of Action" yang dihasilkan Kongres PBB ke-VII tahun 1985 di Milan (Italia) juga ditegaskan :

"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political systems, social, and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic and social systems and to the constantly evolving conditions of society".

- g. Di dalam "Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order" yang juga dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan (di dalam sub B mengenai "National Development and the prevention of crime").

- Systematic approach

15. Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging activities requiring systematic strategies and differentiated in relation to :

- (a). The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society in which they are applied ;
- (b). The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place and likely to occur and the related requirements ;
- (c). The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options.

- Crime prevention as part of social policy

21. The criminal justice system, besides being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national development targets, effort should be made to secure the necessary human and material resources, including the allocation of adequate funding, and to utilize as much as possible all relevant institutions and resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community.

h. Kongres PBB ke-8: tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengakui perlunya pendekatan kebijakan integral seperti yang digariskan dalam kongres-kongres terdahulu.

Hal ini terlihat di dalam dokumen kongres yang berkode A/CONF.144/L. 5 mengenai "International cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development" yang menyatakan :

"Convinced that crime prevention and criminal justice in the context of development should be oriented toward the observance of the principles contained in the Caracas Declaration, the Milan Plan of action, the Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the context of Development and a New Internasional Economic order and other relevant resolutions and recommendations of the Seventh United Nation Congress on the of prevention Crime and the Treatment of Offenders"

Dalam kaitan pada point (b) tentang adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal.<sup>59</sup> Oleh karena itu adalah wajar apabila Kongres PBB sangat memperhatikan hal ini, seperti :

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 10.

- (1). Dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980, dalam pertimbangan resolusi mengenai "Crime Trends and Crime Prevention Strategis", antara lain dikemukakan :
  - bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress toward the attainment of and acceptable quality of life for all people*);
  - bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
  - bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).
- (2). Dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan (Italia), dokumen No. A/CONF.121/L.9, bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan yang mendasar" (*the basic crime prevention strategies*).
- (3). Dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana (Kuba), pada dokumen No. A/CONF.144/L/17 tentang "*Social Aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*", antara lain dinyatakan :

- bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategis penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama ;
- bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit, dan ketakutan akan perang juga memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.<sup>60</sup>

#### Politikal Kriminal : Perilaku Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Dari keseluruhan uraian di atas, yang apabila dikaitkan dengan permasalahan perilaku anak nakal (tindak pidana anak), maka secara umum tidak akan jauh berbeda. Namun yang perlu diperhatikan adalah perlunya modifikasi dalam penanganan/penanggulangan kenakalan yang dilakukan anak baik secara penal maupun non-penal dalam konteks kebijakan kriminal. Hal ini disebabkan karena asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan usia muda (anak/remaja) sangat berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Haskell dan Yablonsky mengemukakan, dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu :

---

<sup>60</sup> Disarikan dari Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 11-12.

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun ;
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya ;
3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya ;
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman ;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan kurang bersifat informal dan individu (*informal and personalized procedure*).<sup>61</sup>

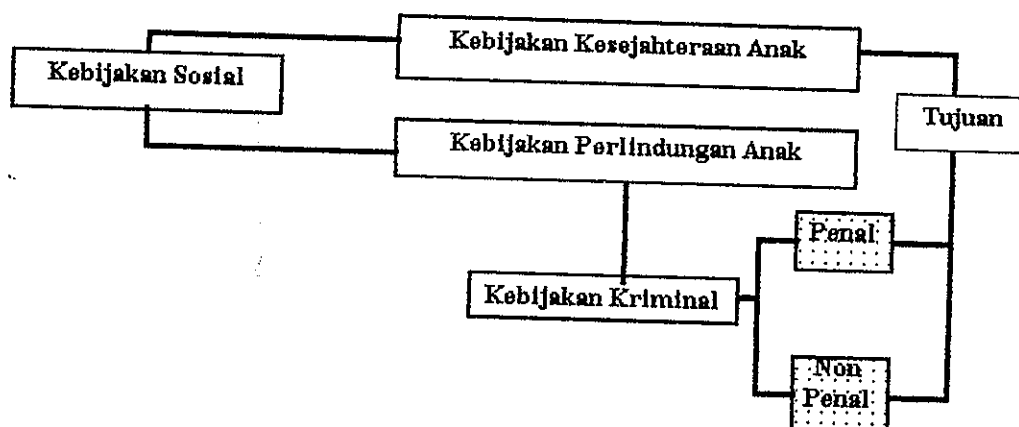
Dalam kaitan dengan kebutuhan akan keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dengan politik sosial, maka dalam hubungan dengan kebijakan penanggulangan kenakalan anak/remaja sebagai bentuk dari hubungan kriminal terhadap anak perlu dimodifikasi, yaitu yang diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa (*neglated children*) atau anak yang melakukan kenakalan (*delinquent children*). Secara skematis dapat dilihat dalam ragaan berikut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Martin R. Haskell & Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime, and Criminality*, op.cit., hal. 223-224.

<sup>62</sup> Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal

**RAGAAN 3**  
**Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Sosial**  
**Dan Politik Kesejahteraan Anak**



Dalam kaitan dengan penggunaan sarana penal dan non-penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak/remaja, juga perlu penekanan khusus. Penggunaan sarana non-penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak seharusnya diberi porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sarana penal. Apabila hal ini disepakati, maka berarti ada kebutuhan dalam pemahaman-pemahaman yang berorientasi pada pencarian faktor-faktor kondusif (faktor kriminogen) yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak/remaja. Disinilah, menurut Paulus Hadisuprpto muncul peranan dari ilmu kriminologi, sebagai ideographis sekaligus homothetis itu untuk menyumbangkan jasanya bagi pemahaman-pemahaman yang dimaksud diatas. Kriminologi melalui kegiatan penelitian-penelitian yang bersifat klasik, positivis, maupun interaksionis kiranya akan banyak memberikan sumbangan dalam rangka memperoleh pemahaman-pemahaman tentang hakikat dan latar belakang timbulnya kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak. Disamping peranannya dibidang penelusuran dan penemuan sarana-sarana non-penal, pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks penggunaan sarana penal. Seperti diketahui bahwa dalam konteks sarana penal, dikenal adanya

permasalahan tentang hukum pidana dalam arti *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Keduanya bersifat saling berkaitan dan menunjang dalam pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya. Khusus dalam kaitan dengan terakhir, tampaknya pemahaman terhadap dua masalah itu semakin penting saja, mengingat bahwa ketentuan yang tertuang dalam sistem hukum kita, masalah pidana anak dan peradilan anak masih merupakan persoalan yang cukup serius.<sup>63</sup> Tentang masalah ini, akan dikaji pada pembahasan yang berikut.

Pembicaraan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, perlu adanya pemikiran agar kriminologi menempati porsi penting. Pemikiran ini lebih lanjut dijelaskan penulis dalam ragaan berikut.<sup>64</sup>

---

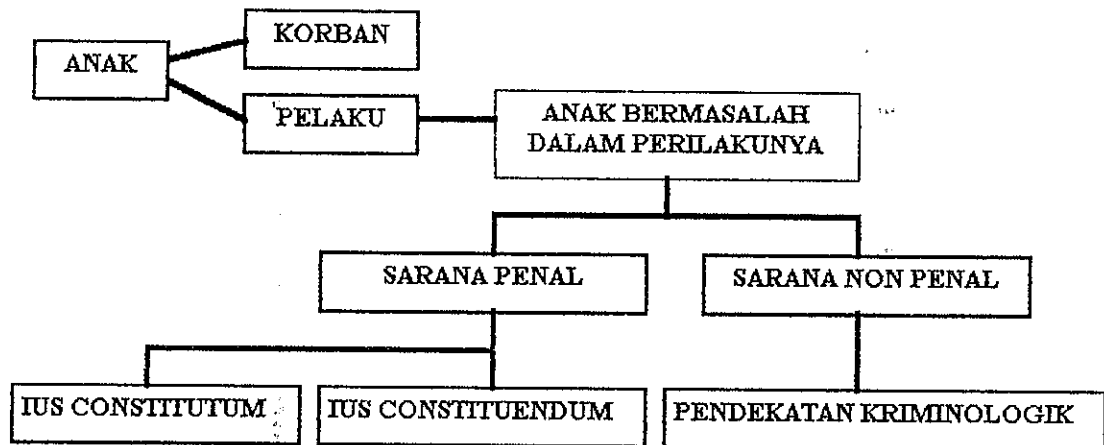
<sup>63</sup> Ibid, hal. 78.

<sup>64</sup> Ibid, hal. 79.



#### RAGAAN 4

##### Lingkup Kajian Tentang Perilaku Delinkuensi Anak



Bila Pembicaraan difokuskan pada masalah ius constituendum, disamping pemahaman dan pendekatan kriminologi, ada suatu kebutuhan yang kiranya tidak bisa lagi dihindari dalam upaya pembangunan hukum suatu negara. Kebutuhan itu adalah adanya tuntutan-tuntutan masyarakat internasional yang diakui bangsa-bangsa beradab, berupa instrumen-instrumen internasional yang tertuang dalam resolusi PBB. Negara-negara yang merasakan dirinya sebagai bangsa yang beradab, tuntutan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional itu sudah seyogianyalah masuk dalam lingkungan ius constituendum. Sehingga apabila kemudian terbentuk hukum yang baru, perhatian akan kondisi sosiokultural masyarakat dimana hukum itu dibangun selain akan mencerminkan tuntutan dan kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya, juga mencakup kepentingan yang lebih luas, baik kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Untuk itulah penulis menganggap perlu untuk membahasnya secara tersendiri, yaitu pada bagian akhir dari bab ini.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) Dalam Konteks Hukum Pidana Material

Seperti yang diungkapkan pada pembahasan terdahulu bahwa permasalahan pidana (juga tindakan) - yang tertuang dalam norma-norma hukum pidana - dan peradilan yang diperuntukan bagi anak - sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak/remaja - selalu menarik untuk dibicarakan. Seyogianya memang demikian, karena anak adalah mahluk yang memang harus dilindungi dari segala kekurangan yang melekat pada mereka. Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak harus merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam perlindungan anak dalam pengertian yang luas. Perlindungan hukum bagi anak adalah semata-mata pendekatan secara yuridis, selain pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak (pelaku tindak pidana), hukum pidana Indonesia - yang tetap berlaku sebelum UU No. 3/1997 berlaku secara efektif - tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang tersendiri, melainkan diatur di berbagai pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita (KUHP). Hal ini sama dengan yang berlaku di negeri Belanda yang secara historis sangat mempengaruhi sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun berbeda dengan hukum pidana yang berlaku di Inggris dan Belgia yang mengatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Hukum Pidana anak-anak yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

### a. Pasal 39 ayat (3) KUHP, yang merumuskan :

“Pernyataan sebagai disita itu dapat juga diputuskan atas benda-benda kepunyaan yang bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, akan tetapi terbatas pada benda-benda yang telah disita”.

b. Pasal 40 KUHP, yang merumuskan :

“Apabila seorang di bawah umur enam belas tahun memiliki, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pendapatan dan sewa tanah negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian tertentu dari Indonesia ; maka hakim dapat menyatakan benda-benda tersebut sebagai disita, juga apabila orang yang bersalah itu telah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau kepada pengasuhnya tanpa dijatuhi suatu pidana apapun”.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan sesuatu kekecualian dalam ketentuan umum, bahwa hukuman tambahan itu biasanya dijatuhkan beserta hukuman pokok dan tidak pernah dijatuhkan tersendiri.<sup>65</sup>

c. Pasal 45, dirumuskan bahwa :

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh :

- Memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikarenakan suatu hukuman ; atau
- Memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan ; atau
- Menghukum anak yang bersalah itu”.

Pasal ini meminta 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>66</sup>

1. Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa. Yang dimaksud “belum dewasa” (bagi orang Indonesia menurut LN 1931 No. 54 ; bagi orang Eropa menurut Pasal 330 BW) ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

<sup>65</sup> R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, hal. 59.

<sup>66</sup> R. Susilo, *ibid*, hal. 61-62.

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 tahun.

Jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka terhadap anak-anak dapat dijatuhi salah satu hukuman yang diperuntukkan bagi mereka.

Seorang anak yang telah dinyatakan bersalah dan kepadanya diperintahkan untuk dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, menurut E. Utrecht adalah penyimpangan dari prinsip umum yang menyatakan bahwa apabila seseorang ditetapkan melakukan kesalahan maka harus ditetapkan hukuman, biarpun hukuman itu hukuman minimal (satu hari atau Rp. 3.75) saja, atau ditetapkan hukuman bersyarat (*Voorwaardelijke straf*). Dalam hal yang menyimpang dari prinsip umum ini, hakim mengembalikan anak kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa anak tersebut dikenai hukuman.<sup>67</sup>

Dalam *Strafwetboek* di negeri Belanda, ada ketentuan semacam ini, yaitu dalam Pasal 38-nya. Namun, ketentuan dalam KUHP kita sedikit lebih luas, yaitu berkaitan dengan pengembalian anak kepada "pemelihara/pengasuhnya" ; sedangkan dalam Pasal 38 *Strafwetboek* itu "pemelihara/pengasuh" (*zijn versorger*) tidak disebut. Menurut keterangan dalam *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* (hal 134) maka "*zijn versorger*" itu disisipkan dalam WVS tahun 1915 berhubung dengan hal diantara para terdakwa yang berasal dari rakyat bumiputera ada banyak yang tidak lagi memiliki orang tua, dan dalam hukum perdata, adat lembaga perwakilan tidak ada. Selanjutnya, berhubung dengan hal di beberapa daerah di Indonesia – seperti di Minangkabau terdapat lembaga "*matriarchat*", maka pengertian "bapak" ("*vader*") dan "kekuasaan bapak" ("*vaderlijke macht*") diperluas.

---

<sup>67</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal. 344.

Perluasan ini dimuat dalam Pasal 91 KUHP, berbunyi : "(1) Yang masuk sebutan kekuasaan bapak yaitu kekuasaan kepada keluarga ; (2) Yang masuk sebutan ibu bapak yaitu orang kepada keluarga ; (3) Yang masuk sebutan bapak, yaitu orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak ; (4) Yang masuk sebutan anak, yaitu orang yang dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. Dalam hubungan ini, apabila kita mengingat hukum adat dalam lembaga *matriachat*, kekuasaan bapak (*vader lijke macht*) tidak dijalankan oleh bapak (ayah kandung), tetapi oleh kakak tertua dari ibu yang disebut dengan sebutan "mamak".<sup>68</sup>

Apabila kembali kepada pilihan hakim seperti yang tertuang dalam Pasal 45 diatas, maka menurut Utrecht perbuatan pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh (pemeliharaanya) adalah sebagai ketetapan hakim berupa satu "tindakan" (*Maatregel*).<sup>69</sup> Boleh dikatakan bahwa hakim "mengalihkan wewenang" untuk mengoreksi anak yang nakal tersebut kepada orang tuanya sendiri, atau kepada mereka yang telah mengganti kedudukan orang tua itu.<sup>70</sup> Dalam hubungan ini, Lamintang-pun mengatakan bahwa sebelum memerintahkan agar seorang anak di bawah umur yang bersalah karena telah melakukan sesuatu kenakalan itu dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya, hakim harus

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 345.

<sup>69</sup> Mengenai tepat atau tidaknya tindakan hakim tersebut harus dipandang sebagai suatu pemidanaan atau suatu penindakan, berkatalah Prof. Pompe yang artinya : "dalam hal ini, kita tidak dapat berbicara tentang adanya suatu pidana. Bahkan orang juga dapat meragukan apakah pengembalian seseorang anak kepada orang tuanya seperti itu dapat dianggap sebagai suatu penindakan. Keraguan tersebut kiranya adalah wajar, mengingat bahwa putusan hakim tersebut tidak berisi suatu penjatuhan pidana atau suatu penindakan".  
Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N. V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 209.

<sup>70</sup> Utrecht, loc. cit.

mempunyai "keyakinan" bahwa pendidikan untuk "membentuk kembali" pribadi dan kepribadian dari anak tersebut dapat dipercayakan kepada orang tua atau walinya.<sup>71</sup> Hanya sayangnya, undang-undang pidana sendiri tidak menentukan jenis tindak pidana yang bagaimana yang dapat memberi pilihan pada hakim untuk menjatuhkan tindakan yang demikian.

Selanjutnya seorang hakim juga dapat memerintahkan supaya anak yang melakukan kesalahan (dan dinyatakan bersalah) diserahkan pada pemerintah – sebagai pilihan selain pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya atau penjatuhan pidana – tindakan hakim yang demikian dikenal dengan nama "*de terbeschikkingstelling van de Regering*" (penyerahan kepada pemerintah) – atau disingkat menjadi "*de terbeschikkingstelling*" – sehingga hubungan yang nyata (*feitelijke bond*) antara seorang anak dengan orang tuanya menjadi terputus dan pendidikan "biasa" yang diberikan diganti menjadi pendidikan terpimpin (*dwang op voeding*).

Undang-Undang Hukum Pidana menyebut secara limitatif dalam hal mana hakim dapat menetapkan "*de terbeschikkingstelling*" itu. Apabila dilakukan salah satu pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 45 sub ke-2 KUHP tersebut, maka harus dipenuhi salah satu syarat lagi, yaitu harus ada pengulangan (*recidive*). Untuk pengulangan ini tidak ditentukan jangka waktu yang biasa, yaitu 5 (lima) tahun, tetapi selama 2 tahun.<sup>72</sup>

d. Pasal 46 KUHP, dirumuskan bahwa :

"(1). Apabila hakim telah memerintahkan agar orang yang bersalah ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah, maka ia :

---

<sup>71</sup> Lamintang, op. cit., hal. 210.

<sup>72</sup> Utrecht, op. cit., hal. 346.

- Dapat di tempatkan di dalam lembaga pendidikan negara, dimana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara yang lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah ;
  - Atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sama dengan keinginan pemerintah ;
  - Satu dan lain hingga mereka itu mencapai usia delapan belas tahun.
- (2). Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dalam ayat (1) ditetapkan dengan sebuah ordonansi”.

Ordonansi yang dimaksud ayat (2) adalah *Dwangopvoeding-regeling*, yang diundangkan dalam Indonesia Stb. 1917 No. 741.

Jadi, menurut Pasal 46 tersebut, maka anak yang diserahkan kepada pemerintah itu dapat:

- Ditempatkan disatu lembaga pendidikan negara (*Landsopvoedingsgesticht*) ; atau
- Diserahkan kepada seorang khusus, yaitu keluarga partikular/swasta ; atau
- Diserahkan kepada satu perhimpunan atau yayasan yang bekerja dibidang kesejahteraan sosial dan yang mempunyai status badan hukum.

e. Pasal 47 KUHP, dirumuskan bahwa :

- “(1). Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi yang bersalah, maka pidana pokok yang tertinggi bagi kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya ;
- (2). Apabila perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun ;
- (3). Pidana tambahan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan angka 3 tidak dapat dijatuhkan”.

f. Pasal 78 ayat (2) KUHP, dirumuskan bahwa :

“Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu belum mencapai usia delapan belas tahun, maka setiap jangka waktu kadaluarsa tersebut di atas dikurangi dengan sepertiganya”.

Dari beberapa pasal KUHP yang telah diuraikan di atas, jelaslah kiranya bahwa jenis-jenis pidana – seperti yang tertuang pada Pasal 10 KUHP – yang tidak dapat dijatuhkan bagi anak-anak adalah : (a). pidana mati ; (b). pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu ; dan (c). pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Kemudian, bagaimana pengaturan pidana (dan tindakan) dan penjatuhanannya bila kita kaitkan dengan peraturan yang dicita-citakan secara khusus mengatur tentang anak, maka perubahan tidak terlepas dari pasal-pasal yang tertuang dalam Naskah Rancangan KUHP (baru) dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam Naskah Rancangan Kitab UUHP (baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU-KUHP tahun 1991/1992, yang disempurnakan oleh : Tim kecil sampai dengan 13 Maret 1993, tentang Pidana dan Tindakan Anak diatur pada Pasal 99 sampai Pasal 112 RKUHP. Jenis pidana yang dimaksud, tercantum dalam Pasal 99 yang berbunyi :

(1). Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- ke – 1. Pidana Nominal :
  - a. Pidana Peringatan ;
  - b. Pidana teguran keras.
- ke – 2. Pidana dengan Syarat :
  - a. Pidana Pembinaan di luar lembaga ;
  - b. Pidana Kerja Sosial ;
  - c. Pidana Pengawasan.
- ke – 3. Pidana Denda.
- ke – 4. Pidana Pembatasan Kebebasan :
  - a. Pembinaan di dalam lembaga ;
  - b. Pidana Penjara ;
  - c. Pidana Tutupan.

(2). Pidana Tambahan :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan ;
- b. Pembayaran ganti kerugian ;
- c. Pemenuhan kewajiban adat.



Dalam RKUHP – pun diatur tentang Tindakan yang tertuang dalam Pasal 111 (94 p), yakni :

- (1). Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang memenuhi Pasal 38 dan Pasal 39, berupa :

- ke – 1. Perawatan di rumah sakit ;
- ke – 2. Penyerahan kepada pemerintah ;
- ke – 3. Penyerahan kepada seseorang.

Ketentuan dalam Pasal 91, sepanjang dapat diberlakukan untuk anak, berlaku pula di sini.

- (2). Hakim dapat menjatuhkan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak berupa:
  - a. Pengembalian kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya ;
  - b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang ;
  - c. Keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta ;
  - d. Pencabutan surat ijin mengemudi ;
  - e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
  - f. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana ;
  - g. Rehabilitasi ;
  - h. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Ketentuan dalam Pasal 92, sepanjang dapat diberlakukan untuk anak, berlaku pula di sini. Dalam kaitan dengan materi tindakan terhadap anak pada Pasal 111 ini ((1) dan (2)), maka kita perhatikan 2 pasal yang disebut. Yaitu Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 91 mengatur :

- 1). Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa diputus oleh hakim setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berada dalam keadaan yang berbahaya ;
- 2). Pembebasan dari tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa diputus oleh hakim dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut ;
- 3). Tindakan berupa penyerahan kepada pemerintah dapat diputus oleh hakim, baik terhadap pembuat tindak pidana dewasa maupun anak-anak ;
- 4). Tindakan berupa penyerahan kepada pemerintah bagi orang dewasa diputus oleh hakim demi kepentingan keamanan masyarakat, sedangkan bagi anak-anak demi kepentingan anak yang bersangkutan ;
- 5). Apabila penyerahan kepada pemerintah diputus oleh hakim, ia menentukan dimana dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan ;

- 6). Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang dapat diputus oleh hakim, baik terhadap pembuat tindak pidana dewasa maupun anak-anak. Hakim menentukan kepada siapa dan bagaimana tindak pidana tersebut harus dijalankan.

Pasal 92 mengatur :

- (1). Tindakan berupa pencabutan SIM diputus oleh hakim setelah mempertimbangkan baik keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan maupun yang menyertai pembuat tindak pidana ;
- (2). Tindakan berupa pencabutan SIM diputus oleh hakim setelah mempertimbangkan apakah pemilikan SIM tersebut berkaitan dengan usaha mencari nafkah si pembuat tindak pidana ;
- (3). Dalam hal si pembuat tindak pidana memiliki SIM yang dikeluarkan oleh negara lain, tindakan berupa pencabutan SIM dapat digantikan dengan larangan menggunakan SIM tersebut di wilayah Republik Indonesia ;
- (4). Jangka waktu pencabutan SIM berlaku antara 1 sampai 5 tahun ;
- (5). Segala keuntungan yang diperoleh pembuat tindak pidana dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, baik berupa uang, barang maupun keuntungan lain, harus dirampas oleh negara ;
- (6). Dalam hal keuntungan tersebut berupa uang, pembuat dapat menggantikannya dengan uang sejumlah harga taksiran yang ditentukan oleh hakim ;
- (7). Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat diputuskan oleh hakim, baik berupa perbaikan, penggantian, maupun perintah untuk membayar harga taksiran kerusakan akibat tindak pidana tersebut ;
- (8). Tindakan berupa latihan kerja diputus oleh hakim, baik dengan pertimbangan agar pembuat menjadi orang yang rajin, tekun, dan menghargai pekerjaan maupun untuk mempersiapkan pembuat agar mudah memperoleh lapangan pekerjaan dikemudian hari ;
- (9). Tindakan berupa latihan kerja diputus oleh hakim dengan mempertimbangkan pula kemampuan, latihan kerja yang pernah dilakukan, pekerjaan dan tempat tinggal pembuat ;
- (10). Tindakan berupa rehabilitasi terutama ditujukan kepada si pembuat yang mengidap kecanduan alkohol, obat keras, narkotika, kelainan seksual, dan kelainan jiwa, demi keamanan masyarakat ;
- (11). Tindakan berupa rehabilitasi dilakukan di dalam suatu lembaga pengobatan dan pembinaan, baik swasta maupun pemerintah ;
- (12). Tindakan perawatan di dalam suatu lembaga dapat diputus oleh hakim, baik terhadap narapidana anak maupun narapidana dewasa ;
- (13). Dalam hal tindakan perawatan di dalam suatu lembaga dijatuhkan kepada narapidana dewasa, pertimbangan hakim harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana itu sebagai kebiasaan, sedangkan bilamana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak, dasar pertimbangan dari putusan hakim

adalah untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan.

Dalam Rancangan KUHP (Baru) ini, ada hal-hal baru yang menarik untuk dikemukakan berkenaan dengan pemidanaan yang tidak akan ditemui pada hukum positif kita, antara lain :

1. Anak pelaku yang belum mencapai umur 12 tahun tidak dapat dipertanggung jawabkan (Pasal 96 ayat 1), dan hanya berlaku pada anak berusia antara 12 hingga 18 tahun (ayat 2).
2. Penerapan pidana pembatasan kebebasan, adalah merupakan upaya terakhir, khususnya terhadap tindak pidana berat atau yang disertai dengan kekerasan (Pasal 106 ayat 1).  
Hal ini merupakan implementasi ketentuan universal yang terdapat dalam dokumen Internasional.<sup>73</sup>
3. Maksimum pidana pembatasan kebebasan yang dikenakan adalah selama-lamanya seperdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 106 ayat 3).
4. Apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun (Pasal 108 ayat 2).

Pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997, banyak pihak menganggap sebagai suatu langkah pembangunan di bidang hukum (dikhhususkan terhadap anak bermasalah kelakuan) yang patut

---

<sup>73</sup> Lihat *Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Pasal 19.1 ; juga Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty pada point 1.1 dan 1.2.

dipuji. Walaupun pada saat ini telah berlaku – hanya masih dalam masa transisi dan belum efektif secara menyeluruh - namun dengan disahkannya undang-undang tersebut, merupakan implementasi niat baik pemerintah untuk membentuk kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah. Banyak kemajuan yang dicapai dengan diterbitkannya undang-undang ini, namun bagian ini hanya akan membatasi berkaitan dengan hukum pidana material, sementara mengenai hukum pidana formal akan dibahas pada bagian selanjutnya. Dalam undang-undang ini, pengaturan tentang pidana dan tindakan tertuang dalam Bab III Pasal 22 sampai Pasal 32. Tentang pidana yang dapat dijatuhkan pada anak, Pasal 23 mengatur :

- (1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. Pidana penjara ;
  - b. Pidana kurungan ;
  - c. Pidana denda ; atau
  - d. Pidana pengawasan.
- (3). Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Anak Nakal, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, Pasal 24 mengatur :

- (1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh ;
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

### 3. **Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) dalam Konteks Hukum Pidana Formal.**

Dalam pembahasan terdahulu, kita telah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Sistem Hukum Indonesia mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari sisi hukum pidana materialnya. Lebih lanjut, kita akan melihat juga bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak (pelaku) dilihat dari hukum pidana formal, yaitu perlindungan hukum terhadap anak (pelaku) dalam proses peradilan pidana.

Sebagaimana kita pahami, bahwa seorang anak yang karena sifat dan keadaannya yang melekat padanya, memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan (tindakan-tindakan) yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito.<sup>74</sup> Walaupun secara sekilas seorang dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak maka pada umumnya keadaan sekitar yang menimpa pada dirinya akan lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya daripada nilai pribadinya.

Anak-anak yang melakukan kenakalan/tindak pidana memerlukan suatu penanganan tersendiri, yang amat berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa. Mengenai perlunya penanganan khusus (Peradilan Anak) ini ditegaskan oleh Mason P. Thomas, sebagai berikut :

“legislature have passed laws to establish a separate court system for children under certain ages because youths should not held accountable under the same standards as adults, and because there may be a better chance of reform or rehabilitation with young people”.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Dokumen Dasar Sistematis Rancangan UU Tentang Peradilan Anak*, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 69.

<sup>75</sup> Mason P. Thomas dalam Robert C. Trojanowicz dan Merry Morash, *Juvenile Delinquency Concept and Control*, Third Edition, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, 1983, hal. 380.

Penyelenggaraan proses peradilan anak sebagai suatu sistem, harus berorientasi pada kepentingan hari depan anak, karena anak nakal pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi-kondisi jiwa, dan alam fikirannya. Untuk itu yang diperlukan dalam penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan keseimbangan jiwa anak. Mengembalikan kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku adalah berbeda dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa (pelaku). Oleh sebab itu wajarlah apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan anak, seperti yang sering terungkap didalam berbagai pernyataan, antara lain :

1. Anak yang melakukan kenakalan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang ;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.<sup>76</sup>

Schubungan dengan proses stigmatisasi sebagaimana disebutkan di atas, secara teoritis dikupas dalam teori Labelling, yang pertama kali dikemukakan oleh Howard Becker, bahwa :

“Kejahatan bukan kualitas perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang “pelanggar”.

---

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan, Bunga Rampai Hukum Pidana, op.cit., hal. 115.

sedangkan penjahat adalah seseorang yang kepadanya label tersebut telah berhasil dikenakan kepada masyarakat.”<sup>77</sup>

Oleh karena itu, menurut I.S. Susanto bahwa perspektif labelling adalah mempermasalahkan peranan orang lain yakni penegak hukum, dalam menjadikan seseorang sebagai “penjahat”. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak pelaku, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah bagaimana usaha untuk menjauhkan anak dari kondisi labelling (stigma jahat) tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, anak-anak yang berhubungan dengan proses peradilan, haruslah dijamin dan dilindungi sejak saat sebelum sidang, pada saat sidang, maupun sesudah sidang peradilan ; baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban, terlebih sebagai terdakwa/tertuduh.

Sehubungan dengan hal itu, maka ada beberapa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana/kenakalan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu antara lain :

1. Sebelum persidangan :
  - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah ;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya) ;
  - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo ;
  - d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

<sup>77</sup> Lihat I.S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi*, Disertasi, Unpublished, 1990, hal. 37.

2. Selama persidangan berhak untuk mendapatkan :
  - a. Penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya ;
  - b. Pendamping, penasihat selama persidangan ;
  - c. Fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan) ;
  - d. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
3. Setelah persidangan :
  - a. Pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
  - b. Perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan moral, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
  - c. Kesempatan tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarga.<sup>78</sup>

Apabila ditelaah, praktik peradilan anak di Indonesia selama ini – sebelum berlaku secara efektif UU No. 3 tahun 1997 - belum mempunyai perundang-undangan yang khusus, karena kecenderungan yang terjadi bahwa aparat hukum melandaskan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP) yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Secara khusus ketentuan KUHAP hanya mengatur 2 pasal saja, yaitu Pasal 153 ayat 3 dan 5 dan Pasal 171. Dalam Pasal 153 ayat 3 dan 5 mengatur kemungkinan diberlakukan sidang tertutup, sepanjang terdakwaanya seorang anak ; dan dalam sidang terbuka,

---

<sup>78</sup> Arief Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 50.



hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun, tidak diperkenankan menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171 KUHAP mengatur tentang anak yang belum cukup umur 15 tahun dan belum pernah kawin dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah.

Dasar penyelenggaraan sidang anak, selain hukum acara yang diperuntukkan bagi orang dewasa (KUHP), juga mengikuti petunjuk/pedoman dalam bentuk Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan Negeri Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Apa yang tertuang dalam SE MA No. 3 Tahun 1959 adalah sebagai berikut :

- (1). Perkara Anak disidangkan.
  - Terpisah dari orang dewasa.
  - Pada hari tertentu saja.
  - Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
- (2). Baik hakim, polisi, dan jaksa dalam sidang anak ini tidak memakai toga/pakaian dinas masing-masing.
- (3). Sidang selalu bersifat tertutup, wartawan tidak diperbolehkan hadir dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup, publikasi pun dilarang.
- (4). Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi si anak, misalnya keadaan di rumah, untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan si anak.
- (5). Sejak dari penyelidikan oleh pihak Kepolisian telah diambil langkah pengkhususan, misalnya :
  - Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri terpisah dari bagian untuk dewasa,
  - Tempat penahanan terpisah dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
- (6). Oleh Kejaksaan ditunjuk Jaksa Khusus sebagai Penuntut untuk Perkara Anak.
- (7). Dalam sidang perkara anak diikut sertakan seorang *Social Worker* (Petugas Sosial) yang dahulu ditangani oleh Departemen Sosial sekarang diserahkan kepada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Departemen Kehakiman.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Balai BISPA adalah unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasayarakatan yang bertugas sebagai Pembimbing Kemayarakatan untuk membuat Laporan Sosial ("*Case Study*") berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 06.UM.01.06 Tahun 1983 Pasal 12 ayat (2), yang diubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.03.UM.01.03 Tahun 1991. Laporan Sosial tersebut berisi :

1. Keterangan identitas klien ;
2. Identitas keluarga (struktur keluarga) ;
3. Masalah/keluhan/penyajian masalah ;
4. Data tentang riwayat klien dalam hubungan dengan keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lingkungannya

Lebih lanjut dalam Peraturan Menkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidang diatur bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan hakim majelis. Pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum bersidang tanpa toga. Dalam sidang anak, anak diperiksa dengan kehadiran orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada prinsipnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PW.07.10 Tahun 1997, tidak berbeda dengan Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983.

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Anak (Pelaku) dalam Konteks Hukum Pelaksanaan Pidana**

Yang tak kalah pentingnya dalam membahas perlindungan hukum bagi anak dilihat dari sudut Politik Kriminal, adalah bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan pada si anak. Ini dapat dipahami karena antara Hukum Pidana Material, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- 
5. Analisa, kesimpulan, dan saran hingga akhirnya Laporan Sosial tersebut mencantumkan seperti yang tertuang dalam Pasal 12 (3) PerMenKeh, yaitu :
    - a. Keadaan anak, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi ;
    - b. Keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh serta penghuni lainnya
    - c. Keterangan mengenai kelakuan anak di sekolah atau ditempat pekerjaan ;
    - d. Hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungan seperti RT, kepramukaan.

Dengan di undangkannya UU No. 3 Tahun 1997, peraturan tersebut diubah menjadi Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, dan menggantikan Unit BISPA menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstrekungsrecht*) bagi anak pelaku tindak pidana/kenakalan usia muda, berdasarkan pengamatan khusus untuk hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang dewasa, dikemukakan oleh Soedarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana" sebagai berikut :

"... kita belum punya UU pelaksanaan pidana (*strafvollzug*). Yang ada adalah *Gestichtenreglement* (stb 1917 - 708) yang telah mendapat perubahan. *Dwang opvoeding regelling* (stb 1917 - 741) dan *Voorzieningen betreffende Landswekinrichtingen* (stb 1936 - 160). Aturan-aturan ini mengatur tentang pelaksanaan pidana penjara, kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 16 tahun dan tindakan terhadap tunakarya yang malas bekerja dan tanpa penghasilan, yang mengganggu ketertiban umum dengan meminta-minta dan bergelandangan atau tindak laku yang asosial".<sup>80</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam kaitan dengan masalah penanganan anak lewat jalur penal (hukum pidana) aturan perundang-undangnya masih bersifat fragmentaris.<sup>81</sup> Bila diukur dari kriteria yang lazimnya dipakai dalam konteks kebijakan hukum pidana dimana di dalamnya tercermin adanya hukum pidana anak material, hukum pidana anak formal, dan hukum pelaksanaan pidana anak. Perangkat perundang-undangan yang tersedia dalam kaitan dengan masalah penanganan tindak pidana anak bila diukur dari kelompok hukum pidana itu sangat kurang memadai.

#### E. PERLINDUNGAN, HUKUM ANAK BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF DOKUMEN INTERNASIONAL

Kalau pada pemaparan terdahulu kita telah mengkaji perlindungan hukum bagi anak baik dilihat dari hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan

<sup>80</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 59.

<sup>81</sup> Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal. 153.

pidana yang berlaku di Indonesia, pembahasan selanjutnya pada bagian ini akan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak tersebut dalam perspektif instrumen internasional. Pembahasan ini dianggap penting karena sebagai suatu bangsa yang beradab dan merupakan bagian dari peradaban dunia, sepatutnya kalau kita tidak akan memalingkan muka terhadap pedoman-pedoman/kerangka-kerangka sebagai suatu komitmen internasional yang berlaku universal.

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Secara Umum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>82</sup>

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah perlindungan anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini, antara lain .<sup>83</sup>

- a. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 Nopember 1959 mengenai "*Declaration of the Rights of the Child*";
- b. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" ("*The Beijing Rules*") ;

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 153

<sup>83</sup> Ibid

- c. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 Nopember 1985 mengenai *"the prevention of juvenile delinquency"* ;
- d. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *"Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally"* ;
- e. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *"the use children in the illicit traffic in narcotic drugs"* ;
- f. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 mengenai *"Convention of the Rights of the Child"*, (Pada tanggal 26 Januari 1990, 61 negara telah menandatangani termasuk Indonesia dan pada tanggal 25 Agustus 1990, telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *"Pengesahan Convention on the Rights of the Child"* – pen ) ;
- g. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *"The prevention of drug consumption amog young persons"* ;
- h. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency"* (*The Riyadh Guidelienes*) ;
- i. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty"* ;

- j. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *"The Instrumental Use of Children in Criminal Activities"* ;
- k. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai *"The application of international standards concerning the human rights of detained juveniles"* ;
- l. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"The need to adopt effective international measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography"* ;
- m. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"The Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography"* ;
- n. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"The plight of street children"* ;
- o. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *"the effects of armed conflicts on children's lives"* ;
- p. Dalam Kongres PBB ke-IX Tahun 1995 mengenai *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"*, diajukan dua *"draft resolution"* mengenai :

1. *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice* (Dokumen A/CONF.169/L.5).
2. *Elimination of Violence against Children* (Dokumen A/CON.169/L.11).

Dokumen ini pada prinsipnya berisikan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental<sup>84</sup>; himbauan kepada negara anggota, yaitu antara lain : diadopsinya sanksi-sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak; bekerjasama dalam bentuk hubungan bilateral, regional, multilateral untuk mendukung legislasi tentang kekerasan terhadap anak; pemotivasian media massa untuk bekerja sama melakukan penurunan tingkat kekerasan terhadap anak, berperan dengan cara lain untuk membasmi kekerasan terhadap anak dan peningkatan perhatian agar anak memiliki kepercayaan diri.

## **2. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Bermasalah Kelakuan.**

Berbagai dokumen internasional yang tersebut diatas merupakan instrumen internasional yang mengatur tentang hak-hak anak pada umumnya beserta perlindungannya. Dalam kajian yang lebih khusus, instrumen-instrumen internasional yang diarahkan untuk melindungi hak-hak anak bermasalah, yaitu anak-anak yang berperilaku bertentangan dengan norma hukum (pidana), telah dimulai semenjak tahun 1924 (Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak) kemudian Deklarasi Hak Anak Tahun 1958 dan berbagai Kongres PBB tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku" yang ke I sampai IX.

Pada Kongres PBB tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku" ke-IX yang diselenggarakan pada tanggal 29 April – 8 Mei 1995 di Kairo – Mesir, dalam Draft Resolusi No. A/CON/169/L.5 termasuk 3 instrumen yang dianggap penting untuk diperhatikan

dalam pembicaraan tentang perlindungan hak-hak anak bermasalah, yaitu : (1). The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (*The Riyadh Guidelines*) ; (2). The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*the Beijing Rules*) ; (3). The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty. Berikut ini akan kita sajikan secara berurut :

(1). UNITED NATIONS GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY (THE RIYADH GUIDELINES)

Instrumen internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112. tanggal 14 Desember 1990, yang terdiri dari 66 butir sebagai pedoman dalam kerangka pencegahan "*Juvenile delinquency*" dan "*Youth crimes*".

Apa yang tertuang dalam Resolusi tersebut, secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut :

- (1). Pencegahan *Juvenile Delinquency* merupakan bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat ;
- (2). Pengembangan sikap non-kriminogen di kalangan anak dan di masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi ;
- (3). Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak-anak remaja tidak harus dijadikan obyek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga



pemahaman bahwa anak-anak remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasi dan penghukuman ;

- (4). Penyusunan Kebijakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang sistematis, dan menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif dalam usaha-usaha pencegahan *juvenile delinquency*. Kebijakan itu hendaknya tersusun dalam suatu program, dimana generasi muda dilibatkan didalamnya (agar timbul *self respect* di kalangan mereka). Program itu mengatur tentang mekanisme, pengkoordinasian lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
- (5). Kebijakan yang telah tersusun hendaknya di dalamnya terkandung rencana dan program-program strategis dalam rangka penanggulangan *juvenile delinquency* baik melalui Sistem Peradilan Anak maupun tidak lewat Sistem Peradilan Anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, dan itupun hanya untuk jangka pendek.
- (6). Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui keluarga, masyarakat, peer group, sekolah-sekolahan dan tempat-tempat pelatihan-pelatihan vokasional, organisasi-organisasi sukarela, media massa.
- (7). Perundang-undangan yang disusun untuk mendukung kebijakan tersebut hendaknya terkandung aturan-aturan pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius, dan ada ketentuan tentang kriteria-kriteria penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah atau hukuman sekolah.
- (8). Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimplementasian Resolusi ini, hendaknya UN Declaration of Human Rights ; the International Covenant on Economic, Social

and Cultural Rights ; the International Covenant on Civil and Political Rights, the Declaration on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child serta UN SMR-JJ, dijadikan kerangka acuan pada satu pihak, dan kondisi sosial, ekonomi, budaya negara anggota pada lain pihak.

- (9). Erat dengan penafsiran dan pengimplementasian ini dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga memahami betul dunia anak dan remaja, di samping itu dibentuk pula lembaga *ombudsman* yang independent untuk mengawasi pengimplementasian Resolusi ini.<sup>85</sup>
- (2). UNITED NATIONS STANDARD MINIMUM RULES FOR THE ADMINISTRATION OF JUVENILE JUSTICE (BEIJING RULES)

Instrument Internasional ini disetujui pada tanggal 6 September 1985 sebagai hasil dari pertemuan di Beijing, China pada tanggal 14-18 Mei 1984, yang kemudian dipresentasikan oleh Dewan Ecosoc PBB dalam Kongres PBB ke-VII di Milan-Italia pada bulan Agustus-September 1985. Beijing Rules ini kemudian dijadikan Resolusi PBB pada tanggal 29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33.

UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (selanjutnya disingkat SMR-JJ) ini secara keseluruhan terdiri dari 6 bagian : Bagian I General Principles terdiri dari 9 sub-bagian ; Bagian II Investigasi dan Penuntutan terdiri dari 4 sub-bagian ; Bagian III Adjudication and Disposition terdiri dari 9 sub-bagian ; Bagian IV Pembinaan Luar Lembaga terdiri dari 3 sub-bagian ; Bagian V Pembinaan Dalam Lembaga terdiri dari 4 sub-bagian ; dan Bagian VI Penelitian, Perencanaan, dan Evolusi terdiri dari 1 sub-bagian.

---

<sup>85</sup> Paulus Hadisuprpto, op.cit., hal. 105-106.

Ke-6 bagian dalam Resolusi PBB ini, terkandung dalam uraian-uraian sebagai berikut :

- (1). Kebijakan Sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya Kesejahteraan Anak perlu dilakukan, dengan tersusunnya Kebijakan Sosial yang demikian pada gilirannya akan mengurangi keterlibatan dan campur tangan Sistem Peradilan Anak. Pemberian perhatian dan pengambilan tindakan terhadap anak dan remaja sebelum terlibat perilaku penyimpangan dan kejahatan perlu dilakukan. Kebijakan Dasar yang terkandung dalam Resolusi ini ialah anak terselamatkan dari penerapan Resolusi ini.
- (2). *Juvenile* adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa, *offence* adalah perilaku yang dapat dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. *Juvenile Offender* adalah anak atau remaja yang telah melanggar atau diketahui melakukan pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.
- (3). Pengkategorisasian jenis penyimpangan dan kejahatan anak hendaknya dirumuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.
- (4). Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya diterapkan dengan pendekatan modern, yaitu dengan mengacu pada kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan.

terciptanya usaha pembinaan anak dalam Lembaga. Satu hal yang penting diperhatikan dalam kaitan ini ialah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orang tua dan penasihat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.

- (8). Pelepasan Bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, di samping perlunya dipikirkan dibentuknya tempat pembinaan anak yang bersifat semi-Lembaga.<sup>85</sup>

(3). UNITED NATIONS RULES FOR THE PROTECTION OF JUVENILE DEPRIVED OF THEIR LIBERTY

Instrumen Internasional ini termuat dalam Resolusi PBB 45/113 yang berlaku tanggal 14 Desember 1990. Pada intinya, ketentuan ini merupakan pemantapan standard minimum bagi perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan berlandaskan hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan anak dari efek samping segala bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak ke dalam masyarakat.

Resolusi PBB 45/113 ini terbagi menjadi 4 bagian, yang secara garis besar memuat:

- (1). Resolusi ini merupakan wujud pemantapan Standard Minimum perlindungan anak yang dirampas kemerdekaannya, sekaligus juga diperuntukkan sebagai bahan acuan para penegak hukum yang berurusan dengan peradilan anak. Oleh karenanya Resolusi ini hendaknya diterapkan secara utuh, tanpa diskriminasi, dan tetap berpegang pada asas penghormatan konsep moralitas anak. Atas dasar itu, maka Resolusi ini hendaknya diwujudkan di kalangan negara anggota dalam wujud undang-undang yang diberlakukan untuk penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan anak.

---

<sup>85</sup> Ibid, hal. 113-115.

- (2). Pengimplementasian Resolusi ini hendaknya tetap mengacu pada *Beijing Rules*, konsisten dengan ketentuan *Beijing Rules*, maka perampasan kemerdekaan anak hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan itupun hanya untuk jangka pendek.
- (3). Anak menurut Resolusi ini ialah seseorang yang berusia 18 tahun. Batas usia minimal bagi seseorang anak yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang. Sementara yang dimaksudkan dengan perampasan kemerdekaan ialah setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam Lembaga Koreksi di mana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas dasar perintah Lembaga Pengadilan, Administratif atau Lembaga Publik lainnya.
- (4). Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak asasi anak, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self-respect* pada diri anak, dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat.
- (5). Dalam hal perampasan kemerdekaan anak semata-mata demi penundaan sidang sedapat mungkin harus dihindarkan. Kalaupun terpaksa, maka pada satu pihak anak tetap harus dianggap tak bersalah, dan ditempatkan terpisah dengan anak pelaku kejahatan, didampingi penasihat hukum secara gratis dan tetap dijamin privacy-nya. Pada lain pihak petugas harus sesegera mungkin melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasusnya, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam tahanan.

- (6). *Records* yang berisi laporan tentang anak harus dibuat dirahasiakan dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Dalam hal ada laporan yang salah, maka anak diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Setelah anak bebas, maka catatan itu harus disegel dan jangka waktu tertentu dihilangkan/dihapus.
- (7). Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan, dalam rangka penentuan tempat penahanannya, jenis dan tingkat perlakuan, serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi anak.
- (8). Program-program yang ada harus tetap memperhatikan kemungkinan pengintegrasian anak dalam masyarakat. Bila anak berusia sekolah, maka perlu diberi kesempatan baginya untuk menikmati pendidikan, pelatihan vokasional, pemberian waktu untuk rekreasi di udara terbuka perlu selalu diprioritaskan.
- (9). Laporan tentang kesehatan fisik dan mental anak hendaknya selalu dibuat dan disampaikan pada orang tua. Pada kesempatan tertentu anak hendaknya tetap diberi kesempatan untuk menjenguk rumah, keluarganya, teman-teman dekatnya, kesemuanya untuk mendukung usaha-usaha pengintegrasian anak dalam masyarakat.
- (10). Penggunaan alat-alat paksaan fisik untuk tujuan apapun dilarang. Petugas dilarang menyandang atau menggunakan senjata.
- (11). Semua bentuk tindakan pendisiplinan harus secara tegas dinyatakan dalam aturan Tata Tertib Lembaga, yang mencakup kategori perilaku yang dapat dikenakan tindakan disiplin, tipe dan jangka waktu pendisiplinan, pihak yang berwenang menerapkan tindakan pendisiplinan, dan penarikan sanksi pendisiplinan.

(12). Perlunya ada petugas atau lembaga independent yang diberi kekuasaan untuk dengan bebas tanpa memberitahu dahulu untuk masuk ke dalam Lembaga, bertemu dengan petugas Lembaga Koreksi, dengan anak dan memeriksa fasilitas yang ada dalam Lembaga.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid, hal. 123-124.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM TENTANG KENAKALAN/KEJAHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTAMADIA PALEMBANG

Kejahatan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran kaedah sosial.<sup>1</sup> Karena itu, muncul dan berkembangnya kejahatan akan menjadi problem sosial<sup>2</sup>, dan akan mempengaruhi tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana kaedah tersebut berlaku. Dalam konteks yang demikian, supremasi hukum ditantang untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Hukum harus difungsikan sebagai *social control* dan *social engineering* dan diharapkan searah dengan pembangunan masyarakat yang disebut dengan proyek inovasi masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam kaitan dengan pernyataan di atas, pada bagian ini akan dibahas tentang apa dan bagaimana kejahatan – yang diartikan sebagai bentuk perilaku orang dewasa – dan kenakalan – yang diartikan sebagai bentuk perilaku anak/remaja – beserta penyelesaiannya (berupa sanksi hukuman) yang tertuang dalam bentuk data-data kriminalitas. Pemaparan data kriminalitas tersebut akan dibahas berurutan dengan melihat data yang ada secara nasional, dan kemudian

---

<sup>1</sup> Soedjono, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 38.

<sup>2</sup> Reinhard mengemukakan 3 ciri problem sosial, yaitu :

- a. terjadi dalam masyarakat;
- b. membawa akibat terhadap masyarakat;
- c. merupakan tanggung jawab masyarakat.

Reinhard dalam Drs. B. Simandjuntak, S.H., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, op.cit., hal. 2.

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 152.



data yang ada di Kotamadia Palembang sebagai lingkup penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

### 1. Data Kriminalitas : Suatu Kajian Tentang Statistik Kriminal

Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat (*recorded criminality*). Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat ataupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan sample (contoh) dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keseluruhan kriminalitas ini tidak pernah dapat diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui ini (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi tidak atau segan melaporkan) dinamakan kriminalitas yang tersembunyi (*hidden criminality* atau *dark number*).<sup>4</sup>

Pada pengertian yang lebih luas, statistik kriminal juga bersumber dari kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, selain dari kepolisian. Dalam kaitan dengan tujuan untuk keperluan pengukuran kriminalitas, statistik yang disusun berdasar kejahatan yang diketahui dan dicatat kepolisian-lah (*crimes known to the police*) yang terbaik. Antara lain, sebagai alasan yang dikemukakan adalah karena yang paling dekat dengan peristiwa terjadinya kejahatan (dalam ukuran proses waktu); dan diketahui bahwa makin jauh proses pencatatan kriminalitas tersebut dari peristiwa terjadinya, makin berkurang pula jumlahnya (*criminal case mortality*).<sup>5</sup> Menurut penulis, pendapat demikian sangatlah wajar karena memang aparat kepolisian-lah yang pertama kali (tonggak utama) – dalam rangkaian aparat penegak hukum –

<sup>4</sup> J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 28.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 31-32.

diberi kekuasaan untuk memproses ataupun tidak suatu perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun, aparat kepolisian pulalah – dengan kekuasaannya yang besar – yang dapat merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of power*) sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa "*power tend to corrupt*".<sup>6</sup>

Dalam hubungan dengan statistik kriminal, maka pada bagian ini akan dibahas tentang data kriminalitas di Indonesia pada umumnya dan Sumatra Selatan pada khususnya, yang diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta. Statistik kriminal yang dimaksud adalah bersumber dari data Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang terbatas pada tahun 1992, 1993, dan 1994.

Sumatra Selatan, yang berpenduduk 6.275.954 jiwa (Sensus 1990) dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 1980-1990 sebesar 3,15% dan luas wilayah 109.254 Km<sup>2</sup>. tercatat sebagai salah satu propinsi yang mempunyai tingkat kriminalitas yang patut dicermati. Ini terlihat dalam statistik kriminal dikaitkan dengan banyaknya tertuduh/terdakwa yang telah diajukan ke sidang pengadilan. Hanya saja pemahaman statistik kriminal tersebut harus dilihat sebagai data aktivitas aparat penegak hukum, dan bukan gambaran keadaan kriminalitas yang sebenarnya.

Dari jenis kejahatan yang terjadi, patut dicermatinya kriminalitas di Sumatra Selatan terlihat pada data proyeksi penduduk Indonesia menurut propinsi, akan didapatkan rasio perbandingan jumlah penduduk dengan angka kejahatan yang tercatat, yaitu terurai : tahun 1992 Sumatra Selatan dengan jumlah penduduk 6.697.600 jiwa (yang dihitung berdasar Sensus

---

<sup>6</sup> Ingat adanya kewenangan diskresi (*Power of Discretion*) bagi kepolisian, yang bertendensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan diri sendiri, kelompok, atau organisasi lain. M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 5.

1990), rasio perbandingan jumlah penduduk dengan angka kejahatan (sejumlah 4768 perkara, lihat Tabel I Lampiran) yaitu 1367 : 1. Ini berarti bahwa setiap 1367 orang melakukan 1 jenis kejahatan. Tahun 1993 Sumatra Selatan dengan jumlah penduduk 6.875.100 jiwa, rasio perbandingan jumlah penduduk dengan angka kejahatan (sejumlah 3288 perkara, lihat Tabel II Lampiran) yaitu 2036 : 1. Ini berarti bahwa setiap 2036 orang melakukan 1 jenis kejahatan. Tahun 1994 Sumatra Selatan dengan jumlah penduduk 7.053.500 jiwa, rasio perbandingan jumlah penduduk dengan angka kejahatan (sejumlah 4.041 perkara, lihat Tabel III Lampiran) yaitu 1701 : 1. Ini berarti bahwa setiap 1701 orang melakukan 1 jenis kejahatan. Sementara itu, data menunjukkan bahwa kejahatan yang tertinggi di Sumatra Selatan adalah pencurian dengan jumlah 2.621 perkara dari 4.768 perkara atau 54,97% di tahun 1992; 1.647 perkara dari 3.288 perkara atau 50,09% di tahun 1993; 1.890 perkara dari 4.041 perkara atau 46,77% di tahun 1994. Kejahatan penganiayaan adalah jenis ke-2 setelah pencurian yang harus dicermati dengan jumlah 614 perkara (12,88%) di tahun 1992; 507 perkara (15,42%) di tahun 1993; dan 902 perkara (22,32%) di tahun 1994.

Apabila dilihat dari jenis pidana/hukuman yang dijatuhkan, Sumatra Selatan secara umum – seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia – terkonsentrasi pada pidana penjara. Pada tahun 1992, pidana penjara berjumlah 4.138 atau 86,79% dari 4.768 pidana/hukuman (Lihat Tabel IV Lampiran); tahun 1993 pidana penjara berjumlah 2.893 atau 87,99% dari 3.288 hukuman yang ada (Lihat Tabel V Lampiran), dan tahun 1994 pidana penjara berjumlah 3.657 atau 90,5% dari 4.041 pidana hukuman (Lihat Tabel VI Lampiran).

Selanjutnya, dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh yang telah diajukan ke sidang pengadilan dalam kelompok umur tertentu, maka akan terurai secara berurut pada ke-3 Tabel di bawah ini :

**Tabel 1 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1992**

No.	Propinsi	Kurang dari 16 tahun	16 -20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak Jelas	Jumlah
1.	DI Aceh	16	187	593	-	796
2.	Sumatra Utara	50	392	1.233	-	1.675
3.	Sumatra Barat	100	554	1.754	20	2.428
4.	Riau	22	405	1.680	2	2.110
5.	Jambi	43	265	750	7	1.065
6.	Sumatra Selatan	231	1.352	3.148	37	4.768
7.	Bengkulu	60	390	684	2	1.136
8.	Lampung	59	453	1.311	103	1.926
9.	DKI Jakarta	46	1.022	3.614	6	4.688
10.	Jawa Barat	226	3.328	10.622	26	14.202
11.	Jawa Tengah	276	2.030	6.980	65	9.351
12.	DI Yogyakarta	7	206	494	-	707
13.	Jawa Timur	112	1.083	4.664	27	5.886
14.	Bali	12	172	694	4	882
15.	Nusa Tenggara Barat	119	832	2.311	42	3.304
16.	Nusa Tenggara Timur	26	173	788	2	989
17.	Timor Timur	6	230	784	8	1.028
18.	Kalimantan Barat	94	555	1.093	4	1.746
19.	Kalimantan Tengah	102	520	1.696	-	2.318
20.	Kalimantan Selatan	285	963	2.564	2	3.814
21.	Kalimantan Timur	221	582	1.875	2	2.680
22.	Sulawesi Utara	28	166	1.216	8	1.418
23.	Sulawesi Tengah	80	440	1.528	10	2.058
24.	Sulawesi Selatan	175	1.537	4.725	4	6.441
25.	Sulawesi Tenggara	8	114	344	-	466
26.	Maluku	12	258	914	-	1.184
27.	Irian Jaya	6	50	152	-	208
	<b>INDONESIA</b>	<b>2.422</b>	<b>18.260</b>	<b>58.211</b>	<b>381</b>	<b>79.274</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta

**Tabel 2 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1993**

No.	Propinsi	Kurang dari 16 tahun	16 -20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak Jelas	Jumlah
1.	DI Aceh	40	221	895	2	1.158
2.	Sumatra Utara	216	366	3.470	4	4.556
3.	Sumatra Barat	83	332	1.083	7	1.505
4.	Riau	47	320	1.206	2	1.575
5.	Jambi	30	180	500	3	713
6.	Sumatra Selatan	204	904	2.158	22	3.288
7.	Bengkulu	44	197	422	5	668
8.	Lampung	52	332	1.013	58	1.455
9.	DKI Jakarta	117	1.034	3.507	3	4.661
10.	Jawa Barat	201	2.043	6.794	20	9.058
11.	Jawa Tengah	241	1.709	6.824	32	8.806
12.	DI Yogyakarta	25	208	660	0	893
13.	Jawa Timur	215	1.297	6.887	64	8.463
14.	Bali	35	245	1.113	10	1.403
15.	Nusa Tenggara Barat	64	430	1.271	11	1.776
16.	Nusa Tenggara Timur	29	170	937	2	1.138
17.	Timor Timur	7	97	335	2	441
18.	Kalimantan Barat	92	345	928	4	1.369
19.	Kalimantan Tengah	89	308	966	2	1.365
20.	Kalimantan Selatan	181	700	1.866	7	2.754
21.	Kalimantan Timur	157	420	1.366	2	1.945
22.	Sulawesi Utara	41	183	975	10	1.209
23.	Sulawesi Tengah	41	227	788	63	1.119
24.	Sulawesi Selatan	184	1.109	3.558	16	4.867
25.	Sulawesi Tenggara	21	129	453	0	603
26.	Maluku	23	165	670	1	859
27.	Irian Jaya	34	142	533	3	712
	<b>INDONESIA</b>	<b>2.513</b>	<b>14.313</b>	<b>51.178</b>	<b>355</b>	<b>68.359</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta

**Tabel 3 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana kejahatan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut propinsi dan kelompok umur tahun 1994**

No.	Propinsi	Kurang dari 16 tahun	16 -20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak Jelas	Jumlah
1.	DI Aceh	50	307	1.428	0	1.785
2.	Sumatra Utara	137	857	3.554	0	4.548
3.	Sumatra Barat	51	284	1.015	0	1.350
4.	Riau	52	407	1.538	0	1.997
5.	Jambi	30	234	668	0	932
6.	Sumatra Selatan	215	1.121	2.705	0	4.041
7.	Bengkulu	48	227	493	0	768
8.	Lampung	36	341	1.470	0	1.847
9.	DKI Jakarta	118	1.275	4.299	0	5.692
10.	Jawa Barat	162	2.296	7.253	0	9.711
11.	Jawa Tengah	127	1.468	6.385	0	7.980
12.	DI Yogyakarta	36	267	854	0	1.157
13.	Jawa Timur	156	1.376	7.527	0	9.059
14.	Bali	36	305	1.622	0	1.963
15.	Nusa Tenggara Barat	43	324	871	0	1.238
16.	Nusa Tenggara Timur	31	216	1.235	0	1.482
17.	Timor Timur	3	60	239	0	302
18.	Kalimantan Barat	84	351	1.052	0	1.487
19.	Kalimantan Tengah	56	215	603	0	874
20.	Kalimantan Selatan	98	723	1.906	0	2.727
21.	Kalimantan Timur	131	570	1.660	0	2.361
22.	Sulawesi Utara	22	179	927	0	1.128
23.	Sulawesi Tengah	25	227	716	0	968
24.	Sulawesi Selatan	134	1.070	3.406	0	4.610
25.	Sulawesi Tenggara	20	195	707	0	922
26.	Maluku	28	217	920	0	1.165
27.	Irian Jaya	74	265	1.054	0	1.393
	<b>INDONESIA</b>	<b>2.003</b>	<b>15.377</b>	<b>56.107</b>	<b>0</b>	<b>73.487</b>

Dengan memperhatikan ke-3 tabel di atas, sesuai dengan objek dari penelitian ini, maka fokus selanjutnya akan kita bahas perihal anak-anak nakal yang diajukan ke sidang pengadilan yang berada dalam kelompok umur kurang dari 16 tahun, karena sesuai dengan norma hukum pidana kelompok umur demikianlah yang dimungkinkan untuk diberikan putusan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Pada tahun 1992, di Sumatra Selatan banyaknya terdakwa/tertuduh (laki-laki dan perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan yang berumur kurang dari 16 tahun sebanyak 231 anak. Ini berarti ada 4,8% dari keseluruhan perkara (dewasa dan anak) yang diajukan ke sidang pengadilan (4.768 kasus). Secara nasional, terhadap anak tertuduh yang berumur kurang dari 16 tahun di Sumatra Selatan tersebut berjumlah 9,54% dari seluruh anak dalam kelompok umur yang sama (2.422 anak). Dari keseluruhan kelompok umur tersebut, hukuman yang dijatuhkan hakim berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya berjumlah 67 anak (Lihat Tabel 4). Ini berarti bahwa hanya 2,77% dari keseluruhan anak dalam kelompok umur yang sama yang dijatuhi hukuman demikian di seluruh Indonesia.

**Tabel 4 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1992**

No.	JENIS PIDANA	Kurang dari 16 tahun	16 -20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak jelas	Jumlah
1.	Mati/Seumur hidup	0	0	0	0	0
2.	Penjara	1.782	16.368	48.055	310	66.515
3.	Kurungan	1	7	45	0	53
4.	Bersyarat/percobaan	489	1.615	6.695	37	8.836
5.	Denda	17	136	2.186	20	2.359
6.	Tambahan	0	0	0	0	0
7.	Dikembalikan kepada orang tua	67	2	0	0	69
8.	Diserahkan kepada Pemerintah	22	10	67	2	101
9.	Bebas dari segala tuduhan/ dilepaskan dari tuntutan	44	122	1.163	12	1.341
10.	Tidak jelas	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.422</b>	<b>18.260</b>	<b>58.211</b>	<b>381</b>	<b>79.274</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta

Pada tahun 1993, di Sumatra Selatan banyaknya terdakwa/tertuduh (laki-laki dan perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan pada kelompok umur kurang dari 16 tahun sebanyak 204 anak, yang berarti ada 6,20% dari keseluruhan perkara (dewasa dan anak) yang diajukan ke sidang pengadilan (3.288 perkara). Secara nasional, maka terhadap anak dalam kelompok umur kurang dari 16 tahun di Sumatra Selatan berjumlah 8,12% dari seluruh anak dalam kelompok umur yang sama (2.513 anak). Dari keseluruhan kelompok umur tersebut, hukuman yang dijatuhkan hakim berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya adalah sebanyak 31 anak (Lihat Tabel 5). Ini berarti bahwa hanya 1,23%



dari keseluruhan anak dalam kelompok umur yang sama yang dijatuhi hukuman demikian di seluruh Indonesia.

**Tabel 5 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1993**

No.	JENIS PIDANA	Kurang dari 16 tahun	16 -20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak jelas	Jumlah
1.	Mati/Seumur hidup	0	1	4	0	5
2.	Penjara	2.042	12.834	42.066	259	57.201
3.	Kurungan	5	37	150	5	197
4.	Bersyarat/percobaan	356	1.178	6.103	44	7.681
5.	Denda	19	124	1.787	26	1.956
6.	Tambahan	0	0	1	0	1
7.	Dikembalikan kepada orangtua	31	2	1	0	34
8.	Diserahkan kepada Pemerintah	14	6	29	0	49
9.	Bebas dari segala tuduhan/ dilepaskan dari tuntutan	46	131	1.037	21	1.235
10.	Tidak jelas	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.513</b>	<b>14.313</b>	<b>51.178</b>	<b>355</b>	<b>68.359</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta

Pada tahun 1994, di Sumatra Selatan banyaknya terdakwa/tertuduh (laki-laki dan perempuan) diajukan ke sidang pengadilan pada kelompok umur kurang dari 16 tahun sebanyak 215 anak, yang berarti bahwa ada 5,32% dari keseluruhan perkara (dewasa dan anak) yang diajukan ke sidang pengadilan (4.041 perkara). Secara nasional, maka terhadap anak-anak tersebut di Sumatra Selatan berjumlah 10,73% dari seluruh anak dalam kelompok umur yang sama (2.003 anak). Dari keseluruhan anak yang diajukan ke sidang pengadilan, putusan hakim berupa Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya adalah sebanyak 58 anak

(Lihat Tabel 6). Ini berarti bahwa hanya 2,89% dari keseluruhan anak dalam kelompok umur yang sama yang dijatuhi hukuman demikian di seluruh Indonesia.

**Tabel 6 : Banyaknya terdakwa/tertuduh laki-laki dan perempuan dalam perkara pidana yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan menurut jenis pidana dan kelompok umur tahun 1994**

No.	JENIS PIDANA	Kurang dari 16 tahun	16 --20 tahun	21 tahun dan lebih	Tidak jelas	Jumlah
1.	Mati/Seumur hidup	0	1	9	0	10
2.	Penjara	1.657	13.998	46.205	0	61.860
3.	Kurungan	10	73	323	0	406
4.	Bersyarat/percobaan	214	1.057	6.247	0	7.518
5.	Denda	21	115	2.242	0	2.378
6.	Tambahan	1	1	3	0	5
7.	Dikembalikan kepada orang tua	58	4	3	0	65
8.	Diserahkan kepada Pemerintah	18	9	38	0	65
9.	Bebas dari segala tuduhan/ dilepaskan dari tuntutan	24	119	1.037	0	1.180
10.	Tidak jelas	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.003</b>	<b>15.377</b>	<b>56.107</b>	<b>0</b>	<b>73.487</b>

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta

## 2. Deskripsi Kenakalan/Kejahatan di Kotamadia Palembang

Kotamadia Palembang sebagai salah satu dari 10 Kotamadia/Kabupaten di Sumatra Selatan, berpenduduk 1.140.918 jiwa (sensus 1990) dengan luas wilayah 244 Km<sup>2</sup>, mempunyai motto "Palembang Kota BART" (Bersih, Aman, Rapi, Indah). Dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 1981 jo Perda No. 8 Tahun 1987 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Surat Keputusan Walikota No. 100/KPTS/II/1988, adalah sebagai landasan yuridis untuk

mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dari pencanangan motto "Palembang Kota BART", maka secara idealistis – sosiologis masyarakat amat mendukung keamanan di wilayahnya. Namun kenyataannya – dengan semakin berkembangnya seluruh sendi-sendi kemasyarakatan dan heterogensitas penduduk di Palembang (agama, ras, suku, adat istiadat) – tingkat kejahatan masih cukup tinggi.

Untuk melihat seberapa besar tingkat kriminalitas di Palembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (Tahun 1994-1998), dapat terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 7 : Keadaan Kriminalitas di Kotanadia Palembang Menurut Daerah Sektor Kepolisian Tahun 1994-1998**

No.	POLSEKTA	CRIME TOTAL				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	IB – I	1.108	842	701	1.093	762
2.	IB – II	498	331	398	313	469
3.	IT – I	1.366	834	787	1.279	744
4.	IT – II	748	646	606	707	667
5.	SU – I	1.180	1.134	879	828	1.041
6.	SU – II	528	356	572	345	632
	JUMLAH	5.428	4.143	3.943	4.565	4.315

Sumber : Poltabes Palembang, 1999.

Dari tabel di atas, maka tingkat kerawanan tindak kriminal adalah daerah Polsekta Ilir Barat I (IB-I), Ilir Timur I (IT-I), dan Seberang Ulu I (SU-I).

Apabila data kriminalitas dilihat dari sudut kejahatan yang ada, maka kejahatan yang tertinggi adalah kejahatan terhadap harta benda (yaitu pencurian dengan pemberatan/curat,

pencurian dengan kekerasan/curas, pencurian kendaraan bermotor/curanmor) dan penganiayaan dengan pemberatan (anirat). Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 8 berikut :

**Tabel 8 : Keadaan Kriminalitas di Kotamadia Palembang Menurut Jenis Kejahatan Tahun 1994-1998**

No.	KEJAHATAN	CRIME TOTAL									
		1994		1995		1996		1997		1998	
		M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
1.	Curat	1.454	522	1.282	493	973	394	904	370	1.049	431
2.	Anirat	752	298	639	254	544	249	574	205	637	235
3.	Curas	298	87	364	127	323	113	429	129	304	87
4.	Curanmor	220	75	254	23	343	46	417	25	106	15
5.	Bunuh	29	16	25	22	15	8	24	24	29	10
6.	Pemerasan	36	25	47	30	46	22	59	25	29	14
7.	Culik	42	19	1	-	5	4	7	1	41	19
8.	Pemerkosaan	62	24	30	14	36	17	28	13	49	20
9.	Pembakaran/bakar	-	-	11	8	17	17	18	17	3	2
10.	Lundup	1	1	-	-	1	1	6	-	5	4
11.	Handak	3	1	-	-	3	2	9	-	1	1
12.	Narkotika	8	8	4	5	3	3	14	11	7	6
13.	Lain Kejahatan	2.533	2.488	1.486	1.817	1.634	1.139	2.076	1.273	2.055	1.667
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.428</b>	<b>3.565</b>	<b>4.143</b>	<b>2.793</b>	<b>3.943</b>	<b>2.015</b>	<b>4.564</b>	<b>2.022</b>	<b>4.315</b>	<b>2.511</b>

Sumber : Poltabes Palembang, 1999.

8

Menurut keterangan dari Kepala Satuan Reserse (Kasatserse) Palembang, Kapten Drs. Mudjiono<sup>7</sup>, bahwa ada beberapa daerah lokasi yang rawan kejahatan. Pada kecamatan Seberang Ulu I (SU-I), kerawanan pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan

<sup>7</sup> Kasatserse Poltabes Palembang Kapten Drs. Mudjiono, Wawancara Pribadi, Poltabes Palembang, 3 Maret 1999.

kekerasan (curas) terdapat di daerah 7, 8, 9 dan 10 Ulu; sedangkan kerawanan penganiayaan dengan pemberatan (anirat) yaitu di daerah 7 dan 8 Ulu dan Kertapati. Pada kecamatan Ilir Timur I (IT-I), kerawanan pencurian dengan pemberatan terdapat di daerah 20 Ilir I, II, III dan IV, kerawanan pencurian dengan kekerasan di daerah 20 Ilir III, sementara penganiayaan berat dianggap rawan pada daerah 20 Ilir I dan IV. Pada kecamatan Ilir Barat I, kerawanan pencurian dengan pemberatan terdapat di daerah Lorok Pakjo, dan kerawanan pencurian dengan kekerasan di daerah 19 Ilir dan sekitar Pasar Cinde, sementara kerawanan penganiayaan berat terdapat di daerah pemukiman rumah susun.

Apabila tingkat kriminalitas dilihat dari jenis kenakalan dalam kelompok usia – yang dalam penelitian ini difokuskan pada anak pelaku di bawah umur 16 tahun – didapatkan data – yang diolah dari data sekunder BAPAS Palembang – seperti yang tertuang pada tabel 9 berikut.

**Tabel 9 : Banyaknya anak tertuduh/terdakwa (laki-laki dan perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan berdasarkan jenis kenakalan di Kotamadia Palembang tahun 1994-1998**

No.	JENIS KENAKALAN	TAHUN				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	Pencurian	89	46	100	71	75
2.	Penganiayaan	8	4	9	8	2
3.	Pengeroyokan/Tawuran	11	9	8	9	4
4.	Senjata Tajam	8	7	3	6	7
5.	Kenakalan Lain	5	7	6	5	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>121</b>	<b>73</b>	<b>126</b>	<b>99</b>	<b>91</b>

Sumber : Data Diolah dari data sekunder Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang.

Dari tabel 9 di atas, kita jumpai bahwa pelanggaran hukum terhadap harta benda berupa pencurian yang terjabar dalam bentuk pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) merupakan persentase yang tertinggi dari seluruh perkara anak tertuduh/terdakwa yang diajukan ke muka sidang pengadilan yaitu : 73,55% (Tahun 1994); 70,30% (Tahun 1995); 79,23% (Tahun 1996); 75,52% (Tahun 1997); dan 82,42% (Tahun 1998). Dari keseluruhan jenis kenakalan (berupa tindak pidana), pada tahun 1994 pelanggaran terhadap pasal pencurian (89 kasus) terjabar menjadi : pelanggaran Pasal 362 sebanyak 38 perkara (31,40% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363 sebanyak 48 perkara (39,67%); dan pelanggaran Pasal 365 sebanyak 3 perkara (2,48%). Pada tahun 1995, dari seluruh pelanggaran pasal pencurian (46 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran Pasal 362 sebanyak 10 perkara (13,70% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363 sebanyak 35 perkara (47,95%); dan pelanggaran Pasal 365 hanya 1 perkara (1,37%). Pada tahun 1996, dari seluruh pelanggaran pasal pencurian (100 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran Pasal 362 sebanyak 21 perkara (16,67% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363 sebanyak 75 perkara (59,52%); dan pelanggaran Pasal 365 sebanyak 4 perkara (3,17%). Pada tahun 1997, dari seluruh pelanggaran pasal pencurian (71 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran Pasal 362 sebanyak 24 perkara (24,24% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363 sebanyak 43 perkara (43,43%); dan pelanggaran Pasal 365 sebanyak 4 perkara (4,04%). Dan pada tahun 1998, dari seluruh pelanggaran pasal pencurian (75 kasus), terjabar menjadi : pelanggaran Pasal 362 sebanyak 12 perkara (13,19% dari total perkara); pelanggaran Pasal 363 sebanyak 58 perkara (63,74%); dan pelanggaran Pasal 365 sebanyak 5 perkara (5,49%).

Menurut M. Harvey Brenner dalam bukunya berjudul *Effects of the Economy on Criminal Behavior and the Administration of Criminal Justice in the United States, Canada,*

*England and Wales, and Scotland* bahwa masalah kriminalitas yang berhubungan dengan faktor ekonomi, amat erat kaitannya dengan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ada 7 macam pandangan teoritis berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat, yang mencakup :<sup>8</sup>

- a. kemerosotan ekonomi;
- b. kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi ke sebagian besar penduduk;
- c. meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan di dalam sektor-sektor formal ekonomi;
- d. teori frustrasi-agresi;
- e. perkembangan penyimpangan sub budaya baik dalam nilai-nilai maupun dalam pola-pola normatif sebagai reaksi atau "reaksi-formasi" terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi;
- f. teori asosiasi-differensial; dan
- g. urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.

Teori-teori yang dikemukakan di atas, memang dapat berlaku bagi pelaku dewasa. Namun apabila akan kita terapkan pada anak-anak pelaku yang dari perkembangan fisik, jiwa, dan tingkat rasionya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, hal tersebut perlu dipertanyakan kembali dan membutuhkan penelitian khusus untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi perilaku mereka. Dari hasil wawancara dengan petugas Balai

---

<sup>8</sup> M. Harvey Brenner, *Effects of the Economy on Criminal Behavior and the Administration of Criminal Justice in the United States, Canada, England and Wales, and Scotland*, terjemahan D. Guritno, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 1.

Pemasyarakatan (Bimbingan Klien Anak), sepanjang pengetahuan dan pengalaman mereka<sup>9</sup>, perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak pelaku lebih didasarkan pada perbuatan yang dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan, yang mempengaruhi mereka untuk mendapatkan barang/uang secara mudah.

Dalam ilmu Psikologi Anak, anak-anak yang melakukan pencurian lebih didasarkan pada "keinginan untuk memiliki" – yang juga berlaku untuk orang dewasa – namun pada anak-anak hanya menginginkan sesuatu untuk dimilikinya tanpa melihat kegunaannya. Pada lapisan sosio-ekonomi yang rendah, keinginan untuk memiliki tersebut tidak disertai kemampuan untuk memenuhi sedemikian banyak keinginan, sehingga akan timbul berbagai macam pikiran (yaitu dalam lingkup alam pikiran anak – pen) untuk mencari cara-cara untuk memenuhinya.<sup>10</sup> Senada dengan ungkapan demikian, dari hasil wawancara dengan Kasatsersc Poltabes Palembang Kapten. Drs. Mudjiono bahwa anak-anak yang melakukan pencurian sebagian besar berasal dari daerah-daerah pinggiran kota Palembang, yaitu daerah-daerah yang kehidupan sosial ekonominya di bawah garis kemiskinan.

Apabila kita kembali pada Tabel 9 di atas, maka terlihat bagaimana deskripsi kualitatif tentang kenakalan anak/remaja di Palembang. Norma-norma hukum (pidana) yang sering dilanggar oleh mereka pada umumnya adalah pada pasal-pasal tentang :

- a. Pencurian (Pasal 362, 363 KUHP)
- b. Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)

<sup>9</sup> Nyimas Ayudah dan Ny. Rohani, Wawancara Pribadi, BAPAS Palembang Bagian Bimbingan Klien Anak, 14 Mei 1999.

<sup>10</sup> Ny. Singgih D. Gunarso, Psikologi Anak Bermasalah, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995, hal. 55.



c. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

d. Senjata Tajam (UU No. 12 Darurat Tahun 1951)

Delik pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak/remaja, tidak terkecuali di Palembang. Masalah kejahatan, khususnya pencurian bukan hanya menjadi milik masyarakat modern. Kejahatan pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak/remaja merupakan salah satu bukti adanya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Menurut Zakiah Darajat dalam bukunya *Kesehatan Mental*, menyatakan :

“... kenakalan anak-anak adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (*tension*), kegelisahan, dan kecemasan atau tekanan batin (*frustration*). Misalnya jika seorang anak dari orang yang kaya dan berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, maka kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan uang dari orangtuanya, akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasakan kasih sayang orang tua dan sebagainya.”<sup>11</sup>

Kenakalan remaja khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak/remaja sebagian disebabkan karena :

1. Keadaan ekonomi yang sangat parah. Anak-anak/remaja terpaksa melakukan kejahatan pencurian karena untuk menyambung hidupnya.
2. Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya didalam pesta pora, bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebih-lebihan terhadap ajakan kawan untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kejahatan.

---

<sup>11</sup> Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Cetakan Kedua, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 113.

Demikian pula yang terjadi di kalangan anak/ramaja. Kekerasan yang terjadi berawal dari provokasi korban kemudian tercetus rasa saling balas dendam dan berakhir dengan perkelahian satu melawan satu, atau kelompok melawan kelompok. bahkan dewasa ini yang menggejala adalah perkelahian antar anak-anak sekolah, yakni antar peserta didik sekolah dengan sekolah lainnya.

Yang menarik dalam kaitan dengan kualitas kenakalan di Palembang yaitu pelanggaran pasal tentang senjata tajam, yang secara kuantitas memiliki angka yang cukup untuk dicermati, yaitu : 8 kasus (6,61% dari 121 kasus anak) tahun 1994; 7 kasus (9,59% dari 73 kasus anak) tahun 1995; 3 kasus (2,38% dari 126 kasus anak) tahun 1996; 6 kasus (6,06% dari 99 kasus anak) tahun 1997; dan 7 kasus (7,69% dari 91 kasus anak) tahun 1998.

Faktor yang menyebabkan cukup banyaknya kuantitas kejahatan senjata tajam ini, menurut ahli Sosiologi lebih didasarkan pada sejarah pemanfaatan senjata tajam tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat Palembang, yang memang menurut sejarahnya dahulu dipergunakan untuk penjagaan diri dari ancaman binatang buas. Namun kenyataannya, pada saat ini "budaya" membawa senjata tajam tersebut -- biasanya berupa parang atau badik -- masih tetap dilakukan walaupun telah mengalami pergeseran nilai tentang segi kemanfaatannya. Karena itu, acapkali pihak keamanan (polisi) melakukan usaha-usaha pencegahan baik secara periodik/berkala ataupun situasional melakukan razia yang dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan.

### 3. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak di Kotamadia Palembang

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak-anak dan remaja, seyogyanya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya. Upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lain.

Kegiatan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kenakalan pada khususnya, dapat menggunakan hukum pidana (sarana penal), disamping dengan sarana-sarana lain bukan pidana (sarana non-penal). Dengan demikian bahwa penggunaan hukum pidana hanya merupakan salah satu cara dari penanggulangan kejahatan. Hanya saja para ahli sebenarnya lebih menyenangi kalau penggunaan sarana non-penal lebih besar porsinya dari sarana penal. Yang terpenting yang harus kita pahami bersama bahwa penegakan hukum pidana – yaitu dengan bekerjanya aparat hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak – adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap anak – yang dalam hal ini adalah anak yang mempunyai masalah kelakuan – yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan ungkapan di atas, pada bagian ini akan dibahas bagaimana penegakan hukum diberikan terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan, sebagai reaksi yang diberikan terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Dalam kaitan ini, akan kita lihat putusan-

---

<sup>14</sup> lihat kembali RAGAN 3

putusan yang diberikan hakim sebagai bentuk akhir dari kegiatan peradilan anak, yang terurai pada tabel berikut.

**Tabel 10. Banyaknya anak tertuduh/terdakwa (Laki-laki dan Perempuan) yang diajukan ke muka sidang pengadilan berdasarkan jenis hukuman di Kotamadia Palembang Tahun 1994-1998**

No.	JENIS HUKUMAN	TAHUN				
		1994	1995	1996	1997	1998
1.	Penjara :					
	• Kurang dari 1 tahun	102	58	101	83	78
	• 1 tahun – lebih	-	2	3	-	3
2.	Kurungan	-	-	-	-	-
3.	Bersyarat/Percobaan	4	4	5	6	1
4.	Denda	-	-	-	-	-
5.	Tambahan	-	-	-	-	-
6.	Dikembalikan pada Orang tua, Wali, atau Orang tua asuh	-	-	-	-	-
7.	Diserahkan pada Pemerintah	2	2	2	3	2
8.	Bebas dari segala tuduhan/lepas dari segala Tuntutan	-	-	-	-	-
9.	Tidak jelas	13	9	7	7	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>121</b>	<b>73</b>	<b>126</b>	<b>99</b>	<b>91</b>

Sumber : Data Diolah dari data sekunder Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang.

Dari tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa pemberian sanksi terhadap anak tertuduh/terdakwa yang telah melakukan kenakalan, tidak jauh berbeda dengan sanksi (pidana) yang diberikan pada orang dewasa. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara sangat mendominasi dari seluruh putusan yang diberikan hakim, yaitu : sebesar 84,30% dari seluruh jenis putusan di tahun 1994; sebesar 79,45% di tahun 1995; sebesar 88,09% di tahun

1996; sebesar 83,84% di tahun 1997; dan sebesar 85,71% di tahun 1998. Sementara itu ada kesepakatan nasional bahwa seorang anak adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri dan sifat khusus, yang berarti membutuhkan penanganan berupa pembinaan dan perlindungan yang khusus pula<sup>15</sup>, yang harus dibedakan dengan kebijakan-kebijakan bagi pelaku dewasa.

Dalam instrumen internasionalpun mengingatkan bahwa perampasan kemerdekaan atas anak adalah sebagai upaya terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Hal demikian dapat ditemui dalam Resolusi PBB 40/33 (*Beijing Rules*) dan Resolusi PBB 45/113 *United Nations Rules For the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*. Juga apabila kembali pada konsep-konsep/teori-teori yang berkaitan dengan putusan berupa perampasan kemerdekaan (*institutional/custodial*), kritikan dilontarkan tidak saja pada segi efektivitasnya yang oleh R. M. Jackson dikatakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif<sup>16</sup>, tapi juga pada segi-segi negatif yang ditimbulkan antara lain : terampasnya kehidupan seksual yang normal, terampasnya kemerdekaan, berakibat serius pada kehidupan sosial ekonomi keluarganya, dapat memberikan cap jahat (*stigmatisasi*)<sup>17</sup>, dan menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Baca Konsideran (a dan b) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>16</sup> R. M. Jackson dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal. 47.

<sup>17</sup> Samsul Wahidin dalam tulisannya berjudul *Stigmatisasi, Tantangan Eks Narapidana* menyatakan bahwa dalam suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 1995, ternyata 93% dari eks narapidana mengalami stigmatisasi, baik stigmatisasi sosial maupun stigmatisasi individual. Stigmatisasi sosial berkaitan dengan rasa keterasingan dengan lingkungan sosial, merasa dikucilkan, dan sulit menyesuaikan diri setelah eks narapidana kembali ke masyarakat. Stigmatisasi individual menjadikan jiwa eks napi menjadi lebih mudah tersinggung, dan amat rentan dengan hal-hal yang bersifat "penyerangan terhadap pribadi". *Suara Pembaharuan*, 14 Mei 1997, hal. 4.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal. 48.

Berkenaan dengan pemaparan di atas, maka suatu hal yang perlu dipertanyakan dan dicari jawabannya adalah mengapa alternatif hukuman berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya – yang memang merupakan bentuk sanksi khusus bagi anak – sama sekali tidak pernah diberikan dalam menghadapi kasus-kasus kenakalan anak (berupa tindak pidana) di Palembang. Apakah putusan itu berkaitan dengan diri hakim sendiri, dalam artian putusan yang sudah “membudaya” dikalangan hakim; apakah berkaitan dengan proses peradilan pidana anak (*criminal justice process*); atau berkaitan dengan aparat hukum lain yang berkaitan dengan sistem peradilan anak (struktur hukum). Untuk itu akan kita bahas pada bagian-bagian berikut dari tulisan ini.

**B. FAKTOR PENYEBAB TIDAK BERFUNGSIONYA PUTUSAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH**

**1. Lembaga Pengembalian Kepada Orang tua, Wali, atau Orang Tua Asuh Sebagai Pengembangan Ide Subjektivitas Pelaku**

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara tegas dirumuskan bahwa anak-anak mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kebijakan politik yang demikian secara filosofis menuntut kepada seluruh komponen bangsa untuk berfikir dan bertindak secara cermat, hati-hati, dan terencana didalam menghadapi persoalan-persoalan yang tersangkut dengan diri pribadi anak-anak/remaja. Upaya peningkatan taraf perlindungan anak serta memajukan hak-hak mereka merupakan sebuah tantangan besar dalam beberapa dasawarsa mendatang.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25) – yang kemudian melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 telah disahkan – memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan anak, yaitu :

- Setiap anak secara kodrati memiliki hak hidup, dan setiap negara harus menjamin kehidupan dan perkembangannya secara maksimum.
- Setiap anak berhak atas nama dan kebangsaan kelahirannya.
- Bila pengadilan, lembaga sosial, dan pemerintah berurusan dengan anak, hendaknya kepentingan anak yang terbaik menjadi pertimbangan utama. Pikiran anak harus diperhatikan secara seksama.
- Setiap negara harus menjamin agar setiap anak menikmati haknya secara utuh tanpa diskriminasi dan perbedaan apapun.
- Anak-anak hendaknya tidak dipisahkan dari orang tua mereka, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berkompeten demi kebaikan anak itu sendiri.
- Setiap negara hendaknya memfasilitasi penyatuan kembali keluarga dengan mengizinkan mereka bepergian ke luar dari wilayah negara mereka.
- Orangtua mengernban tanggung jawab utama bagi pendewasaan anak; sementara itu negara harus memberikan bantuan yang perlu serta membangun lembaga perawatan anak.
- Negara hendaknya melindungi anak-anak dari kekerasan dan penyalahgunaan fisik dan mental, termasuk pelecehan atau eksploitasi seksual.
- Negara harus menyediakan perawatan alternatif bagi anak-anak yang tak memiliki orang tua (yatim piatu). Proses adopsi hendaknya diatur dengan hati-hati. Dalam hal ini kesepakatan-kesepakatan internasional hendaknya dipertimbangkan sebagai acuan dan menjamin validitas hukum bila orang tua yang mengadopsi bermaksud membawa anak tersebut (ke luar) dari negara kelahirannya.
- Anak-anak cacat hendaknya mendapat perlakuan, pendidikan, dan perawatan khusus.
- Anak-anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Setiap negara hendaknya menjamin agar perawatan kesehatan diberikan kepada semua anak, yang terutama memperhatikan tindakan-tindakan pencegahan, pendidikan kesehatan, serta penurunan angka kematian.
- Pendidikan dasar hendaknya bebas biaya dan bersifat wajib. Disamping itu, segala disiplin yang diajarkan hendaknya menghargai martabat anak. Pendidikan juga hendaknya mempersiapkan anak untuk hidup dalam semangat saling memahami, toleransi dan perdamaian.
- Anak-anak hendaknya mendapatkan waktu istirahat dan bermain, serta kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
- Setiap negara harus melindungi anak dari eksploitasi ekonomi serta pekerjaan yang mungkin dapat mengganggu pendidikannya, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya.
- Setiap negara harus melindungi anak terhadap penggunaan, pembuatan, dan perdagangan obat-obatan terlarang.
- Segala upaya hendaknya dilakukan untuk menghapus perdagangan dan penculikan anak-anak.

- Hukuman denda atau pemenjaraan tidak boleh dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan kejahatan sebelum berumur 18 tahun.
- Tak satu pun anak di bawah usia 15 tahun yang dibolehkan terlibat dalam perang kecil-kecilan. Sementara itu anak-anak yang berada di daerah konflik militer hendaknya mendapatkan perlindungan khusus.
- Anak-anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli hendaknya dapat menjalankan kebudayaan, agama, dan bahasa mereka secara bebas.
- Anak-anak yang melakukan tindakan pidana hendaknya diperlakukan sedemikian rupa sehingga meningkatkan martabat dan harga diri mereka, yang ditujukan untuk menyatukan mereka kembali ke masyarakat.
- Setiap negara hendaknya berusaha agar hak-hak yang terdapat dalam Konvensi ini dapat diketahui secara luas, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak.<sup>32</sup>

Bagi anak-anak yang mempunyai masalah kelakuan, upaya perlindungan melalui hukum pidanapun seyogianya mengindahkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, terutama seperti yang tertuang dalam Pasal 37 dan 40.

Dalam Pasal 37 memuat hal :

Setiap Negara Peserta harus menjamin agar :

- a). tidak seorang anakpun bisa menjadi sasaran penganiayaan atau kekejaman lain, hukuman yang tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan lagi tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang yang berusia di bawah 18 tahun,
- b). tidak seorang anakpun bisa direnggut kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan dan pemenjaraan anak harus dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa sesingkat mungkin,
- c). setiap anak yang direnggut kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan tetap menghargai martabatnya sebagai seorang manusia, dengan cara memperhitungkan kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan si anak dan tetap berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyurat dan kunjungan,
- d). setiap anak yang direnggut kemerdekaannya berhak untuk bisa segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai. Juga hak untuk menggugat legalitas perenggutan

---

<sup>32</sup> Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*The Rights of the Child*), terjemahan Yohannes da Masenus Arus, PIPHAM (Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia), Jakarta, 1996, hal. 15.



kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang, secara independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan cepat atas gugatannya itu.

Dalam Pasal 40, terumus :

1. Setiap Negara Peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum untuk diperlakukan secara konsisten dengan usaha untuk mendukung martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang memperhitungkan usia anak serta kehendak untuk mempromosikan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.
2. Untuk maksud ini, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, Negara Peserta secara khusus harus menjamin agar :
  - a). tak seorang anakpun bisa disangka, dituduh, atau diputus sebagai pelanggar hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan,
  - b). setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum tetap mempunyai jaminan :
    - (i). Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum,
    - (ii). Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya dan, jika perlu, melalui orang tua atau walinya, serta mendapat bantuan hukum atau bantuan lain yang diperlukan bagi persiapan dan penyampaian pembelaannya,
    - (iii). Agar persoalannya diputuskan tanpa penundaan oleh pejabat yang berwenang, independen dan tidak memihak, atau oleh badan peradilan dalam suatu sidang yang adil menurut undang-undang, disertai bantuan hukum atau bantuan lain yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak, orang tua atau walinya,
    - (iv). Tidak dipaksa untuk memberi kepastian atau mengaku bersalah, menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan ataupun mengambil bagian dan menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan kesetaraan,
    - (v). Jika diputuskan telah melakukan pelanggaran hukum, tetap berhak mendapatkan peninjauan ulang atas putusan tersebut berikut segala tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya oleh pejabat atau badan peradilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak sesuai perundang-undangan,
    - (vi). Mendapat bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan,
    - (vii). Kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum,
3. Setiap Negara Peserta harus berusaha mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan, dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh, atau diputuskan telah melakukan pelanggaran, khususnya :
  - a). penetapan usia minimum dimana anak yang berusia dibawahnya dianggap tidak mampu melakukan pelanggaran hukum,

- b). bila perlu dan dikehendaki, ditetapkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya.
4. Berbagai peraturan, seperti perawatan, tata-cara bimbingan, dan pengawasan, konseling, hukuman percobaan, pengasuhan, program pendidikan, dan pelatihan kejuruan serta alternatif-alternatif lembaga pengasuhan lainnya perlu disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani sesuai dengan kesejahteraan mereka secara seimbang, baik dengan situasi mereka dan pelanggaran itu.<sup>20</sup>

Implementasi prinsip-prinsip yang berhubungan dengan anak bermasalah, sedikitnya telah dituangkan dalam UU No. 3/1997. Walaupun belum berlaku secara efektif dan masih dalam masa peralihan, dalam undang-undang tersebut telah ditemui norma-norma hukum yang mendukung prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrument-instrument internasional, tak terkecuali Konvensi tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989. Sebagai contoh adalah tentang batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak (*the minimum age of criminal responsibility*) – sebagai suatu hal yang dianggap paling urgen untuk dikedepankan – yaitu usia 12 tahun ke-atas (Pasal 26 Ayat 3 dan 4). Hal demikian menurut Barda Nawawi sudah cukup memadai dan sudah sesuai dengan Rule 4.1. SMR-JJ (*The Beijing Rules*).<sup>21</sup> Dalam Konsep KUHP baru juga menentukan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 96 Konsep 1993). Tentang jenis Pidana dan Tindakan yang dapat diberikan kepada anak-pun telah mengalami sedikit perubahan dari norma hukum yang sebelumnya (Pasal 45, 46, 47 KUHP). Namun disayangkan, justru pedoman mengenai prinsip-prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada anak – terutama

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 53-54. dan hal. 55-58.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 164.

berkenaan dengan perampasan kemerdekaan – malah diabaikan. Padahal masalah inilah yang menjadi pusat perhatian dokumen-dokumen internasional.<sup>22</sup>

Setelah diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia - yang disahkan tanggal 23 September 1999 - implementasi dokumen-dokumen internasional khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip pemberian tindakan bagi anak yang mempunyai masalah kelakuan, telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 66 ayat (1), dinyatakan bahwa anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; kemudian juga pada ayat (4), dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir.

Dalam kenyataannya, frekuensi putusan pidana kelembagaan/institusional amat mendominasi dalam memberikan reaksi terhadap kasus-kasus kenakalan anak. Demikian juga di Palembang, presentase putusan hakim terkonsentrasi pada pidana penjara (Lihat Tabel 10). Bahkan putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, sama sekali tidak dikenal. Padahal secara normatif, pilihan putusan tersebut telah diatur kembali dalam UU No. 3 Tahun 1997 (Pasal 24) – setelah Pasal 45, 46 dan 47 dihapuskan keberlakuannya – yang menunjukkan bahwa dari sudut kebijakan kriminal pengakuan Lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sebagai sanksi hukuman – yang dalam UU No. 3 Tahun 1997 termasuk dalam Tindakan (*maatregel*) – masih diperlukan.

Dari sudut kebijakan legislatif, ada peluang-peluang yang cenderung memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor pendorong atau faktor kondusif yang utama

<sup>22</sup> Lihat Resolusi PBB 40/33 The Beijing Rules Pasal 17.1, 17.4, 19.1; dan Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of juvenile Deprived of their Liberty Artikel 1.1 dan 1.2.

bagi hakim untuk cenderung lebih sering menjatuhkan pidana penjara ialah adanya perumusan tunggal yang hanya memuat ancaman pidana penjara saja. Sebagian besar perumusan delik kejahatan dalam KUHP, yaitu lebih dari 70% menggunakan perumusan tunggal. Perumusan tunggal ini tersebar hampir di semua kelompok kejahatan, yaitu terdapat di dalam 29 kelompok kejahatan dari 31 Bab Buku II KUHP; selain juga terdapat pada perumusan delik-delik kejahatan di luar KUHP, walaupun juga dikenal perumusan secara alternatif atau kumulatif-alternatif. Perumusan kumulatif inipun pada hakekatnya tidak berbeda dengan perumusan tunggal, karena mengandung keharusan untuk menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan jenis sanksi pidana lainnya. Jadi sistem perumusan kumulatif juga merupakan faktor kondusif. Faktor kondusif lainnya ialah lemahnya sistem kebijakan legislatif dalam merumuskan ancaman denda. Hakim cenderung lebih sering menjatuhkan pidana penjara yang rendah dari pada menjatuhkan pidana denda yang relatif dianggap kurang efektif.<sup>23</sup>

Dengan dianutnya sebagian besar perumusan delik kejahatan dengan perumusan tunggal, menimbulkan kelemahan yaitu tidak memberikan kesempatan atau kelonggaran kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggapnya paling sesuai untuk terdakwa. Oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief, kondisi yang demikian kurang memberi kesempatan kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, op.cit., hal. 175-176.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 178.

Dalam kaitan kasus-kasus kenakalan anak, pengaruh perumusan tunggal juga dirasakan, karena Pasal 1 Ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 dirumuskan bahwa anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Secara implisit ayat tersebut diartikan bahwa anak nakal adalah yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana (KUHP) – selain peraturan hukum lain – yang secara otomatis tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan legislatif yang mengatur tentang itu. Dengan kondisi perumusan tunggal dalam perumusan delik kejahatan, telah mengabaikan individualisasi pembedaan bagi si anak dalam pengertian tidak menunjukkan subjektivitas anak. Padahal secara Sosio-Psikologik, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan itu masih dalam kondisi entropy (teori Piaget). Entropy yang dimaksud adalah keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan, dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Kondisi entropy ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sesuai dengan perkembangan kognitif (kesadaran, inteligensi) si anak, sehingga lambat laun terjadi kondisi "*negative entropy*" atau "*negentropy*".<sup>25</sup> Oleh karena itu, ide individualisasi pembedaan bagi anak yang melakukan kenakalan/tindak pidana, terutama

<sup>25</sup> Kondisi Negentropy adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain dan pengetahuan jelas hubungannya dengan perasaan atau sikap. Orang yang bersangkutan merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas, tidak bimbang lagi, sehingga bisa mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 11.

dalam kaitan dengan pemilihan jenis pidana (tindakan) perlu lebih direfleksikan dalam kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak.

Pemilihan terhadap putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dianggap salah satu upaya pengembangan ide individualisasi pemidanaan (yang diartikan sebagai pemberian sanksi hukuman berupa pidana atau tindakan) bagi si anak. Dengan tidak ditemuinya putusan yang demikian dalam kasus-kasus kenakalan anak/tindak pidana anak di Palembang, memberi gambaran ada kondisi-kondisi yang diidentifikasi menyumbat berfungsinya putusan yang demikian dalam menjatuhkan reaksi terhadap kenakalan anak. Alasan-alasan rasional agar dapat difungsikannya lembaga ini dalam sidang pengadilan anak – bahkan akan lebih baik pada proses sebetulnya – terkait pada masalah : kemampuan pertanggung jawaban, tujuan pemidanaan bagi anak, juga berkenaan dengan segi efektivitas dan segi-segi negatif pidana penjara.

#### **Kenakalan Anak dan Pertanggungjawabannya**

Dalam ilmu hukum pidana, pengertian perbuatan pidana haruslah dipisahkan dengan perihal pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup> Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, tentu akan dipidana. Namun sebaliknya, apabila tidak mempunyai kesalahan walau ia telah

---

<sup>26</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 25.

Lihat juga Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 80.

melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, dia tidak akan dipidana.<sup>27</sup> Dasar pemidanaan pada si pelaku, dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dengan dipertanggungjawabkan perbuatan yang secara objektif tercela itu kepada si pelaku, menunjukkan bahwa apabila si pelaku dianggap tercela, maka kepadanya tentu dipidana; namun apabila si pelaku tidak tercela, tentu tidak dipidana. Oleh karena itu menurut Roeslan Saleh bahwa dipidana atau tidaknya si pelaku bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar dipidananya si pelaku adalah asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Kapanakah seorang dianggap mempunyai kesalahan, hal inilah yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini.<sup>28</sup>

Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya.<sup>29</sup> Dengan demikian, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan bathin (*psychisch element*) dari si pelaku yang melakukan perbuatan, (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukannya. Dua hal inilah yang harus diperhatikan, terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang disebut dengan kesalahan.

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> Simons dalam Roeslan Saleh, *ibid*, hal. 82.

Mengenai hal yang pertama, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan "kemampuan bertanggung jawab"; sementara hal yang kedua menyangkut persoalan kesengajaan atau kealpaan, dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan, yang tidak dapat dipisahkan (merupakan satu kesatuan).<sup>30</sup> Secara singkat, bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dapat dipidananrnya terdakwa, haruslah :

- (a). melakukan perbuatan pidana;
- (b). mampu bertanggung jawab;
- (c). dengan kesengajaan atau kealpaan;
- (d). tidak adanya alasan pemaaf.

Pandangan yang lebih menekankan pada segi psykis (kejiwaan) si pelaku adalah akibat pengaruh besar dari aliran modern, yang mempunyai minat terhadap pelaku secara individual, sehingga unsur kesalahan tidak dapat ditetapkan dan tidak pula dapat diukur tanpa orang mengetahui diri si pelaku. Pandangan ini berbeda dengan aliran klasik, yang menurut Roeslan Saleh secara mental dan tradisi, aliran ini mengakibatkan para pengikutnya lebih memperhatikan kejahatan yang dilakukan, daripada individualitas si pelaku. Para ahli hukum pidana klasik memberikan tempat utama kepada manusia dalam arti abstrak. Dan justru karena hormatnya pada manusialah (masyarakat umum - pen) maka mereka tidak banyak mengadakan penyelidikan-penyelidikan mengenai pelaku secara individual.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 123-124.



Di atas telah dikemukakan bahwa dalam ilmu hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan bathin si pelaku. Dalam Hukum Positif Indonesia, Pasal 44 KUHP menyatakan :

“apakah yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit pada jiwanya, maka orang itu tidak dipidana”.

Keadaan yang disebut di atas menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab, oleh karena itu tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat. Untuk dapat disebut sebagai orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, menurut Roeslan Saleh adalah “mampu untuk meng-insyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya”. Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ditentukan pertamakali oleh akal yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan faktor kehendak adalah bergantung atau lanjutan akalnya.<sup>32</sup>

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab, menurut Jonkers<sup>33</sup> tidaklah termasuk dalam Pasal 44 KUHP. Yang disebut tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yang umum, yang dapat disalurkan dari alasan-alasan seperti yang tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, orang yang tidak mampu bertanggung jawab bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.

<sup>32</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, op.cit., hal. 85-86.

<sup>33</sup> Jonkers dalam Roeslan Saleh, *ibid*, hal. 88.

Pemahaman yang diberikan oleh Jonkers tersebut disangkal oleh Roeslan Saleh. Menurut Roeslan Saleh, Pasal 44 KUHP adalah pasal yang jelas-jelas mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, atau tegasnya tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Mengenai anak-anak yang umurnya masih muda, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Benar bahwa menurut Pasal 45 KUHP dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tanpa pidana apapun, tetapi dasar untuk tidak memidana anak yang belum berumur enam belas tahun ini bukanlah hal tidak mampunya dia bertanggung jawab, melainkan karena "kita tidak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana halnya dengan kelakuan orang dewasa".<sup>34</sup>

Anak yang melakukan perbuatan pidana itu tidak mempunyai kesalahan, karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukannya, disebabkan karena umurnya masih muda, pertumbuhan jiwanya belum penuh, dan fungsi bathinnya juga belum sempurna. Oleh karena itu, si anak tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan tidak ada padanya, sehingga dia dipandang tidak bersalah. Terhadap mereka berlaku asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebaiknya dalam perumusan Pasal 45 pada ketentuan pertama, kata "yang bersalah" tidak disebutkan, karena bertentangan dengan

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 89.

kesimpulan yang ditarik bahwa anak yang belum cukup umur itu dalam keadaan tertentu tidak dipandang bersalah.<sup>35</sup>

#### Tujuan Pidanaan Bagi Anak

Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan yang multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Secara sosiologis – seperti yang dikemukakan Stanley Grupp – bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G.P. Hofmagels dalam hal ini juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yudisial dan dapat ditemukan di dalam realitas manusia dan masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, op.cit., hal. 54.

Dalam kaitan dengan alasan ideologis, pemahaman hal tersebut dapat kita lihat dari pendapat Notonegoro<sup>37</sup>, yang menyatakan sebagai berikut :

"... Negara kita karena sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktator, bukan negara materialis. Negara kita adalah negara terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik dalam kelahiran, maupun dalam kebathinan, yang mempunyai kedua-duanya kebutuhan dan kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan kepentingan bersama, yang kedua-duanya diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan. Di dalam perinciannya tugas negara kita sebagai negara monodualis, sebagai negara hukum kebudayaan di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian, mempunyai kewajiban :

1. memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri sebagai negara;
2. memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti kebutuhan dan kepentingan bersama dari para warganegara, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warganegara sendiri;
3. memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warganegara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warganegara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara;
4. memelihara kebutuhan dan kepentingan dari warganegara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warganegara .....

.....  
Memang di dalam hidup manusia hanya ada tiga macam jenis soal hidup yang pokok yaitu terhadap diri sendiri dan sesama manusia serta terhadap asal usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan".

Ungkapan di atas, pada hakekatnya menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila, manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa

<sup>37</sup> Notonegoro dalam Muladi, ibid, hal. 58.

lainnya, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Alasan ketiga untuk memberi pembenaran terhadap teori integratif tentang tujuan pemidanaan adalah berdasarkan alasan yuridis filosofis. Herbert L. Packer menyatakan bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan yaitu pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap pelaku, dan pencegahan kejahatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.<sup>38</sup>

Muladi memberikan pandangan yang merupakan kombinasi dari tujuan pemidanaan dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis tersebut. Asumsi dasar dari pandangan beliau bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>39</sup>

Bertolak dari pandangan Muladi, dalam kaitan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku, tidak terlepas dari kebijakan perlindungan anak yang pada akhirnya bertujuan

---

<sup>38</sup> Herbert L. Packer dalam Muladi, *ibid*, hal. 61.

untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Sifat kasuistik dari tujuan manakah yang lebih dititikberatkan diantara tujuan-tujuan pemidanaan lain, adalah berkenaan dengan tujuan dan dasar pemikiran yang lebih mengutamakan kesejahteraan anak, seperti yang ditegaskan dalam SMR-JJ-1985 (*The Beijing Rules*) dalam Rule 5-1 tentang *Aims of juvenile justice* ditegaskan :

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence.”

(Sistem peradilan anak harus menekankan pada kesejahteraan anak dan menjamin bahwa setiap tindakan/reaksi terhadap anak pelaku harus selalu sebanding dengan keadaan si pelaku (anak) dan pelanggarannya).

Dalam Commentary yang terdapat di bawah Rule 5-1 disebutkan bahwa ada 2 tujuan utama dari peradilan anak, yaitu : (1) memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*); dan (2) prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan/sasaran yang pertama merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya dari dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak, agar terhindar adanya sanksi yang bersifat punitive (menghukum semata)<sup>40</sup>. Pada sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum/ punitive.

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Menurut Don C. Gibbons, tujuan dari mereka yang mendukung perkembangan peradilan anak bermaksud untuk menciptakan suatu struktur yang akan mengatur kebutuhan-kebutuhan anak lebih berupa *treatment* dan bukanlah penghukuman.  
Don C. Gibbons, *Society, Crime, and Criminal Behavior*, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1992, hal. 454.

Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran, tetapi juga pada situasi kondisi pribadi pelaku.<sup>41</sup>

Atas tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahteraan anak – yang pada akhirnya pada kesejahteraan masyarakat – penghukuman yang dijatuhkan kepada anak sebagai reaksi dari kenakalannya tidak dapat dijadikan objek dari pencegahan umum. Seperti yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila, dan penderita sakit mental, tidak dapat dijadikan objek dari tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum (*general prevention*).<sup>42</sup>

#### **Efektivitas Dan Segi-Segi Negatif Pidana Kelembagaan Bagi Anak**

Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (*institutional/custodial*) sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang ada (termasuk terhadap anak nakal), selalu menjadi sorotan ahli penologi, karena disadari banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dengan pemberian hukuman tersebut, terlebih bagi seorang anak yang belum matang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Yang paling utama dipersoalkan adalah masalah efektivitas dan segi-segi negatif yang ditimbulkannya. Seperti yang telah dikemukakan di atas (baca Tabel 10), terhadap anak-anak yang melakukan kenakalan di bawah usia 16 tahun terkonsentrasi pada pidana penjara. Dari sudut politik kriminal keadaan demikian tentu tidak menguntungkan, karena dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh R.M. Jackson bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak

<sup>41</sup> Lihat juga dalam UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) Pasal 1 sub 1.a, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1).  
Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, op.cit., hal. 112-113.

<sup>42</sup> Johannes Andenaes dalam Muladi, op.cit., hal. 83.

yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan olehnya bahwa untuk pelaku pemula (*first offender*), *reconviction rate* untuk anak-anak sekitar 50%, untuk para remaja sekitar 40% lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30%, dan untuk kelompok di atas 40 tahun sekitar 9-15%. Dikemukakan selanjutnya oleh Jackson, bahwa data *reconviction rate* itu menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya si pelaku pernah dipidana. Untuk anak-anak yang telah dua kali dijatuhi pidana penjara, *reconviction rate*-nya menjadi 100%.<sup>43</sup>

Angka perbandingan residivisme dengan usia pelaku dikemukakan pula oleh Leslie T. Wilkins, yang disusunnya kembali dengan bersumber dari *The Sentence of The Court*, yaitu suatu laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The Home Office Research Unit* di Inggris. Adapun data yang dikemukakannya ialah bahwa angka perbandingan residivisme (*recidivisme rate*) untuk pelaku pertama dalam kelompok usia antara 8-16 tahun sekitar 65%, antara 17-29 tahun sekitar 55% dan untuk kelompok 30 tahun ke atas sekitar 28%.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pidana penjara, maka negara-negara lain telah lebih maju yaitu dengan telah diaturnya pedoman atau aturan penjatuhannya pidana dalam hukum positifnya, misalnya terlihat di Inggris dengan dieluarkannya "*The First Offenders Act*" pada tahun 1958, yang merumuskan bahwa : pengadilan dilarang untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku pemula (*first offender*) kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.<sup>45</sup> Demikian pula misalnya yang ada di Singapura, terumus bahwa :

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, op.cit., hal. 189.

<sup>44</sup> Leslie T. Wilkins, ibid.

<sup>45</sup> Rupert Cross dalam Barda Nawawi Arief, ibid, hal. 158.



- (1). Seorang anak (*child*) janganlah dipidana atau diperintahkan untuk dipenjarakan karena suatu tindak pidana, atau dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau ongkos-ongkos.
- (2). Seorang remaja (*young person*) tidak akan diperintahkan untuk dipenjarakan karena suatu tindak pidana, atau dimasukkan ke dalam penjara karena kelalaian membayar denda atau ongkos-ongkos, kecuali pengadilan berpendapat bahwa anak itu mempunyai karakter yang sukar dikendalikan di rumah-rumah pendidikan negara atau karena sudah sedemikian rusak tabiatnya.<sup>46</sup>

Dari sudut sisi negatif, bahwa pidana kelembagaan dapat menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat; prisonisasi sebagai pengaruh sub kultur narapidana dalam penjara; tempat pencemaran dimana penjahat kebetulan atau pendatang baru dirusak melalui pergaulan; dan menimbulkan stigma atau cap jahat.<sup>47</sup> Terlebih bagi si anak, pidana perampasan kemerdekaan tersebut akan sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Oleh karena itu, *The Beijing Rules* (SMR-JJ) menganut pendirian untuk menerapkan kebijakan yang selektif mengenai penggunaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap kasus anak (Pasal 17-1), dan merupakan pilihan yang terakhir dalam tempo yang seminimal mungkin (Rule 19-1).<sup>48</sup> Dalam *Commentary Rule 19-1* pada paragraf pertama disebutkan bahwa :

"Ilmu Kriminologi yang progresif menyarankan penggunaan perlakuan yang bersifat non- kelembagaan daripada yang bersifat kelembagaan. Banyaknya pengaruh-pengaruh yang merugikan si pelaku yang tampaknya tidak terhindarkan didalam setiap institusionalisasi, tidak bisa diimbangi dengan usaha-usaha pembinaan. Hal ini terutama sekali pada anak-anak/remaja yang amat mudah terkena pengaruh negatif. Lagipula, pengaruh-pengaruh negatif yang tidak hanya dikarenakan kehilangan kebebasan namun juga dari pemisahan lingkungan sosial yang dikenalnya, tentu lebih akut/gawat yang terjadi pada

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op.cit., hal. 141.

<sup>48</sup> Pasal 66 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 dirumuskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir

anak-anak/remaja dibanding orang dewasa, karena tahap perkembangan mereka yang masih dini."

Dari komentar tersebut jelaslah bahwa tindakan yang diberikan pada anak-anak/remaja haruslah dibedakan dengan orang dewasa mengingat pertumbuhan mereka yang amat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial yang melingkupi mereka. Pemberian lingkungan fisik dan sosial yang sehat, akan berpengaruh positif pada anak-anak; namun sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang tidak sehat pula. Dari sudut kebijakan kriminal, sebagai ide yang harus diejawantahkan dalam bentuk tindakan-tindakan perlindungan anak nakal, penempatan anak-anak dalam suatu lembaga sudah tentu akan bertentangan dengan usaha kesejahteraan anak. Hukum Positif Indonesia-pun mengatur, yaitu dalam UU No. 4 tahun 1979, anak-anak harus diberi jaminan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosialnya (Pasal 1 sub 1-a), anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)). Pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, tidak akan diperoleh apabila anak tersebut ditempatkan pada suatu lembaga sebaik apapun pembinaan yang dilakukan di dalamnya.

## **2. Sebab Musabab Tidak Berfungsinya Putusan Pengembalian Kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak**

Di atas telah dikemukakan bahwa putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sama sekali tidak pernah dikenal dalam praktek peradilan anak di Palembang (baca Tabel 10). Dipandang dari sudut rasionalitas yaitu dari segi pertanggung jawaban pidana, tujuan pemidanaan terhadap anak, dan sisi efektivitas dan segi negatif pidana perampasan kemerdekaan, putusan yang demikian perlu dipertimbangkan keberadaannya. Pengindahan pada fokus utama dalam peradilan anak yaitu untuk kemajuan kesejahteraan anak, disamping sasaran lain yaitu prinsip penghindaran sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata pada anak nakal (asas proporsionalitas), perlu menjadi perhatian aparat-aparat yang terkait dengan peradilan anak (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, dan lembaga koreksional).

Suatu keadaan yang ironis sekali apabila kembali direnungkan bahwa anak-anak yang amat memerlukan bantuan dan perlindungan – tidak terkecuali bagi mereka yang mengalami hambatan kelakuan – justru perlakuan yang diberikan tidak berbeda dengan orang dewasa. Apa yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa sebab utama tidak berfungsinya putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukan semata-mata ada pada diri hakim, yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk memberikan putusan setiap permasalahan hukum yang diajukan padanya. Penyumbatan putusan yang demikian – sehingga tidak dikenal dalam praktek peradilan anak di Palembang – justru disebabkan karena semata-mata pada hubungan koordinasi fungsional dan instansional, dan sinkronisasi pelaksanaan peradilan anak. Dalam pengertian yang sederhana, hakim tidak bisa lari dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh aparat pada tingkatan-tingkatan sebelumnya dalam proses peradilan

anak. Apabila pada tingkat penyelidikan diteruskan dengan penyidikan – yang oleh UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 sub 5 seharusnya dilakukan oleh polisi/penyidik anak, juga dalam penuntutan yang harus dilakukan jaksa anak – terhadap si anak dilakukan tindakan penahanan, yang kemudian dilanjutkan pada tingkatan penuntutan, atas dasar demi sinkronisasi pelaksanaan peradilan, maka tindakan hakim haruslah sejalan. Akibatnya, putusan yang diberikan oleh hakim harus pencerminan dari pelurusan tindakan sebelumnya. Kenyataannya, putusan perampasan kemerdekaan/penjara oleh hakim semata-mata untuk menutupi lamanya penahanan yang dialami si anak dalam proses peradilan dari awal sampai akhir, yaitu dengan diberikan putusan oleh hakim. Di Palembang (baca Tabel 10) data di lapangan menunjukkan bahwa dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang 1 tahun, yaitu : sebanyak 102 kasus di tahun 1994, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 71 kasus (58,68% dari 121 kasus). Pada tahun 1995, dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang dari 1 tahun (sebanyak 58 kasus), maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 37 kasus (50,68% dari 73 kasus). Pada tahun 1996, dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang dari 1 tahun (sebanyak 101 kasus), maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 74 kasus (58,73% dari 126 kasus). Pada tahun 1997, dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang dari 1 tahun (sebanyak 83 kasus), maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 51 kasus (51,52% dari 99 kasus). Dan pada tahun 1998, dari keseluruhan pidana penjara yang lamanya kurang dari 1 tahun (sebanyak 78 kasus), maka pidana penjara yang

dijatuhkan oleh hakim yang lamanya sama dengan lamanya proses awal hingga pemberian putusan adalah berjumlah 53 kasus (58,24% dari 91 kasus).

Data yang terungkap di atas, ditunjukkan bahwa pangkal tolak tidak dikenalnya putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukanlah tertuju pada kebijakan yang diberikan hakim sebagai pribadi hukum, tapi terkait pada sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Keadaan demikian akan lebih dipahami apabila pemikiran diarahkan pada 2 keadaan, yaitu : (1). sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang integralistik; (2). Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu organisasi birokrasi.

#### **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sistem Integralistik**

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*)<sup>49</sup>, dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*".

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem peradilan pidana itu sendiri telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

---

<sup>49</sup> Sebelumnya adalah pendekatan "*Law and Order*" (Hukum dan Ketertiban), yang mempunyai ciri-ciri :

- a. Kepribadian ganda :
  1. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat; dan
  2. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
- b. Titik berat pada "*Law Enforcement*" dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian;
- c. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian;
- d. Menimbulkan eksese diskusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian : "*police brutality*"; kolusi; "*police corruption*".

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*, Cetakan Kedua (Revisi), Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 7.

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>62</sup> Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *"the administration of justice"*.<sup>63</sup>

Sementara itu Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>64</sup> Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

---

<sup>62</sup> Ibid, hal. 14.

<sup>63</sup> Ibid, hal. 9-10.

<sup>64</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>53</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pengertian Sistem Peradilan Pidana – dengan mengutip pendapat Sanford Kadish – yang melihatnya dari sudut pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Sementara itu,

---

<sup>53</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, di kutip dari *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-UI, Jakarta, 1994, hal. 84-85.

pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>66</sup>

Kata "*integrated*" pada "*integrated criminal justice system*" itu sendiri, menurut Muladi sangat menarik perhatian apabila dikaitkan dengan istilah "*system*". Hal tersebut disebabkan karena dalam istilah "*system*" seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses (*input - throughput - output and feedback*), sistem kontrol yang efektif (*negative-entropy*) dan sebagainya. Namun beliau menyetujui apabila penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam Sistem Peradilan Pidana nampaknya merupakan "*disturbing issue*" di pelbagai negara.

Selanjutnya Muladi menegaskan bahwa makna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*);
2. Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*); dan
3. Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*).

Sinkronisasi Struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum; Sinkronisasi Substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; sementara Sinkronisasi

<sup>66</sup> Romli Atriansmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme)*, op.cit., hal. 16-17.



Kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya peradilan pidana.<sup>67</sup>

Bertolak dari pengertian Sinkronisasi yang diberikan oleh Muladi di atas, data di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktek peradilan pidana dimana anak sebagai pelaku, pandangan/sikap yang ada pada aparat pemutus (hakim) seringkali tidak sejalan dengan tindakan yang diberikan oleh aparat-aparat penegak hukum pada tahap sebelumnya (penyidik dan penuntut umum). Putusan pidana penjara yang diberikan oleh hakim – yang pada hakekatnya berupa pengembalian kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya – menunjukkan kepada kita bahwa aparat hakim sudah lebih memahami perlakuan bagaimana yang dianggap baik – dalam kaitan dengan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak – diberikan kepada anak pelaku. Pemberian pidana penjara yang lamanya diseimbangkan dengan lamanya anak dalam proses peradilan, memberikan pengertian bahwa hakim secara pribadi lebih menginginkan kalau anak pelaku akan lebih baik apabila dididik dalam keluarganya (orang tua, wali, atau orang tua asuh), asalkan keluarga tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas. Untuk itulah bantuan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) sangat diperlukan hakim, sehingga ia bisa memahami kehidupan sosial si anak yang menunggu putusannya.

Sebaliknya, para aparat kepolisian dan penuntut umum yang menangani kasus-kasus anak lebih cenderung kepada pelaksanaan undang-undang semata (tindakan represif dan yudisial), dengan kurang memperhatikan bahwa seorang anak lebih membutuhkan perlakuan khusus yang amat berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada orang dewasa. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi – yang idealnya dilakukan polisi anak –

---

<sup>67</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit., hal. 1-2.

seringkali tidak secara langsung diberitahukan kepada pihak keluarganya, bahkan pemberitahuan kadangkala menggunakan jasa masyarakat (teman, saudara, dan sebagainya) yang kebetulan mengetahui asal-usul si anak. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang dalam Beijing Rules yang meminta perhatian khusus terutama dalam kontak awal (*initial contact*) seperti yang di atur dalam Rule 10. Dalam Rule 10.3 ditegaskan bahwa kontak antara aparat penegak hukum dengan anak pelaku (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara :

- 1). Menghormati kedudukan hukum si anak (*respect the legal status of the juvenile*),
- 2). Memajukan kesejahteraan anak (*promote the well being of the juvenile*), dan
- 3). Menghindari hal-hal yang merugikan/merusak/membahayakan anak (*avoid harm to her or him*).

Dalam commentary dijelaskan bahwa istilah "*avoid harm*" merupakan kata-kata yang fleksibel dan mencakup berbagai interaksi yang mungkin terjadi, misalnya menggunakan kata-kata keras (bentakan-bentakan) atau tindakan kekerasan fisik. Ditegaskan bahwa istilah itu harus diartikan secara luas. Hal ini dipandang sangat penting karena kontak pertama ini sangat mempengaruhi sikap anak dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya.<sup>68</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perihal pemberitahuan adanya penahanan tersebut merupakan kewajiban aparat pada setiap tingkatan, yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa : "tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya."

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief dalam makalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan, Bunga Rampai Hukum Pidana, op.cit., hal. 116-117.

Seorang anak yang diketahui melakukan kenakalan – baik oleh aparat sendiri ataupun atas laporan masyarakat – dan kemudian oleh penyidik dimasukkan dalam tahanan sementara, idealnya bahwa tindakan yang diberikan tersebut adalah sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Hal tersebut dipertegas dalam *Beijing Rules* pada Rule 13.1, bahkan dalam point kedua (Rule 13.2) dinyatakan agar sedapat mungkin harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya seperti pengawasan yang ketat, perlakuan/pemeliharaan yang intensif, penempatan pada keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau di rumah. Lebih jauh dalam Rule 18.1 *Beijing Rules* mengharuskan tersedianya beragam tindakan dari aparat yang berwenang agar sedapat mungkin menghindari tindakan pelembagaan/institusional. Bahkan Rule 18.2 dirumuskan bahwa tak seorang anakpun dapat dipisahkan dari pengawasan orang tuanya, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali jika situasi kondisi kasusnya memang diperlukan demikian. Dalam Komentar Rule 18.2, pengecualian yang dimaksud dalam kalimat terakhir, menyangkut fakta-fakta yang benar-benar/jelas-jelas menjamin pengambilan tindakan pemisahan si anak dari orang tuanya, misalnya adanya penyiksaan orang tua terhadap si anak.

Dalam hukum positif Indonesia, apa yang tertuang dalam dokumen internasional di atas, berujud pada pengadaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 point 1 UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Hanya saja yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh pengambil kebijaksanaan adalah apabila si anak dalam tahap penyidikan tidak dimasukkan dalam suatu lembaga (penahanan sementara) dan dikembalikan ke lingkungan keluarganya, pihak keluarga harus bisa menjamin kalau mereka masih mampu untuk mendidik mental spiritual si anak, dan kepada pihak keluarga harus diberi persyaratan-persyaratan sebagai peringatan. Dalam kajian konsep/teori pertanggungjawaban, tindakan demikian berkenaan dengan pertanggungjawaban struktural/fungsional. Barda Nawawi

Arief menyatakan bahwa masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kekurang-mandirian dan kebergantungan (dependensi) si anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah "korban struktural" atau "korban lingkungan".<sup>57</sup> Bahkan adat Batak menggariskan, seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum dari anaknya yang belum cukup umur.<sup>58</sup>

Kecenderungan yang terjadi di lapangan, tindakan penyidik lebih pada penempatan/penitipan terdakwa anak tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, dan melanjutkan perkara tersebut pada proses selanjutnya (penuntutan). Penghentian perkara biasanya hanya dikenakan pada perkara-perkara perkelahian pelajar, dan kepada mereka diberikan Bimmas (Bimbingan Masyarakat). Keadaan pada kecenderungan demikianlah yang pada akhirnya terkait erat dengan putusan hukum yang diberikan hakim, yaitu pidana penjara. Sementara hukum positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ditentukan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penahanan, seperti :

1. Pasal 23, merumuskan :

- (1). Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2). Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa beserta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, op.cit., hal. 169

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, op.cit., hal. 83.

2. Pasal 31, merumuskan :

- (1). Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan .
- (2). Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Pasal 123, merumuskan :

- (1). Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2). Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3). Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4). Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
- (5). Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Perumusan pasal-pasal tersebut di atas sebenarnya pemberian kewenangan yang besar bagi aparat – terutama kepolisian sebagai aparat yang mengadakan kontak awal dalam kasus pidana – agar tidak bertindak bersifat refresif dan yudisial semata. Terutama bagi terdakwa anak, perhatian pihak penyidik lebih ditonjolkan demi kebaikan anak itu sendiri. Terhadap pengalihan jenis penahanan ke bentuk lain – penahanan rumah misalnya – adalah sikap proaktif

penyidik karena UU memang mengatur demikian. Akan lebih baik apabila pembentuk kebijakan menambahkan kata-kata "atas permintaan tersangka atau terdakwa, keluarga, atau penasihat hukum" – seperti dalam perumusan Pasal 123 – yang menunjukkan adanya hak terdakwa atau keluarganya dan bukan semata-mata kewenangan penyidik. Juga dalam hal penangguhan penahanan (Pasal 31), sebaiknya ditambahkan kata-kata "keluarganya, atau penasihat hukum" setelah kata awal "Atas permintaan tersangka, terdakwa" yang menunjukkan bahwa hak permohonan tidak hanya diberikan pada tersangka/terdakwanya saja tetapi juga pada pihak keluarga atau penasihat hukum sebagai wakil dari pihak keluarga. Hal ini disebabkan karena seorang anak adalah tetap anak dengan segala kekurangannya, yang tidak bisa menentukan sendiri apa yang mereka kehendaki tanpa bantuan dari pihak lain (orang tua, wali, atau pengasuhnya, atau penasihat hukumnya ).

#### **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Organisasi Birokrasi**

Pada dasarnya lembaga peradilan yang menangani proses peradilan pidana bagi anak-anak adalah suatu sistem organisasi birokrasi<sup>71</sup>, yaitu suatu jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. Dengan demikian konsep ini (birokrasi-pen) dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip organisasi yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi (sebagaimana biasanya demikian), walaupun birokratisasi kadang-kadang berakibat sebaliknya, menimbulkan ketidakefisienan.

---

<sup>71</sup> Peter M. Blaw dan Marshall W. Meyer, *Bureaucracy in Modern Society*, terjemahan Gary R. Yusuf, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, Jakarta, 1987, hal. 4.

Blumberg<sup>60</sup>, misalnya, melihat masing-masing lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana tidak lain adalah suatu organisasi birokrasi, yang mempunyai ideologi, struktur personel, maupun peraturan sendiri, yang seringkali tidak berjalan seiring dengan ideologi, struktur, personel, peraturan dari subsistem yang lebih besar, dalam hal ini adalah peradilan pidana.

Sementara itu, Muladi melihat Sistem Peradilan Pidana dari sisi yang berbeda, yaitu Sistem Peradilan Pidana sebagai faktor kriminogen. Dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial lainnya terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* (perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadangkala nyawa orang) dalam skala besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku kejahatan, pengendalian, dan kesejahteraan sosial).<sup>61</sup>

Utrecht juga menggambarkan adanya kondisi yang paradoks/kontradiktif dalam penjatuhan hukuman sebagaimana Muladi, menggambarkan adanya *welfare* dan *unwelfare* pada Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara (melalui aparat penegak hukum – pen) menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh Pemerintah Negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada satu pihak Pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap siapapun juga; sedangkan pada pihak lain Pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu. Kondisi ini oleh Franz von Litz digambarkan sebagai melindungi hak,

<sup>60</sup> Blumberg, *Criminal Justice System*, op.cit., hal. 5.

<sup>61</sup> Muladi dalam makalah Sistem Peradilan Pidana sebagai Faktor Kriminogen, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit., hal. 21.

kepentingan, dan sebagainya dengan menyerang, memperkosa hak, kepentingan, dan sebagainya".<sup>74</sup>

Sehubungan dengan sifatnya yang unik itu, maka perlu ada seperangkat aturan main yang harus diindahkan oleh segenap aparat penegak hukum – yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana – dalam menjalankan tugasnya.

Dalam proses peradilan pidana anak-anak harus berhadapan dengan aparat penegak hukum sebagai bagian organisasi birokrasi. Sebagai suatu organisasi birokrasi, lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada suatu pilihan yang dilematis antara pencapaian tujuan organisasinya sendiri dengan pelaksanaan fungsinya sebagai pelindung hak-hak anak. Birokrasi mempunyai tujuan sendiri yang seringkali tidak sama dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana yang sebenarnya. Maksudnya, apa yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana akan diterjemahkan sendiri dan diarahkan sesuai dengan tujuan dari organisasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini Sudarto mengingatkan bahwa citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu (peradilan pidana – pen) harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara sejak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir proses itu, ialah pelaksanaan pemidanaan, yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.<sup>75</sup>

Untuk memahami hakikat peradilan pidana anak sebagai proses, kiranya perlu diperhatikan adanya ajaran Kriminologi Kritis, yang menekankan arti pentingnya suatu proses. Ajaran ini melihat hukum sebagai suatu proses yaitu bagaimana proses suatu undang-undang

<sup>74</sup> Utrecht dalam Gerson Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal. 59-60.

<sup>75</sup> Sudarto, Uraian Pokok-Pokok Permasalahan dalam Seminar Kriminologi ke-IV, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hal. 14.





disusun dan dijalankan. Adapun alasan yang mendasari dipergunakannya telaah kriminologi kritis ini dalam memahami bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana secara umum adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

1. Perkembangan masyarakat modern yang cepat telah dan akan menghasilkan pergeseran-pergeseran dan perubahan kepentingan, nilai-nilai dan struktur yang akan berpengaruh terhadap sosok kejahatan. Oleh karena perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat modern terutama hasil buatan manusia/ masyarakat atau sebagai konstruksi sosial, maka juga tindakan-tindakan manusia/masyarakat yang berupa reaksi yang juga merupakan bagian dari proses konstruksi sosial, penting untuk diungkapkan sehubungan dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian studi tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi perilaku anggota masyarakat dan penegak hukum dalam proses bekerjanya hukum, termasuk juga dalam proses pembuatan Undang-Undang sangat bermanfaat untuk dapat memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik.
2. Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang terbuka, artinya hukum tidak bekerja melalui kerahasiaan atau tertutupan, sehingga studi mengenai proses penegakan hukum merupakan konkretisasi dari negara hukum, khususnya dalam bidang kejahatan. Dengan demikian dapat dikaji seberapa jauh asas-asas hukum seperti persamaan dihadapan hukum, perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan korban serta masyarakat, dapat sampai ditangan atau dinikmati oleh anggota masyarakat.
3. Studi tentang proses bekerjanya hukum dapat menunjukkan hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum, sehingga hal ini akan memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha perbaikan dalam bidang penegakan hukum (pidana) serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Studi proses (sosiologis) mengenai perundang-undangan, akan memberikan pemahaman yang lebih komperehensif. Misalnya dengan menunjukkan tujuan undang-undang seperti adanya tujuan dan kepentingan yang tersembunyi dibalik perundang-undangan tertentu justru dapat menghalang-halangi tercapainya tujuan masyarakat adil makmur.

Dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana terhadap anak, maka apabila tidak berhati-hati dalam penanganannya, justru akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari tujuan

<sup>76</sup> I. S. Susanto, *Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi Dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi Kejahatan*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1993, hal. 8.

peradilan pidana itu sendiri<sup>65</sup>, yaitu sebagai suatu sistem peradilan anak adalah satu bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, disamping untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hanya saja, kesejahteraan anak harus menjadi *guiding factor* (faktor penuntun/pedoman) seperti yang tertuang dalam Rule 17.1 (d) SMR-JJ (*The Beijing Rules*), yang berarti bahwa kepentingan anak harus lebih didahulukan dari kepentingan masyarakat.<sup>66</sup> Makna utama dari rumusan tersebut adalah sistem peradilan anak adalah suatu forum dimana hak-hak dan kepentingan anak harus dilindungi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Di dalam peradilan ini, anak-anak belajar tentang keadilan dan kehormatan hukum.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana<sup>67</sup>, pengertian keadilan disini hendaknya dipahami sebagai perlindungan terhadap hak-hak mereka yang tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia mereka atau sebagai suatu kondisi dimana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur). Hal ini berarti bahwa tuntutan-tuntutan terhadap diri anak harus

---

<sup>65</sup> Menurut Lela B. Costin, pada permulaannya peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuannya digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak serta individual serta kebutuhan-kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya. Dengan perkataan lain, titik beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.

Lela B. Costin, *The Child and The Court*, Mc. Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hal. 92.

<sup>66</sup> Lihat juga Rule 5.1 *Beijing Rules* yang menyatakan bahwa sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak (*the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile*)

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, op.cit., hal. 124.

<sup>67</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Keadilan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Suatu Pendekatan Kriminologis, makalah dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem Peradilan Anak, Jakarta tanggal 12 Juni 1995, hal. 2.

disesuaikan dengan kemampuannya pada usia tertentu. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dibutuhkan suatu kondisi, yaitu :

1. Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan anak.
3. Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat diantara anggota-anggota masyarakat.

Khusus bagi anak-anak yang dihadapkan ke sidang pengadilan, menurut Suwantji Sisworahardjo bahwa untuk mencapai keadilan bagi mereka, harus ada persyaratan-persyaratan sebagai standar agar peradilan anak dapat efektif dan adil, yaitu :

1. Hakim dan Staf-nya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin
  - a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak.
  - b. Bahwa anak, jika ia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
  - c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin :
  - a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.

- b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.<sup>80</sup>

Demikian bisa dipahami bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem lembaga birokratis, yang dalam bekerjanya tidak bisa berdiri sendiri. Ada interaksional dan saling ketergantungan dalam organisasi Sistem Peradilan Pidana, menuju suatu tujuan bersama Sistem Peradilan Pidana itu sendiri, sementara pada waktu yang bersamaan juga ada tujuan dari masing-masing subsistem yang juga harus dicapai. Pencapaian tujuan subsistem tersebut justru cenderung mengedepan dibanding dengan semangat untuk mencapai tujuan organisasi Sistem Peradilan Pidana secara umum.

Sebagai organisasi birokrasi, Sistem Peradilan Pidana tidak bisa mengelak dari ciri-ciri yang melekat pada suatu organisasi birokrasi. Weber<sup>81</sup> mengemukakan adanya beberapa ciri ideal pada struktur birokrasi, antara lain :

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Adanya pembagian tugas secara tegas ini memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip *hierarchi*, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam *hierarchi* administrasi dipercaya oleh atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya atau dirinya sendiri. Agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, dia diberi wewenang untuk mengatur mereka, mempunyai hak untuk memerintah dan bawahannya harus menjalankan perintahnya tersebut.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.

<sup>80</sup> Suwatji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, op.cit., hal. 33.

<sup>81</sup> Peter M. Blaw dan Marshall W. Meyer, op.cit., hal. 27-30.

4. Pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat *sine ira et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi).<sup>82</sup>

Sementara itu, secara lebih realitas E. Strauss<sup>83</sup> melihat bahwa birokrasi lebih banyak muncul sebagai ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut : terlalu percaya pada preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), terlalu banyak formalitas, duplikasi usaha, dan departementalisme.

Dalam praktik sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang tidak ideal, sehingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi – termasuk Sistem Peradilan Pidana – bekerja secara lamban, bertele-tele, dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong rantai birokrasi – yang sebenarnya secara ideal memperlambat pekerjaan administrasi (inefisiensi) – tetapi dalam kenyataannya justru membawa kemudahan dan mempercepat suatu proses. Pemotongan rantai birokrasi ini sendiri pada hakekatnya tidak lain adalah mempercepat pencapaian tujuan pribadi atau kelompok sebagai bagian dari suatu kelompok besar lainnya.

Dengan kondisi demikian, yaitu disamping sebagai suatu sistem juga sebagai suatu organisasi birokrasi, dalam kaitannya dengan peradilan anak, segenap unsur dalam Sistem Peradilan Pidana diharapkan bisa memainkan peranannya dalam melindungi hak-hak anak secara proporsional dan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

<sup>82</sup> Dikemukakan oleh Weber bahwa semakin besar dehumanisasi dalam lembaga birokrasi, maka semakin baik pula bekerjanya birokrasi itu.  
Blumberg, op.cit., hal. 46.

<sup>83</sup> Martin Albrow, *Bureaucracy*, Cetakan Kedua, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hal. 85.

Dalam kondisi adanya prioritas untuk kesejahteraan anak sebagai pencapaian tujuan dalam peradilan anak, menjadikan tidak lagi ada kepentingan atau orientasi lainnya dari aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak anak, selain kesejahteraan anak itu sendiri. Sementara itu, sebagai suatu organisasi tersendiri, mereka juga dihadapkan pada pencapaian tujuan organisasi itu, yang seringkali tuntutan organisasi sedemikian tinggi, sehingga cenderung mengenyampingkan tujuan peradilan anak (kesejahteraan anak).

**C. KONDISI-KONDISI DISFUNGSI LEMBAGA PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH**

**1. Adanya Perbedaan Perspektif Struktur Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan Anak.**

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak. Karenanya, perlindungan anak tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan tersebut kemudian lebih diperjelas dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan : "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".

Kesejahteraan anak memang merupakan tujuan utama dari seluruh upaya perlindungan hukum bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak – sebagai suatu sistem yang integral juga sebagai organisasi birokrasi – idealnya dimanfaatkan semata-mata untuk kesejahteraan anak.<sup>84</sup> Hak-hak anak seyogianya harus lebih dikedepankan – seperti yang diungkapkan oleh J.J. Rousseau<sup>85</sup> – dibandingkan kewajibannya. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, adalah menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosialnya.

Sebenarnya pemikiran dan usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak yang mengalami hambatan (peradilan anak) telah dimulai sekitar tahun 1958. Pihak Kepolisian atas dasar alasan psikologis-sosiologis, dan alasan pertahanan keamanan negara, telah menginstruksikan pembentukan “Biro Anak-Anak” baik ditingkat pusat maupun daerah propinsi dan kota-kota besar diseluruh Indonesia (Order KKN No. 28/VIII/1958, tertanggal 4 Juni 1958). Nama Biro Anak-Anak ini kemudian diubah menjadi : Dinas Polisi Urusan Anak/Pemuda, disingkat DIPUAP (Surat Instruksi Mentri Kepolisian No. Pol. 17/Instr/1965 tertanggal 23 Februari 1965). Kemudian sesuai dengan instruksi Panglima Daerah Angkatan Kepolisian VIII Jawa Barat tertanggal 5 Februari 1968 (No. Pol. 2/Instr/1968), sebelum ada petunjuk lebih lanjut dari Markas Besar Angkatan Kepolisian, untuk daerah Jawa Barat telah dipergunakan istilah “Pembinaan Anak, Pemuda, dan Wanita” yang di singkat BINAPTA.

<sup>84</sup> Para pakar Hukum, Sosiolog, dan pihak-pihak lain mempertanyakan: “apakah pengadilan (anak, pen) akan mampu berperan sebagai *parens patriae* dalam pengertian yang luas, dan mengubah anak nakal menjadi taat hukum”. Penentangan demikian berdasarkan anggapan bahwa peradilan anak tidak lebih dari “alat sosial yang kasar”, dan menganjurkan agar kita seharusnya tidak mengharapkan berlebihan padanya (peradilan anak). Don C. Gibbons, *op.cit.*, hal. 455.

<sup>85</sup> Lela B. Costin, *op.cit.*, hal. 91.

Atas dasar pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, maka diadakanlah sidang pengadilan khusus untuk anak<sup>86</sup>, yang dibedakan dengan sidang pengadilan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Pembedaan sidang anak dengan sidang orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antara instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak, yaitu : Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pra Yuwana. Bersamaan dengan diadakannya pemisahan sidang tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil kebijaksanaan dan memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan suatu persidangan khusus untuk anak-anak, tanpa menunggu-nunggu adanya suatu undang-undang tentang Pengadilan Anak. Bagi anak tersebut, instansi yang terkait dalam proses peradilanannya ditangani oleh hakim yang khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus, polisi wanita untuk anak dan petugas Pra yuwana.

Ide pembentukan kesatuan polisi khusus bagi masalah anak-anak dipelopori pertamakali oleh Departemen Kepolisian Negara Amerika Serikat, yang pada tahun 1888 sebagai realisasi ide tersebut telah diresmikan suatu kesatuan Polisi Wanita untuk pertamakalinya di kota New York. Kemudian pada tahun 1920 dengan suatu usul perubahan dari "*city charter*", tugas polisi wanita tersebut ditingkatkan terutama khusus untuk mengurus kriminalitas yang dilakukan oleh wanita dan anak-anak. Dan atas dorongan *Governor Smith's State Crime Commission*, maka pada tahun 1929 telah dibentuk suatu Panitia Penasihat untuk Pencegahan Kejahatan di kota New York, yang atas prakarsa Panitia Penasihat tersebut telah dibentuk suatu Biro Pencegahan Kejahatan yang disebut "*The Bureau of Crime Prevention*", yang kemudian dikuatkan dalam suatu piagam perubahan tahun 1931. Sejak tahun 1936 sampai saat ini, biro

---

<sup>86</sup> Suatu persidangan khusus untuk anak-anak untuk pertama kalinya telah diadakan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 29 Mei 1958.



tersebut dikenal dengan nama "*Juvenile Aid Bureau*", yaitu suatu biro resmi kepolisian yang bertugas untuk mencegah setiap kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>87</sup>

Pihak Kepolisian Amerika Serikat, nampaknya lebih menyetujui penggunaan nama "*Juvenile Control Division*" atau "*Juvenile Division*", sebagai spesialisasi adanya usaha-usaha pengawasan terhadap anak-anak. Pada umumnya *direction*, *supervision*, dan *control* pada *Juvenile Control Division* tersebut tidaklah berbeda dengan *direction*, *supervision*, dan *control* dari bagian lainnya pada Departemen Kepolisian Amerika Serikat. Jadi pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang fundamental mengenai tugas-tugas *Juvenile Control Division* ini dengan tugas badan-badan lainnya. Namun ada kriteria-kriteria tertentu yang diberikan Departemen Kepolisian di Amerika Serikat kepada *Juvenile Control Division*, yang dapat diterapkan pada setiap instansi yang berkecimpung dalam masalah anak-anak. Kriteria tersebut adalah mengenai : fungsi, organisasi, bagian dan seksi-seksi, dan hubungan antar bagian dan seksi-seksi tersebut.<sup>88</sup>

Fungsi *Juvenile Control Division* dapat dibagi ke dalam 4 bagian besar, yaitu :<sup>89</sup>

1. *Discovery of delinquents, potential delinquents, and conditions inducing delinquency.*
2. *Investigation of delinquency and causes of delinquency.*
3. *Disposition or referral of cases.*
4. *Protection of the child.*

Disadari bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah penting sekali demi obyektivitas dalam membahas

<sup>87</sup> Paul W. Tappan, *op.cit.*, hal. 522-523.

<sup>88</sup> John P. Kenney and G. Pursuit, *Police Work With Juvenile*, Charles C. Thomas Publisher Springfield, Illinois, 1954, hal. 19.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 20-22.

masalah anak itu sendiri, sehingga pihak kepolisian dapat menyelesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi perkembangan kehidupan si anak. Karena itu tidaklah mengherankan apabila pihak Departemen Kepolisian di Amerika Serikat mewajibkan kepada petugas-petugasnya untuk sepenuhnya memahami dan menyadari akan fungsi-fungsi tersebut.

*Ad 1. Discovery of delinquents, potential delinquents, and conditions inducing delinquency.*

Fungsi yang pertama ini dapat dikatakan sebagai fungsi yang sangat penting untuk dilakukan didalam rangka mengembangkan pengawasan dan pencegahan terhadap masalah kenakalan anak-anak. Pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pihak petugas dapat mengumpulkan data-data atau informasi selengkap mungkin mengenai diri si anak. Dan untuk keperluan kelengkapan informasi atau data-data tersebut, pihak petugas pertama-tama diharuskan untuk menghubungi sekolah si anak, yaitu tempat yang tetap dan sering dikunjungi si anak. Kemudian orang tua dan sahabat-sahabat si anak, pengadilan anak, dan badan-badan sosial yang berkecimpung dalam masalah anak-anak, akhirnya semua aspek-aspek dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan kenakalan anak yang bersangkutan.

*Ad 2. Investigation of law violations by youth*

Tentang penyelidikan terhadap anak pelanggar hukum, pihak petugas kepolisian diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana halnya pemeriksaan terhadap pelaku dewasa. Namun, pihak petugas dalam hal ini dibebankan tanggung jawab yang berat sekali, karena pemeriksaan haruslah sedemikian rupa sehingga fakta-fakta yang diperlukan dalam perkara anak dapat terkumpul dengan lengkap, tanpa merugikan kepentingan si anak. Dalam penyelidikan/pemeriksaan tersebut, yang paling utama adalah menemukan sebab-sebab kenakalan anak atau latar belakang kenakalannya. Dalam menemukan data-data yang dimaksud, petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap si anak, menggunakan cara

"interview" baik terhadap si anak bersangkutan maupun terhadap orang tua dan mereka yang dianggap berhubungan dengan kenakalan si anak.

Kadangkala tidak jarang pula untuk keperluan kelengkapan bahan-bahan pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian menganggap perlu untuk mengirimkan si anak yang bersangkutan ke rumah sakit untuk diperiksa baik jasmani maupun jiwanya.

#### *Ad 3. Disposition or referral of delinquent juvenile*

Setelah semua penyelidikan/pemeriksaan mengenai latar belakang kehidupan sosial dan psikologis si anak selesai dilakukan, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menentukan : apakah si anak perlu dilakukan penahanan ataupun dibebaskan dan diserahkan kepada orang tua atau walinya ? Dalam beberapa perkara, penahanan ini perlu dilakukan, yaitu pada umumnya apakah anak tersebut tergolong ke dalam katagori :

- a. No supervision, when a juvenile concerned is destitute, or obviously in need of supervision or protective custody.
- b. Danger to person, when release of the juvenile will endanger his person or morals.
- c. Record of runaway, when a juvenile has a record as a runaway and it is reasonable to assume that upon his release he will leave the jurisdiction of the court.
- d. Danger to public, when the record of the juvenile and/or the gravity of the offense is such that his release probably would prove dangerous to the public welfare.
- e. Investigation, when a juvenile's release would seriously hamper the officer's completion of the investigation.

#### *Ad 4. Protection of the child*

Fungsi yang terakhir ini dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut :

- a. Through the removal or control of environmental hazards.
- b. Through cooperation with civic betterment groups.
- c. By giving assistance in initiating constructive legislation.
- d. By carrying on juvenile patrol activities
- e. Through apprehension and prosecution of adults involved in offences against minors.
- f. By opposition to publicity which identifies delinquents or juvenile victims of adults crime.

Tentang fungsi pihak Kepolisian Amerika Serikat khususnya *Juvenile Control Division* dalam mengadakan pengawasan dan pencegahan terhadap masalah kenakalan anak-anak ini, dapatlah dikatakan bahwa fungsi yang diembarkannya adalah luas sekali dan dilakukan dengan sangat teliti. Bahkan dewasa ini, fungsi-fungsi tersebut juga telah diimbangi dengan tugas-tugas kepolisian khususnya *Juvenile Control Division* dalam mengurus dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, seperti : mengadakan penjagaan terhadap tempat-tempat pusat keramaian kota, tempat-tempat yang berbahaya (*red light*) bagi anak-anak, dan bioskop-bioskop. Bahkan terhadap pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar seperti : *Parent-Teacher Association*, lembaga-lembaga masyarakat, perkumpulan wanita, sekolah, pers, radio, dan sebagainya yang telah diadakan pencatatan dalam rangka mengadakan pengawasan terhadap kondisi masyarakat yang merugikan anak-anak muda.<sup>90</sup>

Bagaimanakah halnya dengan bidang tugas pihak Kepolisian di Indonesia dalam menghadapi masalah kenakalan anak-anak ? Dinas Polisi Urusan Anak (DIPUAP) telah menggariskan bidang tugas ke dalam : tugas polisional preventif, polisional repressif, dan tugas-tugas sosial, yaitu :

1. Tugas polisional preventif dilakukan dengan :

- a. menghubungi dan bekerjasama dengan jawatan-jawatan, yayasan, universitas-universitas, dan bidang-bidang lainnya yang bergerak di lapangan anak-anak.
- b. Mengadakan pencatatan, penelitian, dan pemetaan terhadap organisasi pemuda yang teratur maupun tidak teratur.
- c. Mengadakan patroli dan pengawasan terhadap anak-anak yang berada di tempat-tempat umum, misalnya : tempat-tempat pertemuan umum, jalan-jalan umum, tempat-tempat

---

<sup>90</sup> Ibid, hal. 23.

tuna susila, tempat bacaan, kantin, bar, dan tempat-tempat lain yang kemungkinan dapat merusak akhlak anak-anak.

- d. Mengadakan penerangan di RRI atau televisi tentang masalah kenakalan anak-anak.
2. Tugas polisional represif dilakukan dengan :
  - a. mengadakan pengusutan dan pemeriksaan dimana anak menjadi terdakwa atau korban.
  - b. Mengadakan re-eduksi, supervisi bimbingan, dan social case study/report
  - c. Mengawasi anak-anak yang diserahkan kembali kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi baik kembali.
3. Tugas sosial DIPUAP dilakukan dengan :
  - a. membantu para orang tua dengan nasihat-nasihat pedagogis/psychologis dalam menghadapi kenakalan anak-anak tersebut/mereka.
  - b. Bersama-sama dengan badan-badan pemerintah atau swasta yang bergerak dalam lapangan kesejahteraan anak membentuk :
    - Badan Keamanan Lahu Lintas (BKLL) dan Pramuka.
    - Badan Keamanan Umum (BKU).<sup>91</sup>

Setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan struktur hukum yang berkaitan dengan peradilan anak (Pasal 1), yaitu Penyidik Anak; Penuntut Umum Anak; Hakim Anak; Hakim Banding Anak; Hakim Kasasi Anak; Pembimbing Kemasyarakatan; Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan Penasihat Hukum. Khusus untuk penyidik anak (juga penuntut umum anak) sampai saat ini – juga sebelum berlakunya undang-undang – amat disayangkan kalau di propinsi Sumatra Selatan tidak dikenal biro khusus untuk

---

<sup>91</sup> Rorndi Aimasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, op.cit., hal. 105-106.

anak-anak, yang mempunyai perhatian besar terhadap anak dan masalah kenakalannya. Anak ditangani oleh penyidik umum yang biasanya menangani kejahatan yang dilakukan orang dewasa, juga penuntut umum yang tidak dikhususkan menangani masalah anak. Konsekuensinya, perlakuan terhadap anak tidak ada bedanya dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, tidak mencerminkan sikap dari pernyataan bahwa “anak mempunyai ciri dan sifat khusus”, yang berarti tindakan yang diberikanpun harus sejalan dengan kekhususan yang melekat pada mereka, yang juga dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU tentang HAM.

Sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana anak, aparat-aparat yang terkait dalam peradilan anak tersebut idealnya mempunyai persepsi dan sikap yang saling menunjang untuk mencapai tujuan akhir dari peradilan anak, yaitu kesejahteraan anak. Sayangnya, seringkali kita dapatkan bahwa anak – yang tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri – sering terombang-ambing pada suatu kondisi yang tercipta karena kekurangpahaman dan kurang profesionalismenya aparat-aparat yang terkait pada peradilan anak itu sendiri, teristimewa pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kepolisian, sebagai pihak yang pertamakali mempunyai hubungan kontak dengan anak yang terjaring dan masuk dalam lingkup sistem peradilan anak, sangat diharapkan untuk bertindak sangat hati-hati dan lebih cermat. Hal ini dikarenakan adanya suatu kesadaran bahwa kontak awal (*initial contact*) sangatlah mempengaruhi sikap anak dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya, seperti yang tertuang dalam Commentary pada Rule 10 SMR-JJ (*The Beijing Rules*).

Sebagai ujung tombak dari peradilan anak (juga peradilan orang dewasa), pihak kepolisian sangat dituntut untuk berprestasi, yaitu dalam bentuk output atau hasil kerja nyata.

Akibatnya, muncullah sikap otoriter anggota polisi yang tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas kerja, namun sebenarnya, bila ditinjau dalam kajian Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu organisasi birokrasi, tuntutan untuk menghasilkan output – yang menunjukkan adanya tuntutan hanya untuk mencapai target tanpa memperhitungkan dampak psiko-sosial bagi masyarakat, tanpa kecuali bagi terdakwa/tertuduh – justru membelakangi tujuan yang sebenarnya dari Sistem Peradilan Pidana tersebut. Khususnya berkaitan dengan peradilan anak, tujuan yang ingin dicapai – yaitu kesejahteraan anak<sup>92</sup> - menemui perbenturan nilai dengan tujuan yang digariskan terhadap birokrat kepolisian yang melakukan penyidikan dalam kasus anak. Dengan mengejar output dan hasil kerja nyata dari pihak kepolisian, menunjukkan bahwa tujuan yang sebenarnya dari peradilan anak diterjemahkan sendiri dan diarahkan sesuai dengan tujuan dari organisasi kepolisian sebagai suatu organisasi birokrasi.

---

<sup>92</sup> Konsep Kesejahteraan anak tidak terlepas pada konsep kesejahteraan sosial, yaitu sebagai suatu sistem yang terorganisasi (*organized system*) yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Sebagai suatu sistem, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan-tujuan yang menurut Leonard Schneiderman mencakup :

1. *System maintenance* (sistem pemeliharaan), dimana tujuan kesejahteraan sosial mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta nilai-nilai sosial;
2. *System Control*, yaitu mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada;
3. *System Change* (sistem perubahan), yaitu dengan mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Leonard Schneiderman dalam M. Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Edisi ke-1, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 32-33.

## 2. Kurang Difungsikannya Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak

Eksistensi lembaga bantuan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana telah diakui oleh banyak ahli.<sup>81</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Muladi, struktur hukum dalam sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non-institusional. Mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi subsistem.<sup>82</sup> Dalam peradilan pidana anak, fungsi pembimbing kemasyarakatan-pun tidak kalah pentingnya, terutama dalam memahami persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan sosial dan perilaku anak.

Pada Bagian III dari SMR-JJ (*the Beijing Rules*) tentang Ajudikasi dan Disposisi, karakteristik yang berorientasi pada perlindungan hak anak ditentukan secara tegas tentang hak anak atas kehadiran orang tua, wali, atau penasihat hukumnya. Tentang penasihat hukum tertuang dalam : Rule 15.1 yaitu :

<sup>81</sup> Menurut Romli Atmasasmita, dewasa ini komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai komponen yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana, dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima;
2. Penempatan komponen penasihat hukum di luar Sistem Peradilan Pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja Sistem Peradilan Pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode Etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat, dan sederhana;
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisme*, op.cit., hal. 25-26.

<sup>82</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit., hal. 21. Juga dapat di lihat dalam pengertian yang diberikan oleh Mardjono, bahwa profesi penasihat hukum dianggap sebagai suatu sub-subsistem dari subsistem pengadilan.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, op.cit., 1994, hal. 79.



*Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal advisor or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.*

(Selama pemeriksaan si anak harus memiliki hak untuk diwakili oleh penasihat hukum atau meminta bantuan hukum secara gratis bila di negara tersebut terdapat peraturan yang demikian).

Lebih lanjut dalam komentar dikatakan bahwa kehadiran penasihat hukum atau bantuan hukum gratis, diperlukan untuk menjamin bantuan hukum si anak.

Dalam hukum positif Indonesia, hak untuk didampingi penasihat hukum tertuang pada Bab VII UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), yang merumuskan bahwa :

- Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

- Pasal 70 ayat 1

Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Kedua pasal di atas memberi tempat bagi eksistensi penasihat hukum, yang sebenarnya dapat dimulai pada saat permulaan seseorang diduga oleh aparat telah melakukan kejahatan dan terhadapnya dilakukan penangkapan. Dalam kasus anak, kehadiran orang tua atau wali yang dipandang sebagai bantuan psikologis dan emosional terhadap anak<sup>83</sup>, dan penasihat hukum sebagai bantuan kepentingan hukum bagi si anak, amatlah dibutuhkan. Hal tersebut semata-mata demi perlindungan hak anak, dan menjaga dampak stigmatisasi terhadapnya.

---

<sup>83</sup> Baca Commentary Rule 15.2. dalam SMR-JJ (The Beijing Rules)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam kasus kenakalan anak dipertegas kembali setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan tersebut terdapat pada :

- Pasal 51

- (1). Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- (2). Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orangtua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

- Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Dalam Penjelasan Pasal 52 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajiban ini (pemberian bantuan hukum-pen), Penasihat Hukum memperhatikan pula pendapat petugas kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 undang-undang ini. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pengaturan bantuan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (6).

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, maka diperlukan pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak/kurang mampu. Terlebih terhadap kasus anak dimana kualitas kenakalannya berupa pencurian, yang sebagian besar dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai keluarga berstatus sosial rendah/kurang mampu, kesempatan memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma amat dibutuhkan. Penyelenggaraan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02. UM. 09. 08. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dalam Pasal 1 dirumuskan :

- (1). Pemberian Bantuan Hukum dalam Keputusan ini diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum.
- (2). Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam perkara pidana :
  1. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup, atau pidana mati;
  2. yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Kemudian dalam Pasal 2 tentang Penentuan Tertuduh yang Tergolong Tidak/Kurang Mampu, dirumuskan :

- (1). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perkara diajukan itu termasuk perkara seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), maka Pengadilan berkewajiban memberitahukan kepada tertuduh tentang hal itu dan adalah haknya untuk didampingi oleh Pemberi Bantuan Hukum menurut keputusan ini, apabila ia tidak mampu membiayai seorang Pembela;
- (2). Dalam hal tertuduh menyatakan bahwa ia tidak/kurang mampu untuk membiayai Pemberi Bantuan Hukum, maka disyaratkan adanya surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (setidak-tidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat).

Dalam Pasal 3 tentang Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum Dana Biaya yang dimaksud, dirumuskan :

- (1). Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut, setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk seseorang atau lebih Pemberi Bantuan Hukum.
- (2). Penunjukan dimaksud ditetapkan dengan surat Penetapan Ketua Majelis Hukum yang akan mengadili perkara tersebut.
- (3). Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk harus dikenal mempunyai nama baik, yang sanggup memberikan bantuan atau jasa-jasanya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang dimaksud adalah sekedar merupakan imbalan jasa mengenai penggantian ongkos jalan, biaya administrasi, dan lain sejenisnya.

- (4). Pemberi Bantuan Hukum dimaksud, diutamakan yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat.
- (5). Apabila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat tidak ada Pemberi Bantuan Hukum, dapat ditunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal-pasal yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, terlihat itikad baik pemerintah Indonesia dalam hal pemerataan kesempatan (non diskriminatif) untuk memperoleh keadilan yang berhak diperoleh oleh warga negara tanpa melihat status dan kehidupan sosialnya. Hanya sayangnya, perolehan hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut baru diperoleh oleh tertuduh/tersangka – termasuk tersangka anak – pada saat ia sudah dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, dan belum diberikan pada tahap sebelumnya. Sementara KUHAP dalam Pasal 69 menyatakan bahwa kontrak antara tersangka/tertuduh dengan penasihat hukumnya telah dimulai pada saat penangkapan (tingkat penyelidikan). Dalam instrumen internasionalpun hal tersebut bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Rule 15.1 SMR-JJ (*The Beijing Rules*).

Dalam praktek, pelaksanaan hak untuk didampingi penasihat hukum khusus dalam perkara kenakalan anak/tindak pidana anak masih amat kurang, yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya ditemui 1 kali pemberian bantuan oleh penasihat hukum dalam kasus pembunuhan di tahun 1994. Dari penelitian didapatkan data bahwa peranan penasihat hukum cenderung difungsikan dalam kasus-kasus yang bersifat komunal, umpama kasus-kasus yang berkaitan dengan perburuan, kasus-kasus lingkungan, atau kasus tanah rakyat. Karena itu pokok permasalahan yang melatarbelakangi kondisi yang demikian haruslah dicari, dan pada akhirnya dapat dicari solusi pemecahannya, agar norma hukum yang tertulis dalam perumusan

undang-undang bukanlah sekedar “pajangan” belaka, tetapi dapat teraktualisasi dalam realitas sosial.

### **3. Kurang Difungsikannya Secara Optimal Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak**

Dalam Bab terdahulu (Bab II sub D bagian 3) telah dipaparkan secara sekilas tentang keikutsertaan pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan anak. Pada bagian ini akan dibahas tentang fungsi badan/lembaga tersebut secara menyeluruh dan manfaatnya dalam memberikan masukan-masukan untuk kelancaran, keefektifan, dan keefisienan petugas penegak hukum dalam proses peradilan anak. Namun sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu pembimbingan secara umum terhadap klien pemasyarakatan yang dilakukan oleh suatu badan yang bernaung dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS, dahulu BISPA).<sup>84</sup>

Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) adalah Pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Dalam Pola Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (lihat Skema Pola Pembimbingan Klien Pemasyarakatan pada Lampiran), mencakup :

- a. Sumber Klien.
  - b. Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
  - c. Kerjasama.
- a. *Klien Pemasyarakatan BAPAS bersumber pada :*

- Masyarakat, yaitu permintaan pelayanan masyarakat (PPM).
- BAPAS lain, karena ada pelimpahan.

---

<sup>84</sup> Pendirian BISPA berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M. 02. PR. 07. 03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

- LP Anak, yaitu berkenaan dengan asimilasi, anak asuh, cuti mengunjungi keluarga (C.M.K), cuti menjelang bebas (C.M.B), dan pembebasan bersyarat (P.B).
- Pengadilan Negeri, berkaitan dengan pidana bersyarat (PiB), pidana pengawasan, anak yang diputus hakim dikembalikan kepada orang tua/wali/ pengasuh, wajib latihan kerja, dan anak sipil.
- Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, berkaitan dengan pembebasan bersyarat (P.B), cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi/kerja pada pihak ketiga.

*b. Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, terdiri dari :*

- Penerimaan.
- Pendaftaran.
- Status Klien.
- Tahap Awal.
- Tahap Lanjutan.
- Tahap Akhir.

Yang bertujuan untuk : (1) Membentuk warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya; (2) Menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana; (3) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan serta dalam pembangunan; (4) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; (5) Dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

*c. BAPAS melakukan kerjasama dengan :*

- Instansi Pemerintah, yaitu Penegak Hukum mencakup : pengadilan, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, BAPAS lain, kepolisian, kejaksaan; dan instansi terkait mencakup : Departemen-Departemen, yaitu Departemen Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Transmigrasi dan P.P.H; dan Pemerintah Daerah.
- Masyarakat/Mitra Kerja, yaitu : individu/perorangan, keluarga/kelompok, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Dalam hal pembimbingan Klien Pemasarakatan, program-program yang dilakukan meliputi<sup>97</sup> : (a) pendidikan agama; (b) pendidikan budi pekerti; (c) bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok; (d) pendidikan formal; (e) kepramukaan; (f) pendidikan keterampilan kerja/pelatihan; (g) pendidikan kesejahteraan keluarga; (h) psyko-terapy; (i) Kepustakaan; (j) dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien yang belum tercakup dalam point di atas.

Pembimbing Kemasyarakatan<sup>98</sup> - sebagai petugas pemasarakatan pada BAPAS - mempunyai tugas dan fungsi meliputi<sup>99</sup> :

- (a). melakukan penelitian kemasyarakatan (selanjutnya disebut Litmas) untuk sidang peradilan, sidang TPP Lapas, pembimbingan BAPAS, calon anak asuh, orang tua asuh/wali dari calon anak asuh, calon keluarga asuh, calon pengasuh oleh BAPAS, dan Litmas untuk instansi lain;
- (b). melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan serta membuat laporan perkembangan klien;
- (c). mengikuti sidang pengadilan dan sidang TPP Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan memberikan penjelasan tentang Litmas yang dibuatnya bila diperlukan;
- (d). mencari calon pengasuh bagi Anak Negara;
- (e). mengadakan pemanggilan klien dalam rangka pembimbingan;
- (f). membantu klien untuk mengikuti pendidikan dan keterampilan kerja/pelatihan;
- (g). membantu menyalurkan klien untuk mendapatkan pekerjaan ke Depnaker setempat sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya;
- (h). memberikan bantuan moral kepada klien dalam rangka memajukan usahanya.

Terhadap proses peradilan anak, fungsi petugas sosial (*Social Worker*) sebagai pembimbing kemasyarakatan, telah dimulai setelah dikeluarkan Petunjuk/Pedoman dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959 tentang Tata Cara Pemeriksaan

<sup>97</sup> Bahan Rapat Teknis Pemasarakatan Kanwil DEPKEH Sumatra Selatan, tanggal 10-11 Juni 1996.

<sup>98</sup> Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan pada BAPAS merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan terhadap klien.

<sup>99</sup> Bahan Rapat Teknis Pemasarakatan, *ibid.*

Perkara dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1979 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak yang khusus diberlakukan bagi Pengadilan Negeri Daerah Hukum Jakarta. Fungsi tersebut dipertegas oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 06. UM. 01. 06. Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidang, yang kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 03. UM. 01. 06 Tahun 1991 mengubah kata dapat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 menjadi kata wajib. Pengubahan menjadi kata wajib memberi pengertian bahwa pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) diwajibkan/diharuskan bagi pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak.

Dengan dibuatnya laporan hasil penelitian kemasyarakatan akan dapat memberi gambaran kepada hakim apa yang menjadi penyebab dari kenakalan anak. Jadi kegunaannya adalah untuk melengkapi data lainnya yang terdapat selama persidangan, bukan untuk mempengaruhi dan mengurangi wewenang hakim dalam mengambil keputusan. Tujuan dari litmas ini adalah untuk kepentingan anak demi kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peran bimbingan kemasyarakatan (BAPAS) menjadi kompleks dan cukup menantang. Ditinjau dari peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sebelumnya hanya mencakup dua aspek kegiatan utama yaitu pembuatan Litmas dan Pembimbingan, namun dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 maka peran PK semakin meningkat menjadi empat aspek kegiatan utama yaitu :

- a. Pembuatan Litmas, (Penelitian Masyarakat).
- b. Pembimbingan.



- c. Pengawasan (vide Pasal 43 huruf a UU No. 12 Tahun 1995 dan Pasal 34 ayat (1). b UU No. 3 Tahun 1997).
- d. Memberi pertimbangan (*advisor*) (vide Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

Dengan semakin banyaknya aspek kegiatan utama Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka untuk memudahkan sosialisasi terhadap peran dan etos kerja PK, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI mengeluarkan surat yang bernomor : E. PK. 04. 10-69 Perihal Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tertanggal 4 Mei 1999 yang menetapkan Visi, Misi, dan Sasaran kegiatan PK sebagai berikut :

- Visi : Cermat dalam penelitian  
Tepat dalam pembimbingan  
Ketat dalam pengawasan  
Mantap dalam pertimbangan.
- Misi : Menyelenggarakan pembimbingan Klien Pemasyarakatan, pembuatan Litmas, pengawasan, dan memberikan pertimbangan dalam rangka mewujudkan peradilan pidana terpadu.
- Sasaran : Membimbing Klien Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang berguna serta mendukung terwujudnya peradilan pidana terpadu.

Pengaturan tentang Pembimbing kemasyarakatan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tertuang dalam BAB IV tentang Petugas Kemasyarakatan pada Pasal 33 sampai Pasal 39.

Dalam Pasal 33 dirumuskan bahwa :

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.



Tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan tertuang dalam Pasal 34, yaitu :

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal perbantuan pada pemeriksaan disidang pengadilan, pada Pasal 56 dirumuskan :

- (1). Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
  - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
  - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Apa yang dimaksud dengan penelitian kemasyarakatan (Litmas) tersebut adalah rangkuman data yang diperoleh dari hasil wawancara Pembimbing Kemasyarakatan dengan klien, keluarga klien, masyarakat tempat tinggal klien, serta pemerintah setempat.

Pelaksanaan dari Pasal 56 di atas yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang -- sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 06. UM. 01. 06 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 03 - UM. 01. 03 Tahun 1991 khusus Pasal 12 ayat (2) - tertuang dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) berisikan :

Ayat (1). Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang

bersangkutan, menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak tersebut, agar dapat diketahui latar belakang kehidupan anak yang bersangkutan.

- (2). Dalam hal di wilayah hukum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.
- (3). Laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan;
  - b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Berkaitan dengan ayat (2) di atas, dengan merujuk pada surat Direktorat Jendral Pemasyarakatan tanggal 9 Maret 1998 No. E. PK. 04. 10-23 perihal Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01. PK. 04. 10 Tahun 1998 dan usul pengangkatan PK butir 2, bilamana wilayah kerja BAPAS terlampau luas maka diperintahkan kepada KALAPAS/KARUTAN yang lokasinya sulit dijangkau oleh BAPAS untuk mengusulkan petugasnya yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PK yang nantinya berfungsi melaksanakan tugas BAPAS yang berada di dalam wilayah hukum LAPAS/RUTAN bersangkutan.

Untuk memenuhi tugas Pembimbing Kemasyarakatan<sup>88</sup> dalam hal pembuatan Litmas seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1). a UU No. 3 Tahun 1997 guna memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim, dimana apabila tersangka anak berdomisili di

<sup>88</sup> Di Jepang, ketika Pengadilan Keluarga (*Kateisaibansho*) menerima perkara anak pelaku kejahatan, maka pengadilan memerintahkan pejabat "*choosakan*" untuk meneliti keadaan anak. *Choosakan* adalah pekerja sosial yang meneliti latar belakang sosial – yaitu lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal dan lain-lain – anak yang dikirim ke Pengadilan keluarga dan membuat laporan sosial yang disertai dengan saran tentang perlakuan terhadap anak tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Anak yaitu UU No. 168 Tahun 1948). Tatsuya Ota dalam makalah "Situasi Pembinaan Anak Nakal Di Dalam Lembaga Di Jepang Pada Saat Ini", Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, hal. 115.

wilayah BAPAS yang berbeda dengan wilayah Pengadilan Negeri tempat anak tersebut disidangkan, maka Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Surat Nomor : E. PK. 04. 07-48 Perihal Mekanisme Pembuatan Litmas antar daerah tertanggal 6 Mei 1998 menyatakan :

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim minta Litmas kepada BAPAS setempat yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengadilan Negeri tersebut.
- b. BAPAS tersebut di atas mohon bantuan kepada BAPAS tempat domisili anak, guna pembuatan Litmas dengan melampirkan identitas dan risalah singkat anak tersebut antara lain :
  - (1). Apakah ditahan atau tidak, jika ditahan sejak kapan.
  - (2). Latar belakang perbuatan melanggar hukum, termasuk faktor penyebab.
  - (3). Masalah perbuatan melanggar hukum hendaknya diuraikan secara kronologis.
  - (4). Akibat yang timbul atas perbuatan melanggar hukum terhadap dirinya, keluarga, kerabat, dan lingkungan masyarakat.
- c. Selanjutnya hasil Litmas tersebut disampaikan kembali kepada BAPAS pemohon bantuan, untuk seterusnya BAPAS pemohon bantuan menyampaikannya kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Ketua Pengadilan Negeri.

Melihat perbantuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatan Litmas di wilayah hukum Palembang, pada dasarnya telah mengalami kemajuan sebagai dampak penyesuaian diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1997 secara efektif. Hal tersebut terlihat dari sifat perbantuan yang dahulu baru dimintakan pada saat menjelang hari sidang anak, namun semenjak bulan Mei 1999 telah mulai difungsikan pada proses penyidikan. Hanya sayangnya, sifat perbantuan tersebut dimanfaatkan oleh penyidik yang melakukan penyidikan kasus kenakalan anak hanya sebatas memenuhi formalitas belaka, karena penuntut umum yang diserahi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap anak tidak akan menerima berkas pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum tanpa dilampirkan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang bersangkutan.

#### 4. Kurang Diakuinya Eksistensi Psikologi Dalam Penanganan Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak

Herman Mannheim dalam bukunya *The Dilemma of Penal Reform* seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan akibat buruk dari pidana penjara, khususnya pada penyelenggaraan peradilan anak, diperlukan adanya kolaborasi antara ahli hukum, ahli psikologi, dan ahli psikiatri.<sup>89</sup>

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan anak (dimulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan) dibutuhkan organ-organ yang lebih banyak dibanding dengan peradilan orang dewasa, semata-mata demi pemahaman dan pendalaman latar belakang perilaku mereka – yaitu perilaku menyimpang – dan perlakuan yang cocok terhadap anak tersebut, untuk menunjang upaya perlindungan dan kesejahteraan si anak.

Secara umum, Psikologi Kriminal – sebagai cabang Psikologi – bermanfaat untuk mempelajari faktor kejiwaan (*psyche*) yang berhubungan dengan kejahatan, yang meliputi :

- a. Struktur kepribadian dan hubungannya dengan perilaku kejahatan atau hubungan antara kejahatan dan struktur kepribadian si pelaku kejahatan.
- b. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan :
  1. Jiwa manusia yang sakit yang berhubungan dengan kejahatan (hal ini menjadi studi Psikiatri Kriminal)
  2. Jiwa manusia yang tidak sakit, namun terdapat kelainan atau ketidaknormalan yang diantaranya dapat menimbulkan dilakukannya perbuatan jahat.
- c. Pengaruh interaksi sosial atau situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- d. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat membina keyakinan individu tertentu untuk memilih dan menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau berbuat kejahatan daripada mentaati undang-undang.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, tanpa tempat, 1984, hal. 17, dikutip dari Herman Mannheim, *The Dilemma of Penal Reform*, George Allen and Unwind Ltd, London, 1939, hal. 206.

<sup>90</sup> Soedjono, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal.33.

Dalam pandangan Psikologi, istilah kejahatan, pelanggaran, kenakalan, atau lainnya tidaklah dikenal, tetapi teridentifikasi menjadi "normal" dan "tidak normal" (abnormal), yang maksudnya sama dengan istilah-istilah yang dikenal dalam hukum pidana.

Tingkah laku yang normal menurut Dra. Kartini Kartono merupakan tingkah laku yang adekuat (serasi tepat), yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya beliau memberikan pengertian tentang tingkah laku pribadi yang normal tersebut, adalah :

"Sikap hidupnya/*attitude*-nya sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sehingga tercapailah satu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan"<sup>103</sup>

Manusia mempunyai motif yang kuat untuk hidup teratur, aman, tenteram, dan ingin menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidupnya. Usaha manusia memenuhi hasrat tersebut tergantung pada kemampuan individu, karena tiap manusia itu memiliki daya tahan diri dalam menghadapi rangsangan dari luar.

Mekanisme penahanan diri (*defence mechanism*) tidak dapat berfungsi secara optimal, disebabkan adanya gangguan pada perkembangan kepribadianya. Gangguan pada kepribadian tersebut menurut Soerjono Soekanto disebabkan oleh :<sup>104</sup>

- " 1. Tekanan-tekanan kekecewaan, konflik, dan kekhawatiran yang tidak teratasi yang menimbulkan gejala neurosis dan psikosis.
2. Gangguan pada perkembangan kepribadian, sehingga menyebabkan terjadinya gejala sosiopatik (*sociopathic personality*)."

Dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, seseorang dapat bertindak laku yang abnormal atau berperilaku yang melanggar norma-norma hukum dan norma kemasyarakatan.

<sup>103</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 2.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 40.

Gangguan kejiwaan itu dapat berwujud kelainan-kelainan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar<sup>105</sup> seperti yang diungkapkan oleh Kartini Kartono<sup>106</sup> dan B. Simandjuntak<sup>107</sup>, yaitu :

- a. Psikoncurosa (*Neurosis*)
- b. Psikopat (*Sosiopathik*)
- c. Psikosa (*Psikosis*)

Untuk lebih memahami tentang ketiga kelompok kelainan kejiwaan tersebut akan kita bahas satu-persatu pada bagian berikut.

- a. Psikoncurosa (*Neurosis*).

Yang dimaksud dengan penyakit kejiwaan Psikoncurosa atau yang populer disebut neurosis adalah sekelompok reaksi psikis yang dicirikan secara khas dengan unsur kecemasan, dan secara tidak sadar diekspresikan dengan jalan menggunakan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*).<sup>108</sup>

Pada gejala-gejala neurosa, si penderita tidak mampu mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya. Tingkah lakunya aneh-aneh dan kadangkala si penderita membenci dirinya sendiri. Sebab utamanya adalah faktor psikologi dan kultural yang menyebabkan timbulnya banyak ketegangan, sehingga pribadi mengalami frustrasi dan konflik emosional. Kebanyakan penderita memiliki IQ yang tinggi, memiliki daya kritis dalam menilai situasi yang bertentangan,

---

<sup>105</sup> Para ahli Psikologi berbeda pendapat mengenai pembagian jenis penyakit atau gangguan kejiwaan tersebut.

<sup>106</sup> Kartini Kartono, op.cit., hal. 82-139.

<sup>107</sup> B. Simandjuntak, Psikologi Perkembangan, Edisi Revisi, Tarsito, Bandung, 1979, hal. 345.

<sup>108</sup> Kartini Kartono, loc.cit.

yang mengakibatkan si penderita merasakan adanya konflik terus menerus. Si penderita kadangkala merasakan takut terus menerus, yang bisa muncul pada setiap kejadian meskipun tidak ada rangsangan secara khusus. Bila gangguan itu pada alam sadar, maka penderita akan kehilangan ingatan atau mungkin bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan tidur (*somnambulist*).

Gejala lain, penderita memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa dikontrol meskipun bertentangan dengan kemauan yang sadar sewaktu melakukannya. Hal yang aneh bahwa penderita merasa puas bila kemauannya itu dilaksanakan, namun sebaliknya apabila tidak dilakukan ia merasa berdosa, tidak senang/tidak puas, dan akan bingung/panik. Kecenderungan akan melakukan perbuatan itu berupa perbuatan mencuri (*kleptomania*), membakar (*pyromania*), minum-minuman keras (*dipsomania*) dan sebagainya.

#### b. Psikopat (*Sosiopatik*)

Bentuk gangguan kejiwaan ini adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Penderita memperlihatkan tingkah laku yang anti sosial, tidak memperdulikan norma yang ada dalam masyarakat. Ada juga yang menyebutnya Sosiopati (*Sociopathy*) karena yang dirugikan adalah masyarakat. Sikap penderita egosentri dalam bentuk yang ekstrim penderita dapat menjadi orang yang mempunyai kelebihan yang istimewa, misalnya dapat menjadi penipu ulung, pembunuh ulung.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Ibid.



Pritchard<sup>110</sup> berpendapat bahwa penderita psikopat adalah orang yang menderita perkembangan kemampuan kejiwaan yang disharmonis, yang menyebabkan penderita-penderita terhalang hidup sedemikian rupa, sehingga mereka sendiri dan sesama manusia selalu menderita ketidakscnangan dan penderitaan. Penderita sejak masa mudanya sedikit sekali bahkan hampir sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang, tidak pernah merasakan kemesraan dari orang tua dan lingkungannya. Maka setelah dewasa si penderita kehilangan *sense of sociality* dan *sense of humanity*.

Menurut Soerjono Soekanto yang termasuk dalam gangguan kejiwaan ini adalah :<sup>111</sup>

- (1). Reaksi anti sosial, yang bercirikan hampir-hampir tidak mempunyai etika/moral, bersikap agresif karena tidak tahan pada tekanan-tekanan berupa kekecewaan.
- (2). Reaksi *dissosial*, yaitu yang terus menerus menjadi perusuh (*constant trouble maker*), dan selalu berurusan dengan hukum yang disebabkan karena latar belakang kehidupan yang mempengaruhinya, misalnya :
  - lingkungan dimana ia mendapatkan penghargaan sebagai orang berhasil itu adalah orang yang berbuat jahat.
  - lingkungan yang membentuk norma sendiri, yang dalam hal tertentu bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
  - lingkungan keluarga yang tidak baik, misal hubungan antara orang tua yang tidak wajar (disharmonis).
- (3). *Deviasi seksual*, yaitu penyimpangan seksualitas dalam bentuk masturbasi, homo seksualitas sasihiasis, impotensi, pelacuran, incest, pedophilia, bestiality, perkosaan, sadism, dan necophilia.
- (4). *Addiction*, yang menderita karena ia selalu membiasakan diri untuk melakukan yang menimbulkan kenikmatan bagi dirinya tanpa mengindahkan bahaya yang bakal menimpa dirinya. Misalnya alcoholism, mengakibatkan yang bersangkutan berubah psikis dan phisiknya yang akhirnya berubah kepribadiannya.

<sup>110</sup> Pritchard dalam Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pasiarnan, *Psikiater dan Pengadilan*, Bina Cipta, tanpa tempat dan tahun, hal. 84.

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 42-43.

c. Psikosa (*Psikosis*)

Psikosa merupakan jenis gangguan jiwa yang berat, bahkan dapat dikatakan keseluruhan organ jiwanya sudah tidak berfungsi lagi. Para ahli jiwa (*Psikiater*) membuat rumusan definisi sebagai berikut :

"Psikosa merupakan gangguan kejiwaan (kelainan kepribadian) yang meliputi keseluruhan kepribadian (emosi, berfikir, dan sebagainya) seseorang, sehingga orang yang menderita tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat."<sup>112</sup>

Selain itu ada juga yang membuat definisi psikosa adalah :

"Bentuk disorder mental atau kekalutan mental yang dicirikan dengan adanya disintegrasi kepribadian dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas."<sup>113</sup>

Dan kedua definisi di atas, bahwa si penderita mengalami gangguan untuk berintegrasi dengan lingkungannya, bahkan sudah tidak ada kontak dengan realitas, kehilangan orientasi pada lingkungannya, maka ia sering menghayal. Penderita tidak berkemampuan untuk mengadakan partisipasi sosial, bahkan kadang-kadang agresif menyerang pada orang lain, merasa orang yang super dan memperlihatkan gejala kecurigaan yang berlebihan, dan diproyeksikan pada orang lain untuk membela egonya.

Dalam mengkaji masalah kejahatan/pelanggaran, peranan psikologi disertakan untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara jiwa raga dengan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum ini. Pasal-pasal dalam hukum pidana baik yang terumus dalam KUHP maupun di luar KUHP memberi petunjuk perlunya mengetahui kondisi jiwa (*psyche*) si pelaku. Hal ini

---

<sup>112</sup> B. Simandjuntak, loc.cit.

<sup>113</sup> Kartini Kartono, op.cit., hal. 115.

berguna untuk mengetahui ada atau tidak adanya salah satu unsur perbuatan pidana, seperti yang diungkapkan oleh D. Soedjono sebagai berikut :

“Unsur-unsur psikologis dalam kejahatan, berapapun biasanya nampak sebagai unsur pembentuk *mens rea*, yaitu sifat kesalahan si pelaku, bersama dengan sifat ketidaktaatan terhadap hukum....Aspek psikologis dari kejahatan merupakan bagian dari perbuatan kriminal dan sebagai yang salah dari aspek psikologis ini menentukan sifat kesalahan si pelaku.”<sup>114</sup>

Pengetahuan tentang hubungan aspek psikologis atau sikap batin si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya adalah penting dalam hal penentuan pertanggungjawaban hukum pidana. Sebab pertanggungjawaban hukum pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karenanya. Untuk mengetahui sikap batin si tersangka dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan, apakah perbuatan itu atau akibat perbuatan itu dikehendaki dan diketahui terdakwa, dengan kata lain apakah ada unsur kesengajaan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kesengajaan, ada dua teori yaitu :

1. Teori Kehendak, yang mengatakan kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Jadi harus ada hubungan kausal antara perbuatan, tujuan, dan motif dalam batin terdakwa;
2. Teori Pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang. Jadi teori ini menganggap bahwa ada atau tidaknya kesengajaan itu cukup dengan perbuatan dan akibatnya itu diketahui, dimengerti, atau diinsyafi oleh terdakwa.<sup>115</sup>

<sup>114</sup> D. Soedjono, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 38.

<sup>115</sup> Mudzakkir, *Peranan Psikologi dalam Penerapan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1985, hal. 47.

Moeljatno dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" cenderung mengikuti teori Pengetahuan, dengan alasan:<sup>104</sup>

"Kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong atau berbuat) dan tujuan perbuatan."

Jadi untuk menentukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menurut Moeljatno cukup dengan perbuatan itu diinsyafi atau disadari si pelaku.

Dalam hal menghadapi pelanggaran yang pelakunya adalah seorang anak, data di lapangan menunjukkan bahwa peranan psikologi disadari masih amat kurang, sementara untuk menentukan apakah seorang anak itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak, berkaitan erat dengan keadaan batiniah/kejiwaan si anak. Tindakan yang diberikan kepada anak-anak pelaku selama ini tidak berbeda dengan tindakan yang diberikan pada seorang dewasa yang melakukan kejahatan, dan menimbulkan kekhawatiran akan sangat mempengaruhi perkembangan kejiwaan (psyche) si anak. Pada akhirnya, bukan kebaikan yang dicapai, tetapi justru menjerumuskan si anak ke dalam persoalan yang tidak saja mengenai diri si anak, tetapi juga keluarganya, masyarakat, bahkan masa depan suatu bangsa.

---

<sup>104</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, op.cit., hal. 117.

#### **D. UPAYA FUNGSIONALISASI LEMBAGA PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA, WALI, ATAU ORANG TUA ASUH DALAM KASUS KENAKALAN ANAK/TINDAK PIDANA ANAK**

##### **1. Eliminasi Perbedaan Perspektif Struktur Peradilan Anak Tentang Tujuan Peradilan Anak**

Pada bagian akhir Bab III sub C bagian 1.a. di atas telah dikemukakan bahwa aparat-aparat yang terkait dalam peradilan anak sebagai sub sistem dari sistem peradilan anak, idealnya mempunyai persepsi dan sikap yang saling menunjang untuk mencapai tujuan dari peradilan anak itu sendiri, yaitu kesejahteraan anak. Perbedaan persepsi dari struktur hukum peradilan anak - yang terfokus pada penyidik dan penuntut umum disatu pihak, dengan hakim/aparat pemutus dilain pihak - berakibat pada terhambatnya pencapaian tujuan tersebut. Terutama pada aparat penyidik, perbedaan persepsi yang dimaksud terkait pada masalah perbenturan nilai yang ada dimana tujuan yang sebenarnya dari peradilan anak diterjemahkan dan diarahkan sendiri ke arah pencapaian tujuan organisasi kepolisian sebagai suatu organisasi birokrasi.

Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, ada kondisi-kondisi yang dapat diperhitungkan oleh pihak kepolisian, untuk menjawab persoalan-persoalan yang menyangkut perbenturan nilai tersebut. Apabila seorang anak terdakwa/tertuduh yang terhadapnya telah diadakan penyelidikan/penyidikan - sebagai awal berjalannya proses peradilan - dan terhadapnya dimasukkan dalam lembaga penahanan, pihak kepolisian (juga penuntut umum dan hakim) berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan. Upaya tersebut salah satunya adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang kelak akan mempengaruhi pertumbuhan mental spiritualnya, yang tak terlepas dari upaya untuk menyejahterakan anak. Penangguhan penahanan - terutama yang dilakukan pada saat proses penyidikan dan penuntutan sebelum diadakan pelimpahan ke pengadilan - adalah kondisi yang dalam proses peradilan anak dapat membantu hakim dan berpotensi untuk dijatuhkannya putusan

pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Dalam pengertian lain, apabila sejak awal si anak tidak dimasukkan dalam tahanan, akan terhindar pemberian putusan penjara oleh hakim, yang sebagian besar semata-mata dijatuhkan untuk menyeimbangkan antara lamanya pidana penjara dijatuhkan sama dengan lamanya anak dalam lembaga penahanan (baca kembali penjabaran tabel 10 dalam pembahasan Bab III sub B.2). Dalam hal ini, hakim hanya meneruskan terhadap tindakan-tindakan yang diberikan oleh aparat sebelumnya, untuk menjaga sinkronisasi pelaksanaan peradilan. Selain penangguhan penahanan tersebut, bahkan pihak penyidik - dengan keleluasaan kewenangan yang melekat pada mereka - berhak juga untuk melakukan diskresi terhadap kasus-kasus anak yang ditanganinya, yang berarti telah menghentikan proses pemeriksaan dan mengembalikan anak tersebut pada keluarganya (orang tua/wali/pengasuhnya). Dasar hukum yang melandasi tindakan demikian yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 16 point 1 (UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), yang merumuskan bahwa polisi berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Untuk pemahaman yang lebih luas, pada bagian berikut kondisi-kondisi tersebut akan dibahas satu persatu.

#### Kewenangan Penangguhan Penahanan dalam Kasus Anak

Dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

merumuskan bahwa :

- (1). Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2). Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 1981, yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Dari rumusan penjelasan yang menyatakan bahwa masa penangguhan penahanan tidaklah termasuk status tahanan, memberikan peluang/potensi bahwa pada akhir putusan yang diberikan bagi si anak dapat berupa putusan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, asalkan penangguhan penahanan tersebut diberikan selama proses peradilan yaitu pada masa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Disisi lain, putusan tersebut dapat saja diberikan apabila hakim telah memandang secara teliti keadaan orang tua, wali, atau pengasuhnya yang akan menerima dan mendidik anak tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas :

1. Memberikan pembinaan mental-spiritual dengan sebaik-baiknya.
2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan.
3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.<sup>117</sup>

Kebijakan hakim yang sangat teliti atas dasar kemanusiaan dan kesejahteraan anak, memiliki jangkauan nilai-nilai yang sangat luhur agar anak memperoleh pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan yang sebaik-baiknya.

Untuk pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada point 8 Lampiran, ditetapkan :

---

<sup>117</sup> Sudarsono, op.cit., hal. 30.

- a. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.
- b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983).
- c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut (pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983).
- d. Uang jaminan dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- e. Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3, selai sebagai arsip panitera, selai dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan yang selai lagi dikirimkan oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak ditipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan sebagai alat kontrol.
- f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari panitera pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.
- g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan ditingkat penuntutan.
- h. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh penuntut umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan.
- i. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambilalihan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan memerintahkan kepada panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
- j. Dalam hal tersangka/terdakwa yang lari dimaksud butir i, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjadi tanggungannya, maka untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum secara perdata.



Dalam hal penanggungan penahanan terhadap terdakwa/tertuduh anak ditingkat penyidikan yang ada di lapangan, sumber Kasat Serse Poltabes Palembang Kapten Drs. Mudjiono<sup>106</sup> mengkhawatirkan keadaan-keadaan yang menyangkut :

- a. Perihal penjaminan, yaitu umumnya penyidik kurang mempercayai kapabilitas orang tua/wali yang berstatus sebagai penjamin untuk menghadirkan si anak apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.
- b. Masalah "keyakinan" pihak penyidik, yang khawatir apabila si tertuduh/terdakwa anak akan lari.

Sebenarnya, kekhawatiran demikian justru memberi kesan bahwa dalam penanganan kasus kenakalan anak, pihak penyidik cenderung menutup kemungkinan penanganan yang non-kelembagaan - yang dalam dokumen internasional bertentangan dengan Rule 18.1 dan 18.2 Beijing Rules - sebagai upaya yang salah satunya adalah untuk menghindari stigmatisasi bagi anak. Terlebih kekhawatiran akan larnya si anak, menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah si anak akan mampu melakukan hal yang demikian ? Kekhawatiran tersebut akan sangat wajar apabila ditujukan bagi pelaku dewasa yang mempunyai kemampuan pikir dan tindakan untuk melakukannya.

#### Perluasan Diskresi Dalam Proses Peradilan Anak

Diskresi berasal dari kata "*Discretion*", yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols dan kawan-kawan diartikan sebagai kebijaksanaan, keleluasaan. Alvina Treut Burrow mengartikan *discretion* sebagai *ability to choose wisely or judge for oneself*, artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> KasatSerse Poltabes Palembang Kapten Drs. Mudjiono, Wawancara Pribadi 3 Maret 1999.

<sup>107</sup> M Faal, op.cit., hal. 15.

Sedangkan dalam kasus hukum yang disusun oleh J. C. T. Simorangkir dan kawan-kawan, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>120</sup>

Dengan demikian apabila kata diskresi ini digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Sedangkan menurut Thomas J. Aaron dinyatakan bahwa *"discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more an idea of moral than law"*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>121</sup>

Dengan penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh Sunaryati Hartono bahwa hukum (kaidah) itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.<sup>122</sup> Juga Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab pada saat ia mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan

---

<sup>120</sup> J. C. T. Simorangkir, dan kawan-kawan, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 45.

<sup>121</sup> M. Faal, *loc. Cit.*

<sup>122</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, Alumnus, Bandung, 1996, hal. 3.

akan macet. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.<sup>111</sup>

Dalam SMR-JJ (*The Beijing Rules*) masalah diskresi ini terumus dalam point 6 pada *General Principles*. Ruang lingkup diskresi yaitu :

6.1. *In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety, of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all stages of proceedings and at the different levels of juvenile justice administration, including investigation, prosecution, adjudication, and the follow-up of dispositions.*

(Dalam meninjau tentang beragamnya kebutuhan khusus anak seperti juga beragamnya tindakan yang tersedia, maka ruang lingkup yang tepat bagi diskresi harus diperbolehkan diseluruh tingkatan pemeriksaan dan disetiap tahap proses peradilan anak, meliputi penyelidikan/penyidikan, penuntutan, adjudikasi, dan disposisi lanjutan).

6.2. *Efforts shall be made, however, to ensure sufficient accountability at all stages and levels in the exercise of any such discretion.*

(Harus dilakukan usaha-usaha, bagaimanapun, untuk menjamin keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan diseluruh tingkatan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan setiap diskresi).

6.3. *Those who exercise discretion shall be specially qualified or trained to exercise it judiciously and in accordance with their functions and mandates.*

(Mereka yang melakukan diskresi haruslah mempunyai kualifikasi/kecakapan dan terlatih agar melakukannya secara hukum dan sesuai dengan fungsi dan mandat mereka).

---

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 11.

Perumusan-perumusan di atas, bagi aparat penegak hukum dalam peradilan anak, dituntut untuk secara leluasa dan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi, demi pelaksanaan peradilan anak yang efektif, adil, dan manusiawi. Hanya saja, untuk meredam/mengekang setiap penyalahgunaan kekuasaan diskresi dan untuk melindungi hak-hak anak pelaku, instrumen yang paling tepat adalah “bisa dipertanggungjawabkan” dan profesionalisme” dari aparat yang bersangkutan (*commentary*).

Dalam Rule 17 tentang *Guiding principles in adjudication and disposition*, pada Rule 17.4 dinyatakan bahwa : *the competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time* (pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk setiap saat tidak melanjutkan proses pemeriksaan). Dalam *commentary* dipertegas bahwa kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan tersebut adalah ciri/karakteristik yang melekat dalam penanganan pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*). Berkenaan dengan ciri/karakteristik khas tersebut, Barda Nawawi menyatakan bahwa Rule 17.4 ini adalah satu mata rantai dengan Rule 11.1 dan Rule 11.2 yang mengatur tentang *Diversion*, yang memberi kewenangan kepada polisi, penuntut umum, atau badan-badan lain yang terkait dalam kasus anak untuk mengambil kebijaksanaan khusus berupa tindakan *diversi*.<sup>112</sup>

Pada taraf kepolisian, pemberian diskresi kepolisian sebenarnya bukanlah masalah sederhana, karena ada konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Tuntutan bukan saja karena pertimbangan pengabdian dan kewajiban untuk segera menyelesaikan perkara semata, tetapi diperlukan dukungan intelektual bagi si anggota polisi agar dampak tindakannya betul-

---

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, op.cit., hal. 126.

betul efektif dan efisien. Dia harus mampu memilih keputusan yang terbaik diantara berbagai alternatif.

Untuk mewujudkan profil polisi yang demikian, harus memiliki persyaratan-persyaratan intelektual atau kecerdasan yang memadai, serta harus memiliki jiwa kejuangan atau yang disebut dengan 'pejuang profesional yang tangguh'. Sehubungan dengan itu Sarito Wirawan Sarwono dalam Pidato Dies Natalis PTIK yang ke-11 tahun 1987, melihat segi psikologi ciri-ciri yang perlu dimiliki anggota polisi antara lain dari segi kecerdasan, fisik, dan kepribadian anggota. Menurut beliau, syarat-syarat kecerdasan mencakup :

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi, sedikit-tidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan diatas rata-rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat tarutama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti Brimob).
- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.
- c. Daya pemahaman sosial (*sociat comprehension*) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

Sedangkan sikap kerja polisi disyaratkan :

- a. Ketekunan dalam bekerja.
- b. Daya tahan fisik dan psikis yang tinggi.
- c. Disiplin yang tinggi.
- d. Solidaritas sesama rekan sejawat.
- e. Dapat dipercaya, jujur, taat asas.

Persyaratan kepribadian mencakup :

- a. Kepercayaan diri yang besar.
- b. Kemampuan untuk mengambil keputusan.
- c. Kemampuan persuasi (meyakinkan orang lain).

- d. Loyalitas, setia kepada kesatuan dan atasan.
- e. Konservatif, setia kepada peraturan yang berlaku.
- f. Motivasi yang tinggi.
- g. Khusus untuk Perwira : Kepemimpinan.<sup>113</sup>

Terlepas dari bagaimana keadaan sesungguhnya polisi itu dengan tuntutan persyaratan yang diharapkan, polisi didalam memberikan diskresi kepolisian harus benar-benar proporsional, agar sedapat mungkin profil polisi sebagai penegak hukum, sebagai bapak, teman sejawat, moralis, dan pelindung masyarakat bisa tercalisasi. Selain itu, terhindar dari penyalahgunaan wewenang seperti tindakan korupsi, diskriminatif, angker, dan tindakan-tindakan tidak adil lainnya.<sup>114</sup>

Yang menjadi pertanyaan sekarang, bidang tugas apa saja yang dapat diberikan diskresi kepolisian?. Menurut James Q. Welson, diskresi kepolisian dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian yang secara konsepsional mencakup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara, dan tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse; baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*Order maintenance*), maupun dalam tugas-tugas penegakan hukum (*Law enforcement*). Hanya saja distribusi yang sering/banyak diberikan oleh polisi adalah pada pelanggaran hukum yang didapatkan oleh polisi itu sendiri, sedang pelanggaran hukum yang ditemukan atau dilaporkan warga masyarakat, persentasenya lebih kecil daripada pemberian diskresi yang pertama.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Peranan Psikologi dalam Rangka Optimalisasi dan Dinamisasi Tugas Polri*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK ke-4, 1987, hal. 19.

<sup>114</sup> M. Faal, *op.cit.*, hal. 23.

<sup>115</sup> James Q. Wilson (*Varieties of Police Behavior*) dalam M. Faal, *ibid*, hal. 65.

Lebih lanjut James Q. Wilson mencoba menggambarkan perbedaan diskresi yang diberikan oleh anggota kepolisian yang bersumber pada *order maintenance* dengan *law enforcement* dan terhadap perkara-perkara yang ditemukan atas inisiatif petugas polisi itu sendiri dengan perkara-perkara yang diadukan/dilaporkan warga masing-masing sebagai berikut :<sup>116</sup>

	Police Invoked Action	Citizen Invoked Action
Law Enforcement	I	II
Order Maintenance	III	IV

Pada kasus I, dijelaskan bahwa dibidang tugas polisi represif atau *law enforcement*, perkara-perkara itu didapatkan oleh inisiatif polisi sendiri (terutama perkara-perkara pidana ringan), pemberian tindakan diskresi relatif besar atau misalnya wewenang polisi untuk menangkap/menahan seseorang atau tidak, ada ditangan polisi. Jadi kesempatan pemberian diskresi berskala relatif besar.

Pada Kasus II, masih dalam lingkup bidang tugas represif (*law enforcement*), tetapi perkaranya didapatkan atau dilaporkan/diadukan oleh warga masyarakat yang menghendaki agar perkara itu diproses. Di sini pemberian diskresi pada si pelaku kejahatan seperti mengenyampingkan, menghentikan atau tidak memproses, relatif kecil. Namun demikian kewenangan polisi untuk memberikan diskresi itu tetap ada umpama dalam kasus-kasus anak/remaja.

Pada kasus III, di sini dalam lingkup bidang tugas preventif atau *order maintenance*, tetapi perkaranya ditemukan oleh petugas polisi sendiri, sehingga kewenangan pemberian diskresi kepolisian juga relatif besar.

<sup>116</sup> Ibid, hal. 66-67.

Pada kasus IV, masih dalam lingkup bidang tugas preventif (*order maintenance*), tetapi perkaranya dikehendaki oleh warga masyarakat agar dicegah terjadinya peristiwa yang akan mengganggu kedamaian, maka keleluasaan pemberian diskresi bagi petugas disinipun relatif besar.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang didapatkan oleh petugas polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi relatif lebih besar daripada yang didapatkan orang lain – yang menghendaki untuk diproses – terutama dalam perkara *law enforcement*, demi menjaga hubungan baik antara masyarakat dan polisi. Tetapi diskresi yang diberikan terbatas pada perkara-perkara pidana ringan, yang tidak membahayakan kepentingan umum.

Demikian juga perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif (*order maintenance*), pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara *law enforcement*. Hal ini wajar karena tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan negara, sehingga untuk selanjutnya diserahkan tindakan apapun yang akan diberikan polisi, atau dengan kata lain diciptakan sendiri oleh anggota polisi tersebut. Disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi itu.

Dalam memberikan diskresi, polisi berpijak pada landasan yuridis seperti yang terumus dalam Pasal 16 huruf d UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa polisi berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik dan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat :



- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Agar dapat memenuhi/menurut hukum yang bertanggung jawab, seperti yang terumus dalam Pasal 16 huruf e tersebut, penggunaan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang diskresi dan penggunaan wewenang itu ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan sarana undang-undang dan sarana bagi petugas karena rasa tanggung jawab pada tugas-tugas yang diembannya. Namun persoalan akan timbul apabila muncul sisi negatif bilamana pelaksanaan wewenang diskresi itu :

- melampaui batas wewenang (*abuse of power*),
- tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang,
- merugikan orang lain atau pihak-pihak,
- tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal, dan atau pimpinan,
- diskriminatif, kasar, sewenang-wenang, serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya,
- tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.<sup>129</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap pemutusan tindakan diskresi kepolisian ini dapat diminta pertanggungjawabannya dari berbagai segi hukum maupun segi moral dan etika kepolisian. Selain itu, agar pelaksanaan diskresi itu tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki dan yang diatur oleh ketentuan hukum dan kebijaksanaan pimpinan, harus dilakukan pengawasan-pengawasan.

---

<sup>129</sup> Ibid, hal. 121-122.

Pertanggungjawaban pemberian diskresi, bila ditinjau dari segi hukum, akan terkait pada hukum administrasi, hukum pidana militer/disiplin militer, hukum perdata; disamping segi moral dan etika kepolisian. Dalam hukum administrasi, polisi sebagai petugas administrasi negara yang apabila melanggar ketentuan hukum yang mengikat dirinya dan telah ditentukan oleh undang-undang, ia tidak terlepas dari ancaman hukuman. Ancaman atau sanksi hukum itu dapat berakibat pada lembaga maupun pada diri petugas itu sendiri. Dalam hukum militer/disiplin militer, hal yang penting diperhatikan adalah peran utama pimpinan atau Komandan yang disebut Ankum (Atasan yang berhak menghukum). Hal ini sebagai salah satu ciri organisasi militer yang mempunyai satu kesatuan komando (*unity of command*), dimana apabila ada anak buah atau anggota melakukan tindak pidana atau melanggar disiplin, maka Ankum memeriksa dan memutus hukuman bagi si pelaku (anggotanya) berdasarkan Hukum Pidana Tentara (stb 1934 No. 167 yang telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 39 Tahun 1947) dan Hukum Disiplin Tentara (stb 1934 No. 168 yang telah diubah menjadi UU No. 40 Tahun 1947). Dari segi hukum perdata, tindakan anggota polisi yang melampaui batas wewenang banyak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, secara material maupun spiritual. Umpama tindakan karena salah tahan, menimbulkan kerugian bagi si tertahan dan keluarganya yang pada akhirnya menimbulkan inisiatif untuk menuntut ganti rugi. Hukum perdata menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 BW), dan bahwa orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian karena perbuatannya, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati (Pasal 1366 Hukum Perdata/BW). Dari segi moral dan etika kepolisian, tanggung jawab pemberian diskresi tersebut merupakan tanggung jawab batiniah/hati nurani - yang berbeda dengan pertanggungjawaban dari segi hukum formal yang sanksi



umumnya diberikan oleh kekuatan di luar diri polisi – yang sanksinya dirasakan oleh diri pribadi sebagai anggota kepolisian. Mengingat betapa pentingnya peran kode etik ini di lingkungan Polri, berkenaan dengan tugasnya yang banyak menyinggung hak-hak asasi dan wewenang diskresi, maka pada tanggal 1 Juli 1985 dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/213/VII/1985 telah disahkan Kode Etik Polri, dengan 17 butir penjabarannya dan wajib diikrarkan bagi setiap lulusan pendidikan Polri sebelum melaksanakan tugas.<sup>130</sup>

Dalam hal pelaksanaan diskresi, agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki dan yang diatur oleh ketentuan hukum dan kebijaksanaan, pengawasan harus dilakukan. Menurut M. Faal, pengawasan yang dimaksud mencakup beberapa segi, yaitu : dari diri anggota polisi sendiri, pengawasan vertikal (Atasan langsung dan tidak langsung), pengawasan horisontal (instansi samping seperti kejaksaan atau pengadilan), dan masyarakat luas. Pengawasan dalam diri anggota polisi itu sendiri, sesungguhnya yang paling efektif dan sangat penting, karena pengawasan yang berasal dari kesadaran hati nurani ini menyangkut masalah kepribadian anggota yang dilandasi penghayatan dan pengamalan kode etik. Pengawasan dari atasan dilakukan menurut Surat Keputusan Menhankam No. Skep/035/I/1987 tanggal 16 Januari 1987, yang disebut dengan 'Pengawasan Melekat'. Sementara itu, pengawasan horisontal terutama oleh kejaksaan dan pengadilan, adalah berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini berkenaan dengan koordinasi antar sub sistem agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menetapkan Hukum Acara Pidana, misalnya seperti yang tertuang dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP tentang pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam hal dimulainya penyelidikan. Pasal 109 ayat 2 KUHAP tentang pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum apabila terjadi penghentian penyidikan. Terakhir, pengawasan oleh

---

<sup>130</sup> M. Faal, *op.cit.*, hal. 121-135.

masyarakat luas (kontrol sosial), seperti laporan-laporan langsung dari masyarakat baik lisan maupun tulisan, atau kontrol yang dilakukan karena aktivitas media massa.<sup>119</sup>

Khusus pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak-anak/remaja yang melakukan kenakalan; di Palembang biasanya hanya berkaitan dengan perkelahian-perkelahian pelajar, yang memang ditemui langsung oleh petugas di lapangan. Sementara terhadap kualitas kenakalan yang lain – yang berasal dari laporan masyarakat – jarang sekali ditemui kebijaksanaan yang demikian. Secara konseptual, pemberian diskresi juga dapat diberikan terhadap kasus-kasus anak yang berasal dari laporan masyarakat dalam bidang tugas represif (baca kasus II Teori James Q. Wilson). Terlebih terhadap kenakalan pencurian yang memang mendominasi seluruh kualitas kenakalan yang ada, menuntut pihak kepolisian untuk lebih bijaksana (pemberian diskresi) dalam memandang kenakalan anak dan lebih mendasarkan diri atas pertimbangan-pertimbangan mengapa si anak melakukan kenakalan itu (pencurian misalnya). Dengan kata lain, aparat kepolisian dituntut untuk cenderung melakukan tindakan-tindakan informal yang didasarkan atas pemikiran perlindungan terhadap anak<sup>120</sup> dan menghindari prosedur represif dan yustisial yang semata-mata memberi penghukuman terhadap anak. Sementara data di lapangan menunjukkan bahwa pelaku-pelaku pencurian tersebut dilihat dari kehidupan sosialnya, sebagian besar berasal dari lingkungan masyarakat pinggiran/kumuh.

---

<sup>119</sup> Ibid, hal. 136-142.

<sup>120</sup> Di Jepang, prosedur bagi anak pelaku kejahatan (yaitu anak berusia di atas 14 tahun dan di bawah 20 tahun yang disebut "*hanzaishoonen*" atau *juvenile offender*) disebut "prosedur perlindungan" yang sangat berbeda dengan "prosedur pidana" yang diberlakukan bagi orang dewasa. Karena prosedur anak bukan bertujuan untuk menghukum anak, tetapi untuk melindungi dan mendidik anak. Yang perlu bagi anak pelaku kejahatan adalah perlindungan dari negara, bukan hukuman oleh negara. Gagasan demikian dikenal dengan istilah "Azas Prioritas Perlindungan" ("*Hogo Yuusen Shugi*") dan berasal dari "*Parens Patriae*" yang pernah berkembang di Amerika Serikat. Tatsuya Ota, op.cit., hal. 114.

Untuk itulah tindakan diskresi yang merupakan perilaku positif<sup>121</sup> petugas lebih dioptimalkan dalam menghadapi kasus-kasus anak. Pertimbangan misalnya bahwa anak tersebut masih sekolah, atau karena melakukan pencurian ringan, atau tidak membahayakan ketertiban umum, atau ada pemberian maaf dari korban, patut diperhitungkan oleh petugas demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam kajian ilmu psikologi sosial, tindakan diskresi ini digolongkan pada perilaku prososial, yang menurut Hary Prasetya diartikan sebagai perilaku yang memberi keuntungan kepada orang lain yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi sosial positif sehingga akan menambah kebaikan fisik maupun psikis bagi penerimanya.<sup>122</sup>

Sebagai perbandingan, di Surabaya pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal untuk menghindari stigma pemidanaan, yaitu dengan melakukan *hearing* pada anak tersebut, dan langsung menerapkan suatu tindakan atau pemenuhan suatu syarat tertentu antara lain wajib apel, melakukan tugas/kerja yang bersifat sementara.<sup>123</sup>

Tindakan sejenis dikenal pula di Australia Barat dengan sebutan "*Cautioning*" yang dikemukakan oleh Lynn Atkinson : "*In 1991 Western Australian introduced formal police cautioning as a second front to its pre-court diversion program. Formal police cautioning is*

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa apabila suatu sikap tindak atau perilaku itu sesuai dengan tujuan atau maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku positif. Dan apabila sebaliknya disebut perilaku negatif.  
Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan peranan sanksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, hal. 7.

<sup>122</sup> Hary Prasetya, *Mengapa Perilaku Prososial Pada Anggota Polri Diperlukan ?*, Wira Bhakti, Oktober 1997, hal. 12.

<sup>123</sup> Sari Mandiana dalam makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana III dengan judul *Lembaga Peradilan Anak : Prospek dan Permasalahannya, Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita ( Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun)*, op.cit, hal. 81.

*recommended to replace the two tiered panel system and to become the front line response to juvenile offenders".<sup>124</sup>*

## **2. Penumbuhan Sikap Urgensi Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak**

Pada pembahasan Bab III sub C bagian 1.b di atas telah dikemukakan bahwa dalam praktek peradilan anak di Palembang, pelaksanaan hak untuk didampingi penasihat hukum - walaupun telah diatur dapat diperoleh secara cuma-cuma - oleh anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses peradilan pidana, dirasakan masih amat kurang. Sementara bagi anak pelaku, pendampingan/bantuan penasihat hukum tersebut sangat dipentingkan, karena anak adalah tetap seorang anak dengan segala kekurangan dan ketergantungan yang melekat pada diri mereka. Karena itu, penumbuhan sikap akan pentingnya bantuan hukum pada struktur hukum peradilan anak, amatlah wajar untuk direalisasikan.

Dalam kaitan dengan keadaan-keadaan/kondisi-kondisi yang menumbuhkan potensi Lembaga Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, pentingnya pemberian bantuan hukum tersebut idealnya telah dimulai pada saat penangkapan seorang anak yang dituduh/diduga memenuhi rumusan tindak pidana. Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa pengajuan keberatan atas penahanan anak tertuduh/tersangka (yang akan diberikan penahanan setelah penangkapan) -seperti yang tertuang dalam Pasal 123 KUHAP - kepada penyidik atau atasannya yang melakukan penahanan tersebut. Dengan keberatan atas penahanan tersebut, walaupun kasusnya terus berjalan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, akan memberikan

---

<sup>124</sup> Lynn Atkinson, *Responding to Juvenile Crime in the 1990*, Paper for Urban Crime : International Trends in Criminal Policy Conference, Yogyakarta, 1993, hal. 2.

alternatif bagi hakim untuk memberikan tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, untuk menghindari dijatuhkannya putusan custodial/penjara yang pada kenyataannya sebagian besar semata-mata diberikan untuk menjaga keseimbangan koordinasi pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya.

### **3. Optimalisasi Manfaat Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Kasus Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak**

Pada bagian terdahulu (Bab II sub C bagian 1.c) dipaparkan bahwa selama ini pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam peradilan anak masih sangat kurang, karena pada saat pemberlakuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP - sebelum berlakunya UU No. 3 tahun 1997 - sifat perbantuan hanya berkaitan dengan pembuatan "*case study*" si anak pada saat pemeriksaan di pengadilan akan dimulai. Setelah diberlakukannya UU No. 3 tahun 1997, ada kemajuan dalam perbantuan tersebut. Pada bulan Mei 1999, penelitian kemasyarakatan (litmas) telah dimintakan pada saat penyidikan telah dimulai, hanya disayangkan kalau sifat perbantuan tersebut dimanfaatkan oleh penyidik hanya sebatas memenuhi formalitas belaka.

Idealnya, sifat perbantuan tersebut dapat lebih dimanfaatkan secara optimal/maksimal oleh penyidik untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil sebagai reaksi dari kenakalan yang dilakukan anak tersebut, selain tindakan represif belaka. Dengan kata lain, setelah penyidik mendapatkan litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, dapat membantu penyidik untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang bukan bersifat menghukum semata, bahkan mungkin dapat menyelesaikan/menghentikan kasus sebatas tingkat penyidikan - yang berarti mengembalikan si anak pada lingkungan asalnya/keluarganya - kalau

memang kebutuhan anak lebih cenderung untuk diberikan tindakan yang demikian. Dalam bentuk yang lain, pihak penyidik juga dapat memanfaatkan perbantuan yang bersifat pertimbangan (*advisor*) Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 8 (delapan) tahun – seperti yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997<sup>125</sup> - tetapi pada seluruh anak nakal yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, seperti yang terumus dalam Pasal 1 sub 2. a dan b UU No. 3 Tahun 1997.

#### **4. Urgensi Pengakuan Eksistensi Psikologi Dalam Penanganan Kenakalan anak/ Tindak Pidana Anak**

Upaya terakhir yang juga penting untuk dikemukakan berkaitan dengan kondisi-kondisi penumbuhan potensi fungsionalisasi lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh dalam kasus tindak pidana anak, adalah pengakuan eksistensi psikologi bagi struktur hukum peradilan anak, dalam menangani masalah kenakalan anak. Dikatakan penting karena psikologi sangat membantu aparat penegak hukum dalam hal pemahaman tentang perbuatan yang mereka lakukan, disamping membantu dalam hal pemberian tindakan yang akan diberikan kepada anak pelaku, sesuai dengan kebutuhan si anak dan terutama tidak menghambat perkembangan kejiwaannya. Pemahaman pentingnya peranan psikologi terhadap penanganan kenakalan anak, terfokus pada 2 bagian pembahasan, yaitu peranannya pada pemeriksaan pendahuluan dan pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

<sup>125</sup> Pasal 5 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 merumuskan : Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) (anak yang belum berumur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana – per) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.



a. Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Pendahuluan dalam Kasus Anak

Menurut Hukum Acara Pidana, pemeriksaan pendahuluan bermaksud untuk mencari kebenaran hakiki, yaitu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam persoalan hukum pidana, yang dihadapi adalah seorang tersangka (manusia), yaitu seorang manusia dengan akal pikiran, kehendak, perasaan, nafsu, dan sebagainya.

Bertitik tolak dari sifat manusia tersebut di atas, tentunya penyidik bisa menempatkan dirinya dalam menghadapi manusia yang disangka telah melanggar aturan hukum. Bila penyidik menyadari akan hal ini, segala persoalan yang dihadapi dalam hubungannya dengan tersangka, tentunya diselesaikan secara manusiawi pula. Hal ini tak terlepas dari nilai-nilai dasar (HAM) yang melekat pada diri si pelaku, dan sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penyidik dalam hal menghadapi tersangka, menurut Inbau dan Reid dalam bukunya "*Criminal Interrogation and Confession*" yang dikutip oleh Gerson Bawengan<sup>126</sup>, membagi menjadi dua golongan, yaitu :

- (1). Tersangka yang kesalahannya sudah definitip atau dapat dipastikan, dan
- (2). Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Penyidik lebih mudah bila menghadapi tipe (1) karena telah memiliki data dan fakta yang meyakinkan bahwa tersangka adalah pelaku; sementara bila berhadapan dengan tipe (2) penyidik belum bisa memastikan apakah tersangka sebagai pelaku perbuatan atau bukan, dan ini memerlukan sikap keberhati-hatian, kecermatan, dan ketekunan penyidik.

---

<sup>126</sup> Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 57.

Ditinjau dari segi kejiwaan tersangka, pelaku kejahatan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

(1). Emotional Offenders

(2). Non-Emotional Offenders<sup>127</sup>

ad (1). Golongan *Emotional Offenders* adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang, misalnya pembunuhan, penganiyaan yang dilakukan oleh dorongan nafsu, amarah, balas dendam dan sebagainya termasuk pula kelalaian karena salah. *Offenders* tidak dalam keadaan sadar penuh, faktor emosi menguasai perbuatannya, mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) tidak bekerja secara normal. Pelaku golongan ini biasanya mau menyesali perbuatannya.

ad (2). Golongan *Non-Emotional Offenders* ialah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan keuangan (*financial gain*), misalnya mencuri, merampok, membunuh atau menganiaya dengan tujuan memperoleh uang. Mereka merasa bangga, senang atas keberhasilan dan tidak merasa menyesal.

Mengenai penggolongan pelanggar hukum dari segi kejiwaan, Abrahamsen memberikan komentar sebagai berikut :

“Mengklasifikasikan pelanggar-pelanggar hukum, haruslah didasarkan pada faktor psikologis dari pribadi itu sendiri tanpa melupakan situasi lingkungan serta kombinasi antara kedua faktor termaksud.”<sup>128</sup>

Abrahamsen memberikan penggolongan pelanggar hukum menjadi dua golongan, yaitu pelanggar yang *acute* dan *chronic*. *Acute offender* adalah orang yang melakukan kejahatan

<sup>127</sup> Ibid

<sup>128</sup> Abrahamsen dalam Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, op.cit., hal. 23.

pada sekali waktu; sementara *chronic offender* adalah orang yang melakukan kejahatan sebagai kebiasaan.

Dalam hal menghadapi pelanggaran yang pelakunya adalah anak-anak/remaja, peranan psikologi disadari oleh pembentuk kebijakan sebagai hal yang dipentingkan. Hal tersebut terlihat pada perumusan Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas keamasyarakatan lainnya (garis bawah oleh penulis).

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sudah ada niat baik dari pemerintah secara idealistis-rasionalis memperlakukan anak pelaku pelanggaran lebih humanistik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan subjektif si anak. Niat baik tersebut merupakan pengejawantahan nilai-nilai global yang tertuang dalam dokumen-dokumen internasional yang menggariskan bahwa kesejahteraan anak adalah sebagai pedoman/penuntun (*guiding factor*) dalam memperlakukan anak-anak yang mempunyai hambatan kelakuan.

Di sisi lain, dalam diri petugas penyidikpun – yang melakukan penyidikan terhadap kenakalan anak – diisyaratkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>129</sup> Syarat-syarat tersebut hanya akan menjadi slogan semata apabila dalam diri si penyidik

<sup>129</sup> Dalam UU No. 3 Tahun 1997, dalam Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa penyidik anak harus memenuhi syarat-syarat :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dalam Penjelasan Pasal, yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah :

- (1). Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- (2). Pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- (3). Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

tersebut tidak mempunyai niat dan diberi kesempatan untuk selalu mempelajari psikologi perkembangan anak, dan menempatkan dirinya seolah-olah berada dalam alam kehidupan anak. Penunjukan penyidik khusus (penyidik anak) seperti yang diisyaratkan Rule 12.1 SMR.JJ (*The Beijing Rules*) tentang *Specialization within the police* yang menekankan perlunya suatu unit polisi khusus yang terdidik dan terlatih -- menjadi hal yang urgen apabila kita menginginkan penanganan yang lebih manusiawi dalam menghadapi kasus-kasus kenakalan anak.

b. Peranan Psikologi dalam sidang pengadilan anak

Dalam sidang pengadilan anak, psikologipun sangat berperan. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang secara eksplisit menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum, bermaksud memberikan perlindungan terhadap anak akan beban psikologis yang diperoleh anak. Dalam hal ini, Ny. Lanya Moeljatno mengungkapkan bahwa sidang tertutup untuk umum bagi perkara anak, bermaksud :

“Untuk melindungi anak agar jangan menjadi tontonan orang, sehingga ia merasa tertekan dan malu. Lagipula agar hari depannya tidak terganggu oleh publikasi tentang perkaranya yang dengan sendirinya akan terjadi dengan turut hadirnya pers dalam sidang. Ada kemungkinan dengan pemberian cap sebagai anak yang diputus oleh pengadilan pidana, ia menjadi jahat atau deviant atau tidak memperoleh tempat kembali di sekolah atau tidak mendapat tempat kerja.”<sup>142</sup>

Pada acara pemeriksaan saksi pun -- seperti yang terumus dalam Pasal 58 ayat (1) -- perintah hakim agar terdakwa anak dibawa ke luar sidang, bermaksud untuk menghindari adanya hal buruk yang akan mempengaruhi jiwa anak.

<sup>142</sup> Lanya Moeljatno, *Pelaksanaan Peradilan Anak Di Indonesia Pada Waktu Sekarang Dan Pengaturannya Menurut Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak*, Pidato Dies ke-39 UII, Yogyakarta, 1983, hal. 18.

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997). Dalam pemeriksaan di pengadilan dimana hakim dianjurkan untuk tidak memakai pakaian kebesarannya, amat didukung oleh Ny. Mutiara Djokosutono agar tidak tercipta suasana peradilan -- seperti yang dilakukan apabila terdakwa adalah orang dewasa -- dan persidangan cenderung dilakukan dengan wawancara (dalam suasana kekeluargaan -- pen). Lebih lanjut dikatakan bahwa hakim yang mengadili perkara anak nakal, haruslah mengetahui ilmu jiwa anak dan menerapkannya.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Mutiara Djokosutono dalam Mudzakkir, op.cit., hal. 61.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan pembahasan-pembahasan dari permasalahan yang menjadi lingkup dalam penelitian ini pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak dalam sistem peradilan anak, umumnya tidak berbeda dengan tindakan-tindakan yang diberikan bagi orang dewasa. Pengungkapan kalimat bahwa anak mempunyai "ciri dan sifat khusus" dalam Konsideran UU No. 3 tahun 1997, masih merupakan slogan semata dan kurang dipahami oleh struktur hukum peradilan anak. Hal ini terlihat pada bentuk sanksi hukum yang diberikan terhadap anak nakal, terkonsentrasi pada putusan bersifat kelembagaan/ institusional dan sama sekali tidak mengenal jenis putusan non-kelembagaan berupa Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Persoalan utama kondisi yang demikian disebabkan karena putusan pidana penjara digunakan aparat pemutus (hakim) semata-mata untuk menyeimbangkan terhadap tindakan-tindakan penahanan yang diambil oleh aparat sebelumnya, yaitu pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Karenanya, sebagian besar dari putusan pidana penjara tersebut mempunyai selang waktu/lama yang sama dengan lamanya si anak menjalani proses pemeriksaan dari awal hingga pemberian putusan oleh hakim. Penangguhan penahanan adalah solusi yang paling rasional dan mendasar dalam menunjang eksistensi putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh tersebut.

2. Tidak dikenalnya putusan Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuh sebagai reaksi terhadap kenakalan anak mengingkari tujuan peradilan anak itu sendiri, yaitu semata-mata demi "kesejahteraan anak", bahkan seharusnya kita tidak berharap berlebihan terhadap kapabilitas peradilan anak sebagai sarana menjadikan "taat hukum" bagi anak nakal. Kondisi demikian teridentifikasi pada masalah-masalah :

- Adanya perbedaan perspektif subjek hukum pemutus (hakim) disatu pihak dengan aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan (penyidik dan penuntut umum) dilain pihak, tentang tujuan peradilan anak. Hakim sudah lebih memiliki pemahaman bahwa "kesejahteraan anak" adalah sebagai faktor pedoman (*guiding factor*) dalam menangani masalah anak; sementara tindakan polisi/penyidik dan jaksa lebih bersifat yustisial/formalistik dan birokratik.
- Kurang difungsikannya penasihat hukum sebagai struktur yang harus diperhitungkan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana terpadu, terutama dalam kasus kenakalan anak untuk menjamin bantuan hukum bagi mereka.
- Pendampingan pembimbing kemasyarakatan terutama terhadap pola kerja penyidik yang menangani masalah kenakalan anak, dianggap kurang difungsikan secara optimal/maksimal, baik dalam hubungan pemanfaatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mengungkapkan latar belakang perbuatan dan kehidupan sosial anak, maupun pada fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai advisor (pemberian pertimbangan).
- Kurang diperhitungkannya eksistensi psikologi oleh aparat penegak hukum, baik dalam hal membantu pemahaman terhadap ketidaknormalan (abnormal) perilaku anak,

maupun dalam hal pemilihan tindakan-tindakan yang akan diberikan, yang tidak menghambat/merusak perkembangan kejiwaan (*psyche*) anak pelaku.

3. Identifikasi kondisi-kondisi tersebut memberi pemahaman yang secara rasional mendorong upaya difungsionalisasikannya lembaga pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, melalui :

- pengeliminasian perbedaan perspektif struktur hukum peradilan anak tentang tujuan peradilan anak yang berwujud sosialisasi kewenangan penangguhan penahanan di setiap proses peradilan; juga perluasan diskresi dalam segala tingkatan pemeriksaan terutama di tingkat penyidikan (diskresi kepolisian), yang menunjukkan adanya penghentian pemeriksaan dan mengembalikan si anak kepada keluarganya.
- penumbuhan sikap pentingnya bantuan hukum dalam proses peradilan anak, yang akan sangat membantu kepentingan hukum si anak, karena anak (pelaku) adalah tetap seorang anak dengan segala kekurangmandirian/ketergantungan yang melekat pada dirinya.
- optimalisasi manfaat pendampingan pembimbing kemasyarakatan (PK) terutama di tingkat penyelidikan/penyidikan - sebagai proses pertama yang mengadakan kontak awal dengan anak - dalam hal pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan perbantuan yang bersifat pertimbangan (advisor).
- urgensi pengakuan eksistensi psikologi bagi struktur hukum peradilan anak, baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun di sidang pengadilan, yang dibutuhkan aparat dalam memahami hubungan batiniah/kejiwaan si anak pelaku dengan perbuatannya, disamping juga membantu dalam hal penentuan tindakan apa yang patut diberikan yang tidak menghambat perkembangan kejiwaan (*psyche*) anak pelaku.



## **B. SARAN-SARAN**

1. Perlu adanya kesatuan persepsi/pandangan dari struktur hukum peradilan anak tentang tujuan peradilan anak, karena selama ini tindakan yang diberikan terhadap anak pelaku tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap pelaku dewasa. Dengan demikian, maka dapat diciptakan kesatuan sikap tindak dalam penanganan kenakalan/tindak pidana anak.
2. Perlu adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang tindakan-tindakan yang positif (prososial) terhadap anak, yaitu dengan dibentuknya biro/badan khusus dengan personil yang khusus pula dalam menangani perilaku anak nakal (polisi anak dan jaksa anak), dan melakukan pelatihan-pelatihan khusus sebagai usaha pemahaman terhadap anak sebagai subjek perlindungan hukum dan permasalahannya.
3. Perlu adanya pemikiran dan aplikasi yang integral dari seluruh komponen bangsa untuk lebih mengutamakan perhatian terhadap pencegahan kenakalan anak, dibandingkan dengan penanganan yang dilakukan setelah si anak melakukan kenakalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Aryadi, Gregorius. **Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1995
- Affandi, wahyu. **Berbagai Masalah Hukum di Indonesia**. Bandung : Alumni, 1992
- Atmasasmita, Romli. **Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja**. Bandung : Armico, 1983
- , **Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)**. Bandung : Binacipta, 1996
- Albrow, Martin. **Bureaucracy**. Second Ed. Terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989
- Brenner, M. Harvey. **Effects of the Economy on Criminal Behavior and the Administration of Criminal Justice in the United States, Canada, England and Wales, and Scotland**. Terjemahan D. Guritno. Jakarta : Rajawali, 1986
- Blumberg. **Criminal Justice System**. Chicago : Quangdrate Books, 1970
- Bawengan, Gerson W. **Pengantar Psychologi Kriminal**. Jakarta : Pradnya Paramita, 1973
- , **Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi**. Jakarta : Pradnya Paramita, 1977
- Blaw, Peter M. and Marshall W. Meyer. **Bureaucracy in Modern Society**. Terjemahan Gary R. Yusuf. Jakarta : UI Press, 1987
- Costin, Lela B. **The Child and The Court**. New York : Mc. Graw - Hill Book Company, 1972
- Daradjat, Zakiah. **Kesehatan Mental**. Cetakan Kedua. Jakarta : Gunung Agung, 1983
- , **Kesehatan Mental Dalam Keluarga**. Jakarta : Pustaka Antara, 1993
- Dt. Tan Pariaman, Hasan Basri Saanin. **Psikiater Dan Pengadilan**. Tanpa tempat : Binacipta, Tanpa Tahun.
- Darmawan, Mohammad Kemal. **Strategi Pencegahan Kejahatan**. Bandung : Citra Aditia Bhakti, 1994

- Delfyana, Shanti. **Wanita Dan Anak Di Mata Hukum**. Yogyakarta : Liberty, 1988
- Faisal, Sanapiah. **Penelitian Kualitatif. Dasar- Dasar Dan Aplikasi**. Malang : yayasan asih Asah asuh, 1990
- Faal, M. **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991
- Gosita, Arif. **Masalah Perlindungan Anak**. Jakarta : Akademika Pressindo, 1985
- , **Hukum Dan Hak Hak Anak**. Jakarta : CV. Rajawali, 1986
- , **Masalah Korban Kejahatan**. Jakarta : Akademika Presindo, 1993
- Gibbons, Don C. **Society, Crime, and Criminal Behavior**. Sixth Edition. New Jersey : Prentice Hall, 1992
- Goldstein, H. **Policing a Free Society**. Cambridge : Ballinger Publishing Co., 1997
- Gurvitch, George. **Sosiologi Hukum**. Terjemahan Sumantri Mertodiputro dan Mohammad Radjab. Jakarta : Bhratara, 1988
- Gerungan. **Psikologi Sosial Suatu Ringkasan**. Bandung : Eresco, 1966
- Gunarso, Ny. Singgih D. **Psikologi Anak Bermasalah**. Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1995
- Hartono, Sunaryati. **Apakah the Rule of Law**. Bandung : Alumni, 1996
- Hulsman, L.H.C. **Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi**. Jilid I. Terjemahan Wonosusanto. Surakarta : Forum Studi Hukum Pidana, 1983
- Haskell, Martin R. and Lewis Yablonsky. **Criminology, Crime, and Criminality**. Chicago : Rand Mc Hally College Publishing Company, 1974
- Hadisuprpto, Paulus. **Juvenile Delinquency. Pemahaman Dan Penanggulangannya**. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Kartono, Kartini. **Psikologi Abnormal Dan Patologi Seks**. Bandung : Alumni, 1981
- , **Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja**. Jakarta : Rajawali, 1986
- Katjasungkana, Nursyahbani. **Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun**. Jakarta : Universitas Indonesia, 1995

**Kenney, John P. and G. Pursuit. Police Work With Juvenile.** Illinois : Charles C. Thomas  
Publisher Springfield, 1954

**Kusumah, Mulyana W. Aneka Permasalahan Dalam Lingkup Kriminologi.** Bandung :  
Alumni, 1981

**Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia.** Bandung : Armico, 1984

-----, dan C. Djisman Samosir. **Delik Dalik Khusus.** Bandung : Tarsito, 1981

**Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat.** Bandung : Alumni, 1992

-----, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.** Semarang : Badan Penerbit Universitas  
Diponegoro, 1995

----- dan Barda Nawawi arief. **Bunga Rampai Hukum Pidana.** Bandung : Alumni, 1992

**Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996

**Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana.** Yogyakarta : Univercity Press, 1978

-----, **Delik Delik Penyertaan.** Yogyakarta : Gadjahmada Press, 1981

-----, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.** Jakarta :  
Bina Aksara, 1983

**Mudzakkir. Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana.** Cetakan Pertama.  
Yogyakarta : Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum UII, 1985

**Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan  
Pidana Penjara.** Semarang : Ananta, 1994

-----, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.** Bandung : Citra Aditya  
Bakti, 1996

-----, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan  
Hukum Pidana.** Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998

**Nusantara, Abdul Hakim G. Hukum Dan Hak-Hak Anak.** Disunting oleh Mulyana W.  
Kusumah. Jakarta : Rajawali, 1986

**Nurdin, M. Fadhil. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial.** Edisi Kesatu. Bandung :  
Angkasa, 1990

- Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (PIPHAM). **Konvensi Hak Hak Anak (The Rights of the Child)**. Terjemahan Yohannes dan Marenus Arus. Jakarta : Tanpa penerbit, 1996
- Pernomo, Bambang. **Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah**. Jakarta : Bina Aksara, 1982
- Pernomo, Bambang. **Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa**. Tanpa Tempat : Bina Aksara, 1984
- Reksodiputro, Mardjono. **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga**. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum – UI, 1994
- Rahardjo, Satjipto. **Masalah Penegakan Hukum**. Bandung : Sinar Baru, 1983
- Siregar, Bismar. **Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan**. Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. Jakarta : Gema Insani Press, 1195
- Soedarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**. Bandung : Alumni, 1981
- Salah, Roeslan. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana**. Jakarta : Aksara Baru, 1981
- , **Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana**. Jakarta : Sinar Grafika, 1988
- Samosir, Djisman. **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**. Jakarta : Binacipta, 1992
- Simandjuntak, B. **Psikologi Perkembangan**. Edisi Revisi. Bandung : Tarsito, 1979
- , **Latar Belakang Kenakalan Remaja**. Bandung : Alumni, 1984
- , **Patologi Sosial**. Bandung : Tarsito, 1985
- Soemitro, Ronny Hanitijo. **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Soekanto, Soerdjono. **Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum**. Bandung : Alumni, 1979
- , **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : UI Press, 1986

- , **Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi**. Jakarta : Remaja Karya, 1985
- Sarwono, Sarlito Wirawan. **Psikologi Remaja**. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Simorangkir, J.C.T. dan kawan-kawan. **Kamus Hukum**. Jakarta : Aksara Baru, 1980
- Soedjono, D. **Kriminologi**. Bandung : Tarsito, 1974
- Soedjono, D. **Ilmu Jiwa Kejahatan**. Bandung : Karya Nusantara, 1977
- , **Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana** Bandung : Alumni, 1981
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. **Anak Dan Wanita Dalam Hukum**. Jakarta : LP3ES, 1989
- Strong, Ruth. **Fakta Fakta Tentang Kejahatan Anak Anak Nakal**. Jakarta : Yayasan Jakarta, 1972
- Susilo, R. **Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor : Politea, 1985
- Sahetapy, J.E. dan Mardjono Reksodiputro. **Parados Dalam Kriminologi**. Jakarta : Rajawali, 1982
- Sudarsono. **Kenakalan Remaja**. Edisi Kedua. Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K. Cetakan Ke-tiga. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Tappan, Paul W. **Juvenile Delinquency**, New York – Toronto – London : Mc Graw Hill Book Coy Inc., 1949
- Troajanowicz, Robert C. and Merry Morash. **Juvenile Delinquency. Concept and Control**. Third Edition. New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1983
- Utrecht. **Hukum Pidana II**. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1987
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. **Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia**. Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Williams, J. E. Hall. **Changing Prison**. London : Peter Owen, 1975

## **SUMBER LAIN**

- Atkinson, Lynn. **Responding to Juvenile Crime in the 1990**. Paper for Urban Crime : International Trends in Criminal Policy Conference. Yogyakarta, tahun 1993
- Gunarso, Singgih. **Perubahan Sosial Dalam Masyarakat**. Makalah Seminar Keluarga Dan Budaya Remaja Di Perkotaan. Universitas Indonesia. Jakarta, tahun 1989
- Katjasungkana, Nursyahbani. **Keadilan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. Suatu Pendekatan Kriminologis**. Makalah Lokakarya Nasional Perlindungan Anak Dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya Dalam Sistem Peradilan Anak. Jakarta, tahun 1995
- Loqman, Loebby. **Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak Di Indonesia**. Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi. Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995
- Moeljatno, Lamy. **Pelaksanaan Peradilan Anak Di Indonesia Pada Waktu Sekarang Dan Pengaturannya Menurut Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**. Pidato Dies ke-39 UII. Yogyakarta, tahun 1983
- Prasetya, Hary. **Mengapa Perilaku Prososial Pada Anggota Polri Diperlukan?** Wira Bhakti Medio Oktober 1997
- Reksodiputro, Mardjono. **Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)**. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI. Jakarta, tahun 1993
- Susanto, I.S. **Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan, dan Penyebarannya**. Disertasi. Semarang, tahun 1990
- , **Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi Dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi Kejahatan**. Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi. Semarang, tahun 1993
- Soedarto. **Uraian Pokok Pokok Permasalahan**. Bahan Seminar Kriminologi ke-IV Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Semarang, tahun 1984
- Wachyudin, Djedje. **Perspektif Sistem Peradilan Anak Di Masa Mendatang**. Tesis Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1991
- Resolusi PBB 40/33. **UN Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)**. Tahun 1985
- Resolusi PBB tentang **The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders**, Dokumen A/CON.169/L.11 tentang **Elimination of Violence against Children**, Tahun 1995

**Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak**

**Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana,  
Dan Peraturan Pelaksanaannya**

**Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

**Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak.**

**Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

**Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.**